



UNIVERSITAS WIRARAJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : lppm@wiraraja.ac.id Website : lppm.wiraraja.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 094/SP.HCP/LPPM/UNIJA/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si
Jabatan : Kepala LPPM
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Ahmad Hasan Ubaid, S.I.P, M.I.P
Jabatan : Universitas Brawijaya Malang
2. Nama : Dr. Mohammad Hidayaturrahman, M.I.Kom.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "**PERILAKU VOTERS DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL**" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 5%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 21 Maret 2022

Kepala LPPM,

Dr. Anik Anekawati, M.Si.
NIDN. 0714077402

PERILAKU VOTERS DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

by Mohammad Hidayaturrahman

Submission date: 16-Mar-2022 03:24PM (UTC+0700)

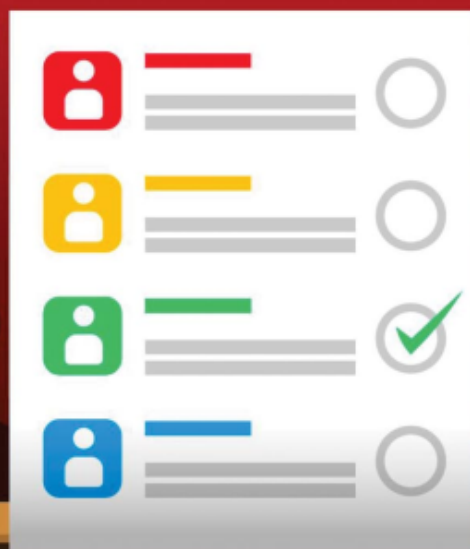
Submission ID: 1785498923

File name: L_Perilaku_Voters_Dalam_Masyarakat_Multikultural_layout_isbn.pdf (4.15M)

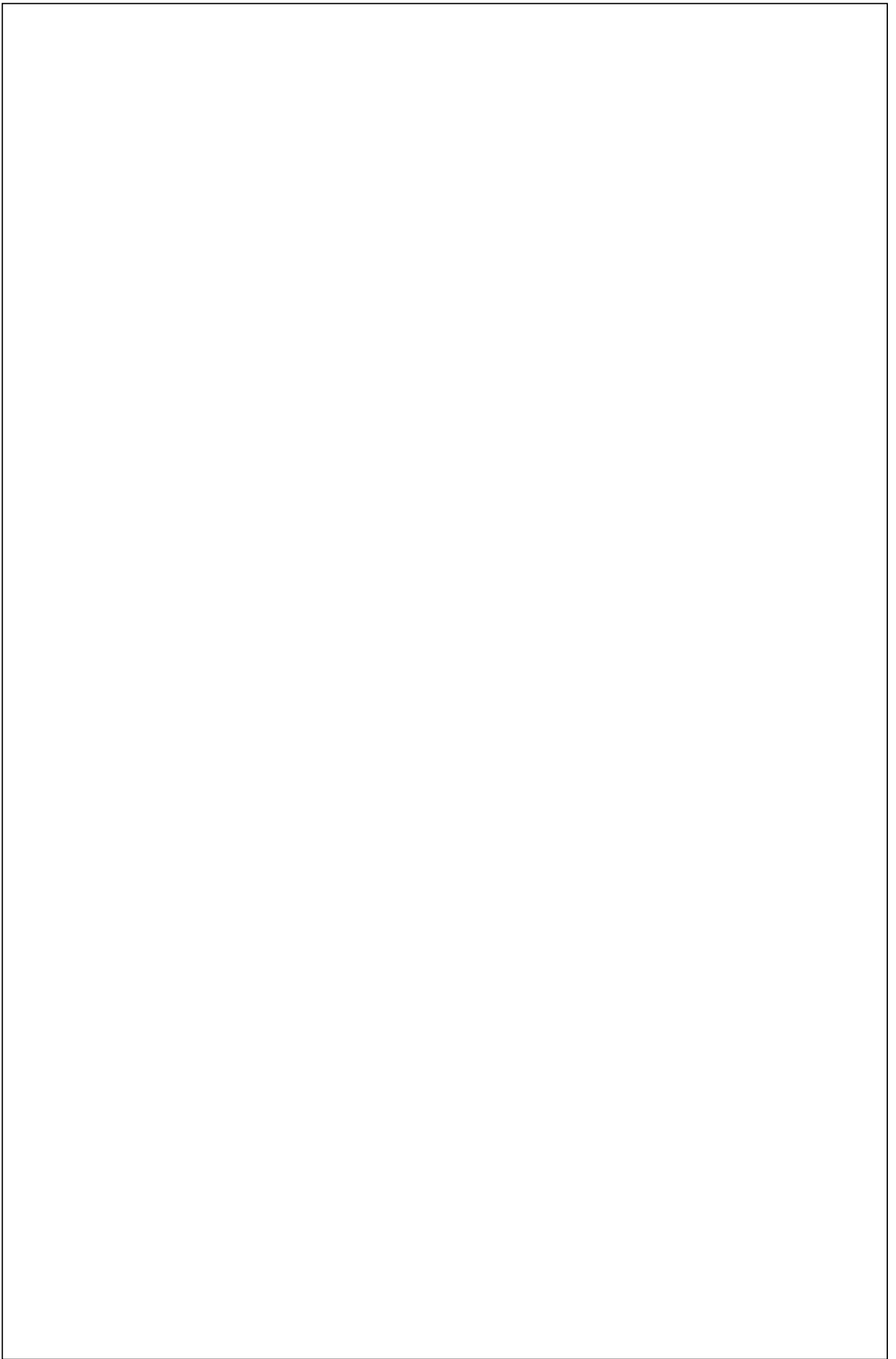
Word count: 23682

Character count: 154510

Ahmad Hasan Ubaid
Mohammad Hidayaturrahman



PERILAKU
VOTERS
DALAM
MASYARAKAT
MULTIKULTURAL





PERILAKU
VOTERS

DALAM

MASYARAKAT
MULTIKULTURAL

Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atauhuruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4. 000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Ahmad Hasan Ubaid
Mohammad Hidayaturrahman



PERILAKU
VOTERS
DALAM
MASYARAKAT
MULTIKULTURAL

PERILAKU VOTERS
DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

ISBN: 978-623-6146-35-4
Cetakan pertama, 2021
x + 106 hlm; 15 x 23 cm

Penulis:
Ahmad Hasan Ubaid
Mohammad Hidayaturrahman

Penata isi: Galih Bayu
Penata sampul: M. Rofiq Ma'mun

Diterbitkan oleh:
Eduitera
(Anggota IKAPI – No. 211/JTI/2019)
Imprint PT. Literindo Berkah Karya
Jl. Apel No. 28 A Semanding, Sumbersekar,
Dau, Kab. Malang (65151)
Telp./Fax: (0341) 5033268
Email: eduliteramalang@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PRAKATA

Buku monograf ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian di dalam buku ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku memilih masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota Medan Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data utama dari hasil survei sekaligus wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku memilih yang paling dominan pada masyarakat Medan ialah model sosiologis, yakni perilaku pemilih yang didasarkan pada preferensi sosiologis masyarakat. Faktor utamanya adalah disumbang oleh preferensi agama, etnis, maupun gender. Sedangkan pemilih rasional juga muncul, namun tidak sebesar pemilih sosiologis. Demikian juga dengan pemilih psikologis yang jumlahnya juga kecil. Kuatnya perilaku pemilih sosiologis ini, kami menilai dipengaruhi salah satunya oleh narasi politik identitas yang sudah muncul dalam momen pemilihan sebelumnya, yakni Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018, dan Pemilihan Presiden 2019. Narasi politik identitas ini ikut menyumbang terhadap menguatnya pertimbangan agama dalam perilaku pemilih di Kota Medan.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang ikut serta berpartisipasi di dalam terbitnya buku monograf ini. Di dalam penulisan buku ini, bisa jadi ada banyak kekurangan dan kesalahan, baik secara substansi maupun teknis. Untuk itu, kritik dan saran, serta masukan diharapkan, untuk perbaikan dan kebaikan pada masa mendatang.

Malang, Juni 2021

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Prakata.....	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel.....	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat.....	4
BAB II Tinjauan Pustaka	5
A. Model Perilaku Pemilih Sosiologis	5
B. Model Perilaku Sosial-Psikologis	7
C. Model Tindakan Rasional (<i>Rational Choice</i>)	9
BAB III Metode.....	13
A. Desain Penelitian	13
B. Fokus Penelitian.....	14
C. Lokasi Penelitian	14
D. Teknik Pengumpulan Data.....	15
E. Teknik Penentuan Informan	16
F. Sumber Data	16
G. Analisis Data	16

BAB IV	Pembahasan.....	19
A.	Gambaran Lokasi Penelitian	19
B.	Komposisi Perolehan Kursi DPRD Kota Medan.....	22
C.	Narasi Politik Identitas di Indonesia.....	23
D.	Politik Identitas	25
E.	Pengalaman Pilgub Sumatera Utara 2018	30
F.	Pengalaman Pilpres 2019	46
G.	Perilaku Politik Pemilih Pada Pilwako Kota Medan 2020.....	52
H.	Identifikasi Dukungan Partai Politik	56
I.	Pertimbangan Partai Politik dalam Memilih.....	60
J.	Faktor Pendukung dalam Perilaku Memilih.....	65
K.	Komposisi Pemilih Rasional, Sosiologis, dan Psikologis	76
L.	Kompleksitas Perilaku Memilih.....	83
BAB V	Penutup.....	85
	Kesimpulan.....	85
	Daftar Pustaka.....	87
	Riwayat Hidup Penulis.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Data Awal Tentang Perilaku Memilih di Kota Medan.....	3
Gambar 2.	Model Socio-psychological.....	8
Gambar 3.	Kerangka Penelitian	13
Gambar 4.	Ragam Etnis di Kota Medan.....	54
Gambar 5.	Strata Pendidikan Masyarakat Kota Medan.....	55
Gambar 6.	Pilihan Parpol Pada Pemilu 2019.....	59
Gambar 7.	Alasan Memilih Calon Wali Kota.....	60
Gambar 8.	Tokoh Anutan dalam Pilihan Politik	61
Gambar 9.	Pengaruh Agama Terhadap Pemilih.....	66
Gambar 10.	Kriteria Utama Calon Wali Kota.....	67
Gambar 11.	Pengaruh Dukungan Tokoh Agama	70
Gambar 12.	Pengaruh Latar Belakang Suku.....	71
Gambar 13.	Latar Belakang Suku yang Dipilih	71
Gambar 14.	Faktor Jenis Kelamin (Gender).....	73
Gambar 15.	Latar Belakang Pengalaman Kandidat.....	74
Gambar 16.	Kombinasi Kandidat berdasar Latar Belakang.....	75
Gambar 17.	Komposisi Perilaku Memilih Kota Medan	76
Gambar 18.	Program yang dianggap tidak berhasil.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perolehan Kursi Partai di DPRD Kota Medan Periode 2019-2024.....	22
Tabel 2. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera 2018.....	31
Tabel 3. Karakter etnisitas dalam perpolitikan di Sumatera Utara	40
Tabel 4. Perbandingan Perolehan Kursi di DPRD Kota Medan 2014-2019.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Demokrasi dan penyelenggaraan pilkada langsung membawadampakyangbesarterhadapmasyarakatmultikultural Indonesia. Pada tahun-tahun awal pasca reformasi, seiring dengan arus demokratisasi di Indonesia, para ilmuwan politik dan pengamat mencatat bahwa terdapat peningkatan konflik berbasis kesukuan dan agama di Indonesia. Dampak tersebut dapat dirasakan salah satunya di kota Medan, Sumatera Utara.

Pertarungan politik di tengah masyarakat Medan memang tak bisa lepas dari rasa kedaerahan, kesukuan, hingga identitas keagamaan. Pada Pilkada serentak tahun 2018 lalu, muncul warna baru dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera. Pemilihan gubernur tersebut menyisakan ingatan politik identitas dan etnisitas yang cukup kuat bagi masyarakat Medan. Isu-isu politik identitas mengemuka seperti jumlah pemilih tambahan yang membengkak, isu pocong gentayangan mengkampanyekan anti golput, spanduk larangan memilih pemimpin kafir, serta himbauan memilih putra daerah.

Kontestasi gubernur disajikan secara tajam dengan dua pilihan kandidat yang memiliki visi, misi, dan cara berkampanye yang berbeda. Kandidat pertama yaitu Edy Rahmayadi (ERAMAS)

menyajikan narasi politik identitas berbasis agama dengan menggunakan para pemuka agama Islam dan pemimpin adat sebagai mesin politik mereka. Pada saat menjelang kampanye, masyarakat diajak untuk memikirkan identitas keagamaan mereka dengan cara safari dakwah bersama ustadz Abdus Shomad, kegiatan dzikir akbar, menyediakan sarana pembersih untuk masjid, dan sholat subuh berjamaah. Sementara calon lainnya Djarot menyajikan kampanye berbasis kesukuan yang menampilkan narasi kemegahan adat di berbagai daerah dan juga secara langsung terlibat dalam aktivitas adat untuk meyakinkan masyarakat. Sementara pasangan Djarot ini dalam aktivitas kampanye berbasis agamanya hanya mengunggulkan cara kunjungan ke pemuka agama di beberapa tempat.

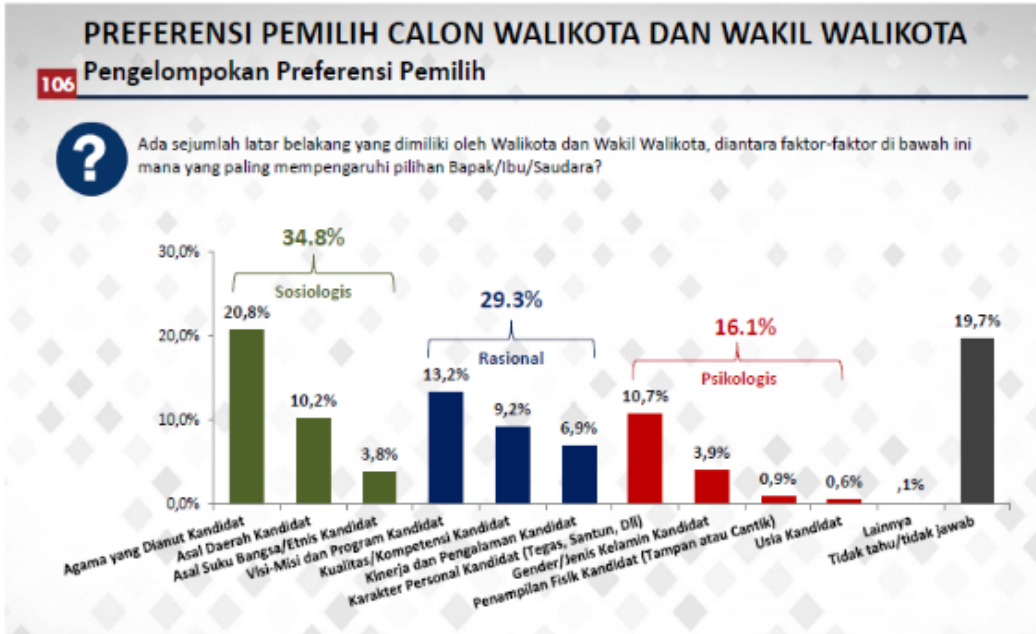
Pada tahun berikutnya, kota Medan juga menjadi saksi dari politik identitas nasional yang menghadirkan dua pasangan calon dengan latar belakang hampir sama. Pemilihan umum serentak menyeret masyarakat Medan ke arah polarisasi berbasis agama yang kuat. Pola ini sudah terindikasi pada awalnya sejak tahun 2017, dimana dampak dari Pilkada Jakarta juga menyeret kontestasi politik identitas berbasis agama ke daerah. Sehingga drama pilkada Jakarta tersebut harus berlanjut dengan nuansa pemilihan yang berbeda pada tahun 2018, dan 2019.

Pada tahun 2020, masyarakat Medan akan kembali mengikuti gelaran pemilihan kepala daerah untuk memilih walikota dan wakil walikota Medan. Permasalahan yang menarik diteliti dari pemilihan walikota dan wakil walikota Medan 2020 ini adalah bagaimana perilaku politik masyarakat Medan setelah menjalani tiga rangkaian pemilihan yang berbeda pada kurun waktu yang berurutan.

Observasi awal yang dilakukan peneliti di Kota Medan menunjukkan bahwa jejak politik identitas berbasis agama dan etnisitas masih cukup tinggi di kota ini. Berdasarkan data survei yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada bulan Januari 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Gambar 1.

Data Awal Tentang Perilaku Memilih di Kota Medan



Sumber: Poltracking Indonesia, 2020

Berdasarkan data awal tersebut dapat dinyatakan bahwa pemilih sosiologis di Kota Medan menguat dengan kisaran pemilih yaitu sebesar 34,8%. Sementara pemilih rasional berada di urutan kedua dengan jumlah 29,3%, dan diikuti dengan pemilih yang tidak tahu/tidak jawab sebesar 19,7% dan pemilih psikologis sejumlah 16,1 persen. Pemilih sosiologis, sebagaimana dijelaskan dalam data tersebut adalah pemilih yang menggunakan pilihannya dengan berdasarkan pada latar belakang agama, daerah, dan suku dari kandidat yang bersangkutan. Pemilih rasional adalah pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan visi-misi, kualitas dan kompetensi kandidat, serta pengalaman yang dimiliki kandidat. Berikutnya pemilih psikologis adalah pemilih yang memilih berdasarkan karakter personal, jenis kelamin, penampilan fisik, dan usia kandidat.

Data tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut, untuk dilakukan pengkajian silang dengan data-data kualitatif berdasarkan wawancara terstruktur pada informan di kota Medan yang berasal dari latar belakang agama dan etnis yang

berbeda. Hal ini penting untuk mengetahui lebih lanjut mengenai karakteristik pemilih di wilayah perkotaan Medan yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi.

B. Permasalahan Penelitian

- a) Bagaimana perilaku memilih masyarakat Medan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020?
- b) Apakah faktor pilihan berbasis sosiologis menempati faktor paling signifikan dan mengungguli faktor pilihan berbasis rasional dan pilihan berbasis psikologis?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat Medan dalam Pemilihan Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan tahun 2020.
2. Untuk mengetahui implikasi dari menguatnya politik identitas berbasis agama dan etnisitas terhadap masyarakat Medan yang multikultural.
3. Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat Medan pada Pilwali Kota Medan 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam khasanah ilmu²⁸ politik, perilaku politik individu terbentuk berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk memilih partai politik atau kandidat dalam pemilihan umum. Faktor tersebut meliputi faktor sosial, etnisitas, agama, kesejarahan, ekonomi, hingga pengalaman psikologis tertentu yang mempengaruhi keputusan individu di dalam bilik suara.

Secara saintifik perilaku memilih terbagi menjadi tiga pendekatan yang selama ini dianggap fundamental dalam ilmu politik, yaitu model sosiologis, model psikologis, dan model tindakan rasional (*rational choice*).

A. Model Perilaku Pemilih Sosiologis

Pendekatan pertama dan tertua dalam studi perilaku memilih ini yaitu pendekatan sosiologis. Pada tahun 1944, Lazarsfeld mengemukakan bahwa pilihan untuk memilih lebih banyak dipengaruhi oleh loyalitas kelompok yang berakar pada agama, ras, suku, kelas, dan kasta-kasta tertentu dalam masyarakat. Secara mayoritas, pemilih memutuskan pilihan politik mereka berdasarkan kecenderungan tertentu yang

mengarah pada identitas sosial kelompok, kedaerahan, dan agama.¹

Kecenderungan pilihan berbasis identitas ini mempengaruhi secara kuat perilaku memilih masyarakat dalam pemilu. Mereka membicarakan pilihan politik mereka dalam ruang interaksi yang ada di lingkungan sosial di sekitar individu. Sehingga berdasarkan model perilaku memilih ini, memilih bukanlah sebuah aktifitas individual. Memilih adalah aktivitas kolektif dari sebuah kelompok sosial dimana seseorang menentukan pilihan politik mereka. Pendekatan ini secara populer juga dikenal sebagai pendekatan Columbia.

Dalam studinya, Lazarsfeld mengamati sebuah desa bernama Erie County, di negara bagian Ohio, Amerika Serikat, sebagai sampel distriknya karena kawasan tersebut cukup kecil untuk dapat diakses secara logistik dan sangat dekat dengan karakteristik wilayah pedesaan yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Namun demikian, sebagaimana catatan Lazarsfeld dan koleganya selama penelitian, mereka menekankan bahwa ketertarikan mereka adalah pada bagaimana proses seseorang menentukan pilihan namun bukanlah pada mengapa mereka memilih calon tersebut dalam Pemilu. Dengan kata lain, para peneliti dalam model sosiologis awal ini lebih tertarik melakukan studi tentang proses menuju sebuah pilihan politik, namun tidak begitu menekankan pada sebuah pilihan politik sebagai sebuah tindakan yang memiliki penjelasan tertentu.

Secara khusus, Lazarsfeld dan para kolega penulisnya, lebih tertarik pada proses terbentuknya pilihan politik menjelang pemilu pada masyarakat homogen. Dalam temuannya mereka menyebut bahwa terdapat sejenis tekanan dari berbagai arah terhadap seorang individu dari masyarakat di sekelilingnya untuk memilih partai tertentu, dan juga melakukan hal yang sama secara konsisten dalam waktu atau jenis pemilihan yang berbeda.

21

¹ Lazarsfeld, P. F. Berelson, B., & Gaudet, H. *The people's choice: How the voter makes up his mind in a Presidential Campaign*. New York: Columbia University Press, 1944

B. Model Perilaku Sosial-Psikologis

Pendekatan kedua dalam studi perilaku memilih dikenal sebagai model psikologis. Pendekatan psikologis ini memiliki dua aspek, salah satu aspek menekankan pada peran dari sikap keberpihakan kelompok atau identifikasi partai politik (Party ID). Aspek lainnya menekankan pada pemanfaatan politis dari individu terhadap partisipasi mereka dalam pemilihan umum. Para ilmuwan politik menyepakati model ini sebagai model *party identification*. Model ini meyakinkan bahwa pemilih memiliki kesetiaan khusus yang tahan lama terhadap partai politik tertentu, dan jarang merubah komitmen memilih mereka kepada pilihan lain. Para pemilih muda mewarisi kesetiaan para orang tua mereka terhadap partai tertentu. Para pemilih ini memiliki kesetiaan yang mempengaruhi pilihan mereka secara kuat karena pengalaman masa lalu yang mengingatkan mereka terhadap apa yang diwarisi para orang tua mereka. Model ini juga dikenal secara luas sebagai model Michigan yang menekankan pada pendekatan *socio-psychological*.

Meski demikian, model Party ID ini diyakini tidaklah kompatibel terhadap konteks pemilih di Indonesia. Pada dasarnya, partai politik di Indonesia tidak memiliki hubungan yang dekat dan historis dengan pemilih. Partai politik di Indonesia tidaklah konsisten dalam memperjuangkan program-program yang menguntungkan konstituen mereka secara langsung dan tidak memiliki akar ideologi yang kuat di masyarakat. Persoalan lain yang menyebabkan hal itu adalah bahwa partai Indonesia cenderung mengadopsi kebijakan atau program-program partai yang sifatnya mampu menarik lebih banyak massa, sehingga hal itu menyebabkan mereka selalu mengambil posisi tengah dalam kebijakan partai mereka.

Pada dasarnya model Michigan, atau model sosio-psikologis ini, sangat berpengaruh dalam revolusi perkembangan teoritik dalam perilaku memilih (*political behavior*). Dalam penelitiannya mereka menggunakan pendekatan terstruktur

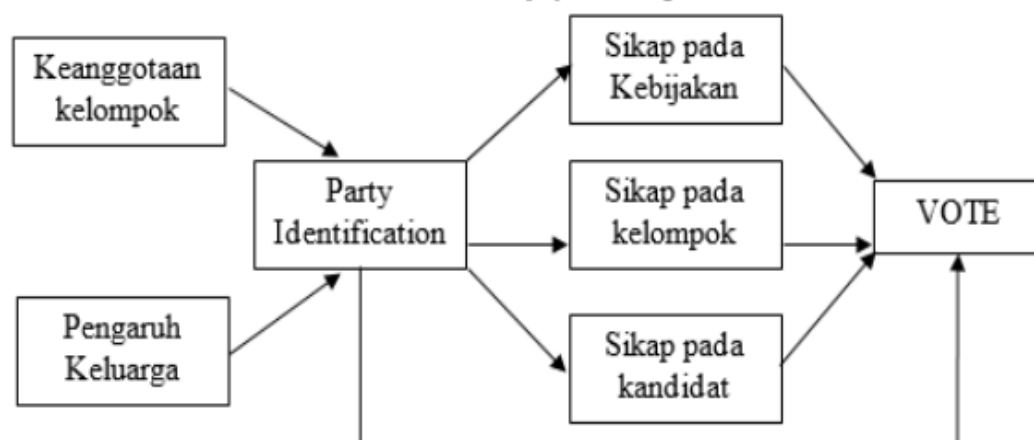
untuk memformulasikan sebuah perilaku memilih, konsep kunci yang terkait dengan identifikasi partai, dan elemen-elemen pokok yang mempengaruhi identifikasi dan afiliasi politik dari pemilih. Mereka menyajikan fondasi teoritik yang jelas terhadap teori dan model mereka. Model ini juga terbukti memiliki piranti metodologis yang revolusioner dimana mereka menggunakan survey sebagai alat untuk mengukur pilihan politik individu dan hubungannya dengan afiliasi sosial mereka (*social cleavages*). Mereka juga memberikan pelajaran yang cukup berarti pada para peneliti untuk mengamati data secara longitudinal yang melibatkan Pemilu lintas periode.

Sehingga, perilaku pemilih dapat diteliti dan dikonseptualisasi tidak hanya berdasarkan sebuah perilaku pada satu pemilihan umum saja, namun sebagai proses dinamis yang melibatkan pengalaman keterlibatan pemilih dalam berbagai pemilihan yang pernah mereka ikuti. Para peneliti Michigan ini melakukan studi yang menurut pengalaman politik individu pada masa kecil dan pada era pematangan individu hingga mereka memiliki pengalaman menggunakan hak pilih.

Berdasarkan model ini, pilihan politik individu digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:

Gambar 2.

Model Socio-psychological



Sumber: Harrop, M. *Elections and Voters: a Comparative Introduction*. Macmillan International Higher Education, 1987

C. Model Tindakan Rasional (*Rational Choice*)

Model ketiga dalam perilaku memilih disebut sebagai model pilihan rasional. Pilihan rasional ini meletakkan pilihan politik terhadap kandidat atau partai politik yang berkontestasi dalam pemilu pada individu. Dengan kata lain, perilaku pemilih adalah murni terletak pada faktor individu yang mempertimbangkan banyak faktor dan memilih faktor yang menguntungkan baginya.

Dalam khasanah ilmu politik kontemporer terdapat dua rujukan yang menjadi dasar dari berdirinya model pilihan rasional. Pertama adalah karya dari Down berjudul *an economic theory of democracy* yang dipublikasikan pada tahun 1957. Dan karya kedua adalah milik Olson berjudul *the logic of collective action* yang dipublikasikan pada tahun 1965.

Secara umum di dalam karya Down, pada setiap gelaran pemilihan demokratis terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu pihak pemberi *supply*, dalam hal ini partai politik pendukung kandidat atau tim sukses, dan juga pihak pemilih atau yang mengajukan *demand*.

Menurut ilmuwan politik lainnya yaitu Lipset dan Rokkan, model pilihan rasional ini memiliki konsekuensi positif dalam perkembangan ilmu politik, yang mungkin pada mulanya tidak memiliki intensi seperti itu. Teori pilihan rasional ini membawa ke permukaan pentingnya intensi dan motif setiap individu dalam masyarakat, dan telah memberikan tambahan dan penekanan pada pentingnya agensi dan juga untuk mengaplikasikan penjelasan seputar tindakan agensi dalam sebuah struktur politik.²

Secara definisi, menurut model ini, individu akan memaksimalkan peluang untuk memperoleh keuntungan atau kemanfaatan dari tindakan memilih, kemanfaatan itu berupa perbedaan dalam hal keuntungan yang diperoleh antara pilihan

² Lipset, S. M., & Rokkan, S. (Eds.). Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives (Vol. 7). Free press. 1967

yang diambil dan pilihan yang ditolak. Jelasnya, jika terdapat lebih dari satu pilihan, maka individu yang rasional akan mengambil keputusan yang akan menambah keuntungan atau kemanfaatan bagi dirinya. Berarti, dalam hal perolehan angka secara numerik, pilihan terhadap kandidat atau partai politik tertentu harus melebihi ongkos yang dikeluarkannya dalam proses sebelum menentukan pilihan.

Dalam penerapannya model ini mensyaratkan pemilih untuk memiliki 5 kriteria rasionalitas yang harus muncul, yaitu:

1. Individu mampu membuat keputusan ketika dihadirkan seperangkat alternatif pilihan;
2. Individu mampu melakukan pemeringkatan pilihan secara berurutan;
3. Pilihan peringkat bersifat lengkap (contohnya individu memilih alternatif 1 daripada alternatif 2, alternative 2 dibanding alternative 3, dst, dan konsekuensinya dia harus memilih lagi antara alternatif 1 atau alternatif 3);
4. Individu akan selalu memilih yang terbaik dari sekian alternatif;
5. Jika dihadirkan alternatif-alternatif pilihan dalam poin berbeda dalam satu waktu pada situasi yang sama, individu akan selalu membuat keputusan terbaik sebagaimana semula.

Kriteria-kriteria pemilih rasional tersebut mengasumsikan bahwa individu memiliki pikiran yang jelas tentang yang ia inginkan sebagai hasil atau outcome di masa mendatang.

Dengan motivasi yang jelas demikian, pertanyaan berikutnya yang harus dijelaskan adalah bagaimana pemilih memandang partai atau kandidat pada tiap gelaran pemilihan? Poin pertama yang tentunya penting adalah bahwa pemilih tidak hanya melihat performa partai politik semata namun performa dari pemerintahan dimana partai atau kandidat *incumbent* hingga periode menjelang pemilihan. Mereka mengkalkulasikan

apa yang pemerintah akan berikan dalam hal kemanfaatan jika mereka bertahan menjadi penguasa. Pilihan lainnya mereka akan melihat apa yang pihak oposisi tawarkan jika mereka berkuasa, dan apabila dimungkinkan menjadi alternatif kemanfaatan yang lebih baik. Pemilih, dalam kondisi yang sangat rasional, akan memilih peluang kemanfaatan yang lebih besar dari tiap kandidat atau partai.

Ada juga yang disebut dengan kondisi *ceteris paribus*, jika tidak ada kemanfaatan dari kedua kandidat, pemilih akan abstain dari memilih. Ketidakhadiran atau pilihan untuk golput ini bisa terjadi karena pemilih memiliki alasan. Pertama, basis dari pemilih rasional tidak ada lain selain kemanfaatan yang diperolehnya, dan juga tidak ada bias terhadap partai tertentu. Kedua, memilih bukanlah aktivitas yang bebas dari biaya. Keputusan untuk datang ke tempat pemungutan suara akan memakan biaya dan tentunya sedikit uang. Sehingga jika pemilih mempertimbangkan bahwa partai atau kandidat manapun yang menang tidak akan memberikan dampak apapun terhadap kepuasannya, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan biaya dan tenaga untuk memilih. Bahkan peluangnya juga dimungkinkan jika pemilih menganggap bahwa masing-masing pilihan akan menghasilkan tingkat kemanfaatan yang sama.

BAB III

METODE

A. ² Desain Penelitian

Desain penelitian ini menekankan pada penelitian kualitatif. Luaran penelitian ini adalah penjelasan tentang perilaku memilih pada masyarakat multikultural seperti kota Medan. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode studi kasus. Penelitian difokuskan pada *case* perilaku memilih masyarakat Kota Medan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Peneliti mencari data tentang empat hal. Pertama, perilaku pemilih berdasarkan pendekatan sosiologis. Kedua, perilaku pemilih berdasarkan pendekatan psikologis. Ketiga, bagaimana perilaku pemilih berdasarkan pendekatan pendekatan rational choice. Desain penelitian ini digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Gambar 3.
Kerangka Penelitian



Ubaid & Hidayaturrehman, 2020

B. Fokus Penelitian

³⁴ Fokus penelitian merupakan pembatasan masalah yang didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi masalah yang akan dipecahkan. Hal ini dilakukan untuk dapat mengarahkan penelitian agar lebih terarah, terperinci⁴ dan tidak menyimpang dari konsep awal yang telah dibuat. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah pada aspek faktor paling kuat yang mempengaruhi keputusan politik pemilih sehingga menjatuhkan pilihannya pada satu kandidat pada Pilwali Kota Medan tahun 2020. Aspek yang lainnya adalah pada tingkat keberagaman masyarakat Kota Medan yang terdiri dari berbagai etnisitas dan agama. Peneliti melakukan penelusuran data survei untuk mencari aspek perilaku pemilih paling menonjol dalam pilihan politik pemilih.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Medan Sumatera Utara dengan melibatkan mahasiswa ilmu Politik sebagai interviewer. Kota Medan akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada bulan September 2020.

Alasan penulis menentukan Kota Medan sebagai area Survey adalah bahwa masyarakat kota ini adalah masyarakat Multikultural. Selain itu daerah ini juga dapat diteliti dan memiliki aspek *observable* dengan tingkat kemudahan memperoleh data yang aksesibel.³ Aspek ini menekankan bahwa sebuah penelitian harus memiliki akses terhadap ketersediaan sumber data. Pada tahun 2020 ini masyarakat Medan akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada bulan September.

Peneliti terjun langsung ke lapangan pada bulan Juli dan Agustus 2020 untuk menggali data terkait perilaku politik masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan.

³ Johnson, J. B., Reynolds, H. T., & Mycoff, J. D. (2015). *Political science research methods*. Cq Press.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data sebaik-baiknya dan diolah serta dianalisa sesuai dengan kerangka metode penelitian. Sehingga dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Survey

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei perilaku politik masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada. Survei dapat digunakan untuk melihat perilaku pemilih dalam jumlah besar. Melalui data-data yang diperoleh dari survey yang dilakukan dengan menggunakan *Multistage Random Sampling*, penulis menyampaikan temuan data di lapangan dengan mengolahnya berdasarkan data statistik.

b. Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)

Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.⁴

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumentasi resmi.⁵ Dengan dokumentasi penulis bisa menganalisis data yang diperoleh dari penelitiannya, misalnya dalam bentuk tabel, daftar, dan sebagainya.

4 Soehartono, Irawan.2008. Metode Penelitian Sosial. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm 69

5 Ibid., hlm. 70.

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive. Adapun kriteria informan penelitian ini yaitu tokoh agama, pengamat sosial di kota Medan, penyelenggara pemilu, dan politisi Partai politik yang memahami proses pemilu di masyarakat multikultur kota Medan. Selain itu mereka juga bersedia untuk dimintai waktu dan pikirannya untuk terlibat dalam penelitian ini.

27

F. Sumber Data

Dalam penelitian ini disajikan dari berbagai macam sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder yang diantaranya yaitu:

2

- a. Data Primer merupakan data, fakta dan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan (lokasi penelitian) termasuk juga dari narasumber. Data primer diperoleh melalui data survei Perilaku Politik dan Sosial Masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga survei Poltracking Indonesia dan Akar Rumpot Strategic Consulting (ARSC). Selain itu data-data lain yang terkait dengan informasi mengenai perilaku memilih masyarakat Medan juga akan digali melalui wawancara;
- b. Data Sekunder, data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, artikel-artikel, serta informasi dari berita-berita dari media massa yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2

Baik data primer maupun sekunder merupakan data yang saling melengkapi untuk kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian perilaku memilih masyarakat Medan dalam Pilwali tahun 2020.

3

G. Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan analisis kualitatif, teknik analisis yang

digunakan peneliti berguna sebagai alat untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data yang didapat dari observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan responden dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perilaku memilih di Kota Medan.

a. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan atau pentransformasian data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Dengan kondensasi, data yang akan diperoleh jauh lebih akurat dari pada menggunakan reduksi data.

b. Display Data

Display data adalah rakitan organisasi informal yang memungkinkan kesimpulan dapat dilakukan yang meliputi gambar atau skema, jaringan kerja berkaitan dengan kegiatan kedalam tabel. Dengan demikian maksud peneliti melakukan display data bertujuan untuk menyajikan data yang berkaitan kedalam tabel sesuai dengan data yang diperoleh.⁶

c. Pengambilan Keputusan

Akhir dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pemahaman atau penuturan tentang apa yang berhasil kita mengerti berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti.⁷

6 Loc. Cit

7 Loc. Cit.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Medan merupakan kota dengan letak yang strategis karena dilalui oleh beberapa sungai yang semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai dalam Bahasa Medan disebut dengan istilah *Sei*, seperti Sei Deli, Sei Bubara, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera.⁸ Sei Deli dan Sei Bubara merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai. Terdapat pula Pelabuhan Belawan di jalur Selat Malaka yang cukup modern sebagai gerbang masuknya wisatawan dan perdagangan barang maupun jasa, baik domestik maupun internasional (ekspor-impor) yang kemudian menjadikan Kota Medan sebagai pintu gerbang Indonesia bagian Barat.⁹

Zaman dulu Kota Medan dikenal dengan sebutan Medan Tanah Deli dan keadaan tanahnya masih berawa-rawa. Tanah Deli juga merupakan awal mula perkampungan Medan yang dibuka oleh Guru Pantimus. Oleh karena itu saat masa penjajahan orang selalu menghubungkan Medan dengan Deli (Medan-Deli). Namun setelah masa kemerdekaan istilah Medan Deli lama kelamaan berangsur mulai memudar dan tidak lagi digunakan.¹⁰

8 Badan Pusat Statistik, "Kota Medan Dalam Angka 2020" (diolah dalam bentuk PDF) hlmn 40

9 Profil Kota Medan PUPR (diolah dalam bentuk PDF) hlmn 1

10 Badan Pusat Statistik, "Kota Medan Dalam Angka 2020" (diolah dalam bentuk PDF) hlmn 40

Pada Tahun 2004 ketika Kota Medan berusia 414 Tahun pada tanggal 1 Juli 2004, Kota Medan berkembang menjadi Kota Metropolitan. Pemerintahan Kota Medan berambisi untuk menjadikan Kota Medan menjadi kota besar seperti Jakarta dan Surabaya di Jawa, juga seperti kota besar di negara tetangga yaitu Penang dan Kuala Lumpur. Sebagai kota, Medan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat industri, pusat jasa pelayanan keuangan, pusat komunikasi, pusat akomodasi kepariwisataan, dan berbagai pusat perdagangan regional dan internasional.

Medan juga memiliki bandara internasional bernama Bandara Polonia yang lokasinya masih termasuk dalam wilayah dalam kota. Begitu pula dengan letak Pelabuhan Belawan yang jarak tempuhnya kurang dari satu jam jika lewat jalan bebas hambatan. Selain itu untuk Kawasan industri di Kota Medan juga masih berada di wilayah dalam kota. Hal ini menunjukkan bahwa seolah aspek-aspek penting tidak ingin diletakkan jauh dari pusat kota. Sehingga dengan keadaan demikian menjadikan Kota Medan semakin sumpek dengan bangunan-bangunan besar dan lalu lintas yang semakin semrawut karena semakin bertambahnya kendaraan bermotor.

Pada tahun 1997 di masa pemerintahan Walikota Bachtiar Djafar sebenarnya telah merencanakan pengembangan kota yang cukup bagus. Konsep itu disebut dengan istilah "Mebidang", yakni singkatan dari Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Konsep tersebut pada dasarnya mengacu pada antisipasi semakin berkurangnya daya dukung kota terhadap perkembangannya dan berkurangnya kemampuan kota menjalankan fungsinya secara maksimal. Medan akan dijadikan sebagai kota inti yang terbagi dalam lima wilayah pembangunan, sementara Kota Binjai dan beberapa kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang akan dikembangkan sebagai kota satelit.

Berdasarkan konsep yang direncanakan tersebut akan dibangun pusat pertumbuhan baru di daerah-daerah yang menjadi *hinterland* Medan. Namun dalam realisasinya,

pelaksanaan pembangunan justru semakin meminggirkan warga kota, sementara daerah pinggirannya tetap terbelakang. Konsep Mebidang pada akhirnya hanya sekedar konsep yang tidak terealisasi dengan baik.¹¹

Di masa sekarang Kota Medan merupakan salah satu bagian dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama Jakarta, Surabaya dan Makassar. Pesatnya pertumbuhan di Kota Medan membuat semakin banyaknya jumlah penduduk di Kota Medan. Menurut Pemerintah Kota Medan, program kependudukan Kota Medan sama seperti daerah lain di Indonesia yaitu meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan.

Komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat baik secara sosial maupun kultural. Menurunnya tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatnya perpindahan antar daerah dan urbanisasi akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan.¹²

Pada tahun 2019 penduduk Kota Medan berjumlah 2.279.894 jiwa, terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 15.749 jiwa (0,7%) dibandingkan dengan tahun 2018. Dengan luas wilayah 265,10 km² kepadatan penduduk 8.600 jiwa/km² yang terbagi atas 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan.¹³

Jumlah penduduk perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki. Selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah 29.360 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling banyak terletak di Kecamatan Medan Deli yang berjumlah 190.971 jiwa. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit berada di Kecamatan Medan Maimun sebanyak 41.149 jiwa.

11 Profil Kota Medan PUPR, hal. 2

12 Website pemko medan

13 Badan Pusat Statistik, "Kota Medan Dalam Angka 2020".

Penduduk Kota Medan memiliki beberapa ciri penting yang meliputi agama, etnis, dan keberagaman adat istiadat. Penghuni awal Kota Medan adalah orang asli Melayu dan Karo. Untuk mayoritas etnis masyarakat Medan didominasi oleh Suku Jawa, Suku Batak dan Suku Melayu. Kota Medan juga banyak keturunan India dan Tionghoa dan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki jumlah keturunan Tionghoa yang cukup banyak.

Medan adalah kota multi etnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, Mandailing, dan India.

B. Komposisi Perolehan Kursi DPRD Kota Medan

Atmosfir politik di Kota Medan hampir sama dengan atmosfir yang ada di kota-kota besar lain. Sebagai kota, yang didalamnya terdapat berbagai laju modernitas dan menjadi tumpuan aktivitas ekonomi dari berbagai lapisan masyarakat, Kota Medan juga menjadi medium kontestasi partai politik dalam memperebutkan kursi di legislatif.

Tabel 1.

Perolehan Kursi Partai di DPRD Kota Medan Periode 2019-2024

Partai Politik	Kursi
Gerindra	10
PDI-P	10
PKS	7
PAN	6
Golkar	4
NasDem	4
Demokrat	4
Hanura	2
PSI	2 (baru)
PPP	1

Sumber: KPU Kota Medan, 2019

Berdasarkan hasil pemilu legislatif 2019, DPRD Kota Medan terdiri dari 10 partai politik yang berhasil mendelegasikan kadernya di DPRD. Terbanyak adalah Partai Gerindra dan PDIP dengan perolehan masing-masing 10 kursi, disusul oleh PKS dengan 7 kursi, kemudian PAN 6 kursi, Partai Golkar, NasDem, dan Demokrat dengan masing-masing 4 kursi, Hanura dan PSI 2 kursi, dan terakhir PPP dengan 1 kursi.

Struktur pimpinan DPRD Kota Medan terdiri dari Ketua yang dipegang Hasyim dari PDIP, Wakil ketua 1 diisi oleh Ihwan Ritonga dari Partai Gerindra, Wakil Ketua II diisi oleh Rajuddin Sagala dari PKS, dan terakhir Wakil Ketua III dipegang oleh H.T. Bahrumisyah dari PAN.

DPRD Kota Medan terdiri dari 5 daerah pem¹¹ (Dapil), yakni Dapil Kota Medan 1 dengan 8 kursi yang terdiri dari Kecamatan Medan Barat, Medan Baru, Medan H³¹etia dan Medan Petisah. Dapil Kota Medan 2 dengan 12 kursi yang terdiri dari Kecamatan Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labu¹¹n, dan Medan Marelan. Dapil Kota Medan 3 dengan 8 kursi yang terdiri dari Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Tembur¹¹, dan Medan Timur. Dapil Kota Medan 4 dengan 10 kursi yang terdiri dari Kecamatan Medan Amplas, Medan Area, Medan⁴Denai, dan Medan Kota. Dapil Kota Medan 5 dengan 12 kursi yang terdiri dari Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal, dan Medan Tuntungan.

C. Narasi Politik Identitas di Indonesia

Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara ²²memiliki kepadatan penduduk dan keragaman etnis dan bahasa. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Dan setidaknya terdapat 300 kelompok etnis asli dan kurang lebih 700 bahasa daerah dengan berbagai dialek. Populasi muslim (penduduk dengan beragama Islam) merupakan penduduk mayoritas di Indonesia. Sehingga tidak heran jika Indonesia juga disebut dengan negara populasi muslim terbesar di Asia.

Keragaman etnis, bahasa, dan juga agama yang ada di Indonesia tak pelak juga dimanfaatkan oleh berbagai politisi untuk kepentingan elektoral. Narasi yang menggunakan sentimen etnis, kedaerahan, maupun agama kerap kali muncul dalam pemilihan nasional (pemilu) maupun pemilihan lokal yang kita kenal dengan pilkada (pemilihan kepala daerah). Fitri Ramdhani Harahap membuat premis yang mengantarkan pemahaman di ranah praksis. Menurutnya kemajemukan identitas yang dimiliki Indonesia mulai dari suku dan agama sangat terancam keharmonisannya akibat adanya politik identitas yang memiliki motif *disaster* (penghancuran) integritas nasional. Dalam paparan di samping dapat ditarik benang merah, bahwa identitas yang seharusnya berjalan natural akan meruncing ke arah konflik kepentingan manakala dikonversi menjadi alat merebut panggung politik.¹⁴

Semakin terbukanya sistem politik Indonesia, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan hak politiknya sesuai dengan modal sosial yang dimilikinya. Terlebih setelah 32 tahun dipaksa tiarap oleh kekuasaan Orde Baru (*new order regime*), banyak dari kelompok yang diikat oleh suatu identitas tertentu mulai bermunculan di awal-awal reformasi. Hal tersebut terlihat sepanjang dilaksanakannya perhelatan politik elektoral 1999. Sebanyak 148 partai mendaftarkan diri secara resmi. Dari jumlah tersebut, setelah dilakukan penyaringan yang cukup alot, diumumkan hanya 48 yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) demokratis 1999. Menurut catatan Andreas Ufen, partai-partai di awal 1999 menegaskan adanya representasi dari banyak kelompok yang memiliki identitas masing-masing, yakni kelompok profesional, kelompok suku/entitas, kelompok buruh, kelompok gender tertentu, kelompok lansia, kelompok agama, dan kelompok ideologi politik lainnya.¹⁵

14 Fitri Ramdhani Harahap, Politik Identitas Berbasis Agama. Prosiding Sosiologi Konflik dan Politik Identitas. Yogyakarta, 2014, hal: 803-804.

15 Andreas Ufen, Antara Politik Aliran dan Filipiniansasi, GIGA Essay No. 37, Hamburg, 2006, hal: 12

Fenomena tersebut membuktikan watak demokrasi sebagai *virtuous conceit* yang memiliki arti sebagai sistem pemilihan representatif dengan tingkat aktualisasi dan partisipasi publik mencapai angka yang cukup tinggi. Dari pemaknaan demokrasi di samping, konsekuensi logis yang pasti adalah kemunculan banyak kelompok politik yang merepresentasikan suatu komunitas tertentu, baik berdasar ikatan kesukuan, keagamaan, maupun ideologi.

Pada Pemilu 2009, pertumbuhan partai politik kembali terulang. Tetapi berbeda dari Pemilu 1999 yang dimaknai sebagai euforia pembebasan setelah terkekang otoritarianisme, Pemilu 2009 dinilai lebih bercorak pragmatis. Kemunculan model partai yang bertipe *match-all party* menjadi bukti menarik yang bisa dikemukakan. Partai model begini lebih mudah diidentifikasi sebagai pemandu semua unsur yang bisa mengantarkan pada pencapaian suara. Tetapi sebab ketiadaan basis massa yang kuat serta lebih dominannya partai seperti ini pada eksistensi figur atau program, menjadikan *match-all party* tidak bisa membuat batas identitas politik yang cukup kuat bertahan.¹⁶ Barulah pada Pilpres 2014 yang diikuti oleh berbagai pemilihan umum setelahnya, narasi politik identitas semakin kentara beroperasi di Indonesia.

D. Politik Identitas

Menurut Manuel Castells, identitas merupakan sumber makna kedirian yang didapatkan oleh individu setelah melakukan proses internalisasi nilai dari suatu kelompok tertentu. Oleh sebab adanya proses internalisasi, maka identitas memiliki motif yang berbeda-beda tergantung pada motif dan situasi yang sedang dialami oleh komunitas sosial tersebut. Castells melanjutkan, identitas ini dibagi menjadi tiga kategori yang antara satu dengan lainnya memiliki perbedaan orientasi. Pertama, *legitimate identity*, yakni identitas yang diberikan

¹⁶ Faishal Aminuddin dan Fajar Shodiq, *Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009*, *Jurnal Politik* Vo. 1 (01), Agustus, 2015, hal. 45

kepada individu supaya mampu memahami institusi serta perilaku masyarakatnya dengan target utama berupa dominasi sosial atas individu. Kedua, *resistance identity*, yakni identitas yang ditujukan untuk melakukan perlawanan kepada pihak yang distigma sebagai ancaman bagi identitas mereka. Orientasi identitas perlawanan tentu saja untuk mendapat legitimasi dan mempertegas eksistensi sosial suatu kelompok di antara kelompok lainnya. Ketiga, *project identity*, yakni identitas sosial baru yang dihasilkan oleh tindakan subjek sosial setelah mentransformasikan struktur sosial secara radikal.¹⁷

Dalam kajian ilmu sosial, identitas selalu dibentuk oleh dua hal prinsipil, yakni interaksi dan identifikasi. Hal tersebut tidak terbatas pada komunitas sosial saja, melainkan berlaku pada setiap komunitas di mana individu tersebut berpijak, seperti komunitas politik. Dari interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya di dalam suatu komunitas politik, terbentuklah proses identifikasi yang berjalan secara natural. Identifikasi demikian akan mendorong setiap individu menemukan aspek pribadi yang terhubung dengan aspek sosialnya dalam konteks kebudayaan, sosial, institusi, dan ideologi.¹⁸ Dengan demikian di arena politik, faktor seperti kesukuan, keagamaan, jenis kelamin, ideologi yang diusung, dan kewarganegaraan selalu menjadi hal-hal prinsipil yang melekat di dalam setiap subjek politik. Persoalannya menjadi pelik saat sesuatu yang berbau identitas tersebut dikapitalisasi oleh aktor politik untuk dijadikan komoditas dalam usaha meraih kekuasaan (*power*) dan legitimasi (*legitimacy*).¹⁹

Selanjutnya untuk mempermudah dalam memahami fleksibilitas identitas, Pierre Van Den Bergh membuat tiga

17 Manuel Castells, *The Power of Identity: The Information Age, Economy, Society, and Cultural*, cet. ke-2, Blackwell Publishing, Australia, 2003, hal: 7-8

18 Andrew Heywood. *Political ideologies: An introduction*. Macmillan International Higher Education, 2017, hal. 191

19 Idris Hemay dan Aris Munandar, Politik Identitas dan Pencitraan kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih, Jurnal POLITIK Vol. 12 (01), Universitas Nasional: Jakarta, 2016. Hal. 1740

klasifikasi pemaknaan, yaitu primordialisme, konstruktivisme dan instrumentalisme.²⁰ Pendekatan primordialisme memandang bahwa identitas merupakan sesuatu yang 'given', sehingga setiap orang tidak bisa menampik suatu identitas yang melekat pada dirinya. Identitas bagi penganut primordialisme ditempatkan secara sosio-biologis, bahwa identitas pada diri individu dapat dijadikan sebagai bahan perekat suatu komunitas sosial. Ciri utama yang terdapat pada pandangan ini adalah identitas selalu dipandang ajeg dan tidak bisa diotak-atik, melainkan hanya bisa diterima oleh individu dan kelompok. Anggapan tersebut dibantah oleh pendekatan kedua, yakni konstruktivisme. Menurut penganutnya, identitas merupakan hal yang selalu berkembang sesuai dengan zaman dan tempat yang sedang dialaminya. Individu akan selalu memiliki identitas yang dinamis sebab adanya persinggungan dan pertukaran simbol antar pemilik identitas yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena perpindahan pandangan individu terhadap agama dan aliran kepercayaan yang dianutnya seiring luasnya spektrum pergaulan. Selain itu faktor migrasi juga dapat dijadikan penguat dari pendapat para penganut konstruktivisme.

Meski demikian, corak yang normatif dari kedua pendekatan yang sudah disampaikan tersebut masih belum bisa menjawab persoalan yang ditimbulkan berupa konflik antar identitas. Maka muncul pendekatan ketiga, yakni instrumentalisme yang memandang identitas menurut situasi kompetisi dan pertarungan kuasa. Sehingga hal demikian menjadikan proses manipulasi dan mobilisasi politik sebagai dinamika yang tidak bisa dilepaskan dalam analisis terhadapnya. Saat kelompok sosial yang memegang identitas tertentu bersinggungan dengan pemilik identitas lain dalam suatu aktivitas politik, maka identitas masing-masing dari mereka akan dipertebal dan dipertegas lewat bahasa politik yang mampu memanipulasi

20 Endang Sari, *Kebangkitan Politik Identitas Islam pada Arena Pemilihan Gubernur J - karta*, Jurnal Kritis vol. 02 (02), Universitas Hasanuddin, Makassar: 2016, hal :148-150

kesadaran rasional massa untuk bersedia menjadi pendukung identitas yang diusung oleh aktor elite tersebut.

Hal yang perlu dipahami secara konseptual dalam pembahasan ini yakni perbedaan mendasar antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*) sebagai suatu strategi politik. Muhtar Haboddin (2012) menjelaskan, bahwa identitas politik lebih dimaknai sebagai suatu konstruksi yang sangat jelas dan berguna sebagai penentu posisi kepentingan aktor politik di dalam ikatan suatu komunitas politik. Sedangkan politik identitas lebih merupakan mekanisme atau strategi politik yang menggunakan identitas sebagai sumber, modal, dan sarana politik. Secara praktis dapat dipahami, identitas politik lebih menonjolkan sisi eksistensi kelompok, sedangkan politik identitas banyak dijalankan oleh suatu bentuk pengorganisasian identitas tertentu.²¹

Dari paparan beberapa literatur di atas, dapat dipermudah penjelasan mengenai politik identitas (*politics of identity*) sebagai tindakan politik di mana orang terlibat saat mereka memobilisasi atas dasar, dan ketika mereka mendefinisikan pengalaman mereka, masalah politik mereka, dan tujuan mereka dalam hal kebaikan identitas-kelompok.²² Jika merujuk pada pengertian Relay dan Watson tersebut maka sebenarnya politik identitas adalah hal yang lumrah dan cenderung positif, mengingat identitas disini bekerja sebagai panduan moral kelompok untuk menentukan sikap politik atas tindakan eksploitasi dan ketidakadilan yang mereka rasakan. Namun pengalaman yang berlangsung di Barat terutama di Amerika ternyata tidak sama dengan yang berlangsung di Indonesia. Sebagaimana diutarakan oleh Musdah Mulia, praktik politik identitas yang berlangsung di Indonesia justru dilakukan oleh kelompok *mainstream*, yaitu kelompok agama mayoritas, dengan niat "menyingkirkan" kaum

21 Muhtar Haboddin. Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 03 (1), UMY Yogyakarta, 2012, Hal. 119-120.

22 Clarissa Rile Hayward and Ron Watson, Identity and Political Theory, 33 WASH. U. J. L. & POLY 9 (2010), https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol33/iss1/0033

minoritas yang dianggap "menyimpang" atau "menyeleweng".²³

Dalam catatan Zahrotun Niam, setidaknya terdapat tiga pola operasionalisasi dalam politik identitas. Pertama, pergeseran kekuasaan yang sentralistik ke arah desentralisasi menciptakan kesempatan politik bagi kepala daerah untuk memunculkan sentimen kedaerahan. Sehingga politik identitas juga berlangsung dalam pemerintahan daerah. Kedua, agama menjadi lahan beroperasinya politik identitas, baik itu dilakukan oleh kelompok agama mayoritas maupun sebaliknya oleh kelompok minoritas. Ketiga, politik identitas pada ranah hukum.²⁴

Kaitannya dengan politik elektoral, politik identitas kerap kali muncul sebagai strategi untuk mengikat sentimen kelompok demi mendapat keuntungan tertentu, misalnya membuat stigma buruk terhadap kelompok lain, sekaligus stigma positif terhadap kelompok sendiri.²⁵ Itu sebabnya masing-masing kontestan dalam berbagai momentum pemilihan menciptakan narasi-narasi identitas, misalnya "putra daerah" "calon yang Islami" "mewakili kepentingan kelompok Islam" "bukan putra daerah" "orang luar" dan sebagainya. Narasi identitas ini tidak lain untuk memberikan garis yang tegas sebagai pembeda sekaligus untuk menentukan siapa yang ditolak dan siapa yang diterima.²⁶

Tentu saja dilihat dari sejauh mana kategori identitas mampu mencengkeram kesadaran massa, peneliti bersepakat dengan anggapan Ufen yang menangkap adanya konsistensi kesetiaan dan perilaku dalam memilih kandidat berdasarkan pada afiliasi suku atau agama. Hal tersebut dapat dilihat dari penemuan King yang telah berhasil menunjukkan kontinuitas pada hasil pemilu,

23 Siti Musdah Mulia (2010) "Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia" dalam Ahmad Syafii Maarif, (2012) *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta: Democracy Project

24 Zahrotun Naimah, Z. (2018). Pola Operasionalisasi Politik Identitas di Indonesia. *AD - LAH*, 2(11).

25 Ramadhan, F. S., & Masykuri, R. (2018). Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 249-265.

26 Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1).

mulai 1955 sampai 1999, terkait dukungan fundamental pada kedua hal tersebut, terutama agama. Pandangan agak skeptis ditunjukkan oleh William Liddle dan Saiful Mujani yang masih ragu menyebut kepastian para aktor memainkan *rule* politik identitas. Meski demikian, Liddle dan Mujani tetap bersepakat bahwa narasi yang mengarah pada politik identitas masih patut ditelisik, walaupun untuk mengidentifikasinya tidaklah mudah, sebab relasi yang dimainkan oleh aktor sangat kompleks.²⁷ Di sinilah kejelian analisis menjadi modal penting bagi peneliti dalam mengidentifikasi setiap perhelatan ‘pesta demokrasi’ yang penuh dengan narasi berbau agama atau suku.

Dalam rangka memperjelas bagaimana narasi politik identitas itu muncul dalam politik elektoral, maka akan dilakukan ulasan pada pemilihan terakhir yang di dalamnya terdapat penggunaan sentimen identitas, yakni Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 dan Pemilihan Presiden 2019. Pada kasus Sumatera Utara hal ini diulas karena masih memiliki keterkaitan dengan Kota Medan yang merupakan ibu kota Sumatera Utara, sedangkan pada kasus Pilpres 2019 untuk menyoroti pada skala nasional, di mana kota Medan secara khusus dan Sumatera secara umum menjadi perebutan suara para kandidat Pilpres 2019.

E. Pengalaman Pilgub Sumatera Utara 2018

Narasi politik identitas dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (selanjutnya disebut Pilgub Sumut) sudah tampak sejak dari proses kandidasi calon. Suara-suara tentang “putra daerah” sudah bermunculan jauh sebelum KPU Sumut menetapkan pasangan calon. Narasi identitas ke daerah ini memang tidak hanya berlangsung di Sumut, karena gejala ini tampak di berbagai daerah di setiap pemilihan. Hasil studi Fox dan Menchik menunjukkan dalam pemilihan di Indonesia sejak tahun 2009-2011 menunjukkan bahwa poster kampanye 65 persen menggunakan atribut lambang suku, 40 persen memuat sedikitnya satu lambang partai, 23 persen berisi simbol etnis dan

27 Andreas Ufen, Antara Politik Aliran... hal: 17

partai dan 17 persen tidak mengandung simbol partai maupun etnis.²⁸ Dari sini kita bisa melihat bahwa penggunaan simbol etnis dan kedaerahan sudah menyebar ke berbagai lapisan pemilihan, apalagi dalam konteks politik lokal seperti pemilihan gubernur yang merepresentasikan pemimpin daerah.

Dalam konteks Pilgub Sumut 2018, pasangan kandidat yang berkompetisi terdiri dari Edy Rahmayadi- Musa Rajekshah melawan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Komposisi partai politik pengusung dan pendukung sebagai berikut:

Tabel 2.

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera 2018

Pasangan Calon	Partai Pengusung	Partai Pendukung
Edy Rahmayadi- Musa Rajekshah	Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, NasDem, PAN.	Perindo, PBB, Garuda, Demokrat, PKB
Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus	PDI-P, PPP	PKPI, PSI

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pada Pilgub Sumut 2018 partisipasi pemilih sekitar 61,78 persen dengan raihan suara masing-masing kandidat yakni Edy-Musa memperoleh suara 3.291.137 (57,58%) dan Djarot-Sitorus memperoleh 2.424.960 (42,42%).²⁹ Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemilihan tersebut pasangan Edy-Musa keluar sebagai pemenang dan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2018-2023.

Berbagai kalangan menyebutkan bahwa kemenangan Edy-Musa tidak lepas dari adanya penggunaan identitas yang massif.

28 Fox, C., & Menchik, J. (2011). The Politics of Identity in Indonesia: Results from Campaign Advertisements. In *APSA 2011 Annual Meeting Paper*.

29 Keputusan KPU Sumatera 15a tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018

Dilansir dari laman media *BBC News* Indonesia, beberapa kejanggalan sudah terasa menjelang proses pemungutan suara, seperti jumlah pemilih tambahan yang mendadak melambung tinggi, 'pocong' gentayangan yang menyerukan anti golput, spanduk provokatif berbunyi larangan memilih pemimpin kafir, dan juga seruan untuk memilih pemimpin asli Medan.³⁰ Berbeda dengan Pilgub DKI Jakarta antara Ahok vis a vis Anies yang lebih kental *blow up* identitas berbau keagamaan, di Pilgub Sumut narasi identitas berbau agama dan kesukuan muncul secara berbarengan.

Fakta di atas setidaknya memberi dua hal yang mendukung asumsi keterlibatan identitas di ruang politik lokal. *Pertama*, politik identitas berbasis kesukuan merupakan konsekuensi logis dari keterbukaan sistem politik demokrasi lewat instrumen pemilihan kepala daerah. Premis ini diperkuat oleh catatan M. Ridha (2017) dalam tulisannya yang dimuat pada Jurnal Bawaslu yang menyebut politik identitas terbentuk dan menyeruak sebagai wujud dari adanya interaksi tumpang tindih antara nilai-nilai *mainstream* demokrasi dengan nilai-nilai lokal yang sudah terinfiltrasi secara sistemik. Di satu sisi, antar kedua nilai tersebut mencapai tingkat konvergensi yang harmonis, seperti otonomi daerah. Tetapi di sisi lain, seperti yang ditulis oleh Donald L. Horowitz, di negara demokrasi yang memiliki banyak etnis dengan gelagat relasi yang kurang baik, identitas etnis akan menjadi garis pembatas konkrit untuk menentukan *who will be included* dan *who will be excluded*; siapa yang akan bergabung dan siapa yang tidak.³¹

Berpijak pada perspektif instrumentalisme dalam memotret fenomena politik identitas di ranah lokal, kejadian yang mengiringi Pilgub Sumut jelas merupakan pengorganisasian identitas etnik yang digunakan, dimanipulasi, dan dieksploitasi

30 BBC.Com, Politik identitas ramai di Pilgub Sumatera Utara, isu korupsi jadi terabaikan? <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44601789> Diakses 5 Agustus 2020

31 M. Ridha TR. Pemilu dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis. Jurnal Bawaslu Vol. 3 (2). 269-284

oleh para elite lokal dan pusat untuk mendapatkan suara pemilih yang memiliki kecenderungan etnik sangat kuat. Sebagaimana yang dicatat oleh Ramlah Surbakti, politik identitas etnik di Sumut mendapat momentumnya terutama didukung oleh kondisi sosial yang menonjolkan identitas tersebut mulai dari generasi lama sampai generasi sekarang.³² Dampak yang ditimbulkan sudah barang tentu manipulasi etnisitas tersebut tidak akan memberi ruang lebih besar kepada pesaing yang berlatar belakang 'bukan anak asli Sumut'.

Oleh Ryaas Rasyid fenomena tersebut bukanlah hal baru, Ia mengatakan:

“... kecenderungan beberapa daerah untuk mengutamakan putra daerahnya dalam proses rekrutmen untuk jabatan-jabatan pemerintahan ini adalah gejala yang sudah mulai tumbuh sejak awal 1990-an, walaupun pada masa itu perhatian masyarakat di daerah lebih banyak terfokus kepada figur calon kepala daerah (gubernur, bupati, walikota). Jakarta sendiri, keinginan masyarakat Betawi untuk memperoleh gubernur dari kalangan mereka sendiri sudah sejak lama. Hal yang serupa juga melatarbelakangi pergantian gubernur Bengkulu, Jambi, Sulawesi Tengah, Irian Jaya, Maluku dan Riau, untuk menyebut beberapa kasus, dari figur yang sebelumnya bukan kalangan 'putra daerah' ke figur baru yang putra daerah.”³³

Di Sumatera Utara, penelidikan yang dilakukan oleh *BBC News* tampaknya memberi *framework* yang tepat untuk membuktikan bagaimana isu etnisitas ini memiliki daya tarik, baik pro maupun kontra, bagi masyarakat Sumatera Utara. Seorang warga Medan bernama Ishak Nasution secara terang-terangan dan natural menyatakan pandangannya sebagai berikut, “Kita mau milih

32 Ramlan Surbakti, *Kelompok Etnik, Desentralisasi, dan Politik Lokal di Sumatera Utara* dalam Erond L. Damanik, *Politik Lokal: Dinamika Etnisitas pada era Desentralisasi di Sumatera Utara*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Simetri Institute, 2018.

33 Muhtar Haboddin, *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*, *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol. 03 (01). 116-134

dia pun, dia bukan orang Sumatera. Sementara kan banyak calon-calon yang orang Sumatera asli, kenapa nggak dicalonkan orang Sumatera asli. Makanya Edy yang difavoritkan orang.” Ishak kemudian melanjutkan bahwa memang kecenderungan mempertentangkan antara putra daerah dan pendatang sudah menjadi realitas masyarakat Sumatera Utara yang disetujui secara turun temurun.

Meski sistem keyakinan etnisitas ini seakan natural, tetapi di dalam arena politik semua hal natural bisa diorganisasikan sebagai modal elite yang bersaing lewat strategi manipulatif seakan tensi yang dipertaruhkan sangatlah darurat. Asumsi demikian terlihat lewat pengakuan yang diberikan oleh Ketua Tim Pemenangan Relawan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah bernama Ahwan Asmadi yang menganggap kewajaran adanya strategi putra daerah vis a vis pendatang tersebut seperti berikut, “Masyarakat Sumatera Utara kan tidak bodoh. Apakah harus dikirim dari luar sana sementara di Sumatera Utara sendiri banyak orang hebat. Ini menjadi salah satu strategi kita.”³⁴

Selain adanya manipulasi tersebut, faktor ekonomi juga turut dimainkan oleh timses. Sebagaimana Ahwan Asmadi memberikan justifikasi rasional yang pada dasarnya juga menjadi bagian dari strategi manipulasi, bahwa pengalaman empirik yang dialami oleh masyarakat Sumut semasa dipimpin oleh gubernur yang tidak berasal dari putra daerah selalu memberi hasil akhir yang tidak mengenakkan di sektor ekonomi. Pemimpin yang memiliki keterkaitan ke daerah di luar Sumut tampaknya dinilai eksploitatif, dalam artian mengeruk ekonomi daerah Sumut untuk dialihkan ke daerah asalnya sendiri. Meski asumsi Ahman lebih ditopang oleh kecenderungan emosional, tetapi setidaknya hal tersebut memberi pemahaman tentang faktor kesejahteraan sebagai salah satu motor penyebab identitas etnik menguap di dalam arena politik elektoral.

34 BBC.Com, Politik identitas ramai di Pilgub Sumatera Utara, isu korupsi jadi terabaikan? <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44601789> Diakses 5 Agustus 2020

Tampaknya hal ini membuktikan tesis Van Klinken yang melakukan penelitian di Bengkulu dan Jambi. Bersama dengan Hidayat, Van Klinken menyusuri sejauh mana relasi antara kepentingan predator elite dan sistem demokrasi elektoral berjalan. Hasilnya menunjukkan bahwa demokrasi yang sekarang selalu diwarnai dengan persekongkolan (*allegations*) yang secara otomatis membuka kesempatan untuk melakukan pengerukan sumber daya sebagai konsekuensi dari kebutuhan finansial atau ekonomis.³⁵

Sebagaimana Damanik mencatat, politik identitas di tataran pemilu lokal yang sarat akan nuansa perebutan ekonomi selalu memperlihatkan motif 'kolaborasi ekonomi' atau 'merebut faktor ekonomi' untuk semata kepentingan aktor, baik individu maupun kolektivitas oligarkis.³⁶ Dengan begitu, para kompetitor pilkada lebih fokus melihat proses demokrasi prosedural ini sebagai sarana menguasai faktor-faktor produksi daerah yang terdapat dalam APBD atau sumber lainnya. Dampak yang ditimbulkannya tentu saja pengorganisasian secara massif semua komoditas isu yang bisa dijual untuk mencapai kemenangan dalam pilkada sesuai dengan segmentasi pemilih yang ada. Sebab pilkada ini menjadi momentum sakral dan tunggal untuk melanggengkan motif ekonomis tersebut, maka strategi yang dipilih haruslah efektif untuk memunculkan partisipasi politik yang terarah ke kandidat tertentu, terutama strategi identitas yang memang memiliki kekuatan solidaritas primordial yang kuat. Menariknya di Sumatera Utara, ternyata realita masyarakat di sana menganggap hasil pemilihan kepala daerah tidak lebih dari representasi simbol narasi identitas, baik berupa etnik ataupun agama, seperti yang terjadi di wilayah etnik Pakpak.

Berangkat dari premis Klinken dan Hidayat di atas berarti dalam kasus seperti yang disampaikan oleh Ahman terlihat sekali anggapan yang sama terhadap proses berjalannya faktor

35 Desi Rahmawati. DEMOKRASI DALAM GENGAMAN PARA PEMBURU RENTE (STUDI KASUS ASAHAN SUMATERA UTARA). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* vol. 1 (02), September 2015. 86-102

36 Damanik, *Politik Lokal...*, hal. 39.

kepentingan finansial selama kepemimpinan para gubernur sebelum-sebelumnya. Hanya saja Asman bersama timses yang lain melakukan *blow up* kekecewaan ini melalui narasi identitas supaya lebih berdampak nyata pada pemenangan putra daerah. Pragmatisme isu etnisitas tersebut nyatanya benar-benar terbukti efektif dalam menunjang suara Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) dalam Pilgub Sumut 2018 sebagai representasi dari dua pasangan berdarah asli Sumatera Utara. Tentu saja sesuai pernyataan bahwa politik identitas mendapat sokongan energi motorik dari faktor persepsi masyarakat tentang kedaerahannya, ditambah dengan isu penguasaan ekonomi mulai dipertebal oleh kandidat putra daerah, maka tidak mengherankan apabila pasangan Eramas memenangkan hampir semua daerah yang penduduknya memiliki persinggungan panjang dengan ekonomi, politik, dan etnisitas.

Bukti yang paling bisa dihadirkan di sini adalah penelitian yang dilakukan oleh Desi Rahmawati di salah satu kabupaten bergelimang sumber daya penunjang ekonomi Sumatera Utara, yakni Asahan. Desi mengatakan bahwa Asahan merupakan wilayah yang dibentuk dari motif ekonomi yang dimanifestasikan dalam bentuk politik pemerintahan. Bahkan sejak era kolonial, Asahan selalu dihadapkan dengan proses panjang permainan kapital ekonomi yang dilakukan oleh aktor politik. Alih-alih merombak kebiasaan lama yang mengakibatkan anomali demokrasi di tataran lokal, justru aktor politik sampai era sekarang makin menerima begitu saja kapital ekonomi dan status sebagai alat sekaligus motivasi politik yang paling penting.³⁷ Hal tersebut berdampak pada mudah diprovokasinya mereka oleh isu-isu yang berbau ekonomis, meskipun nyatanya disampaikan lewat narasi 'pertarungan etnisitas'. Hasilnya, Eramas mengantongi suara tinggi di Kabupaten Asahan sebesar 224.950 suara, jauh meninggalkan pesaingnya yang hanya mengantongi 74.333 suara.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Merdeka.com, "Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah kuasai Pantai Timur Sumut dan T - bagsel" <https://www.merdeka.com/politik/edy-rahmayadi-musa-rajekshah-kuasai->

Kendati efektivitas penggunaan isu-isu etnik memiliki implikasi menguntungkan bagi calon yang asli 'Putra Daerah', tetapi justru bagi massa pemilih implikasi tersebut tidak akan dirasakan dalam bentuk program kerja setelah pagelaran pilgub. Hal tersebut disebabkan kepuasan etnik hanya berangkat dari aspek sosiologis, sedangkan dalam sistem demokrasi aspek rasional sangat diperlukan apabila hasil pemilihan elektoral berdampak programatik. Demokrasi yang tersegmentasi pada aras etnisitas tersebut pada akhirnya menurunkan kualitas di balik tujuan yang diusung oleh demokrasi sendiri, yakni kebaikan bersama. Tentu saja saat etnisitas lebih menebal dibanding rasionalitas 'program milik kandidat', maka aspek egaliter akan abstain di dalam pemilihan elektoral.

Politik identitas bersegmentasi etnisitas dengan demikian sangat bergantung pada bagaimana para pemilih memandang penting atau tidaknya sisi kedaerahan sebagai syarat mutlak dalam kepemimpinan daerah. Hal tersebut dikarenakan dalam politik elektoral yang syarat akan strategi mobilisasi konstituen, isu identitas merupakan hal yang paling melibatkan sisi emosional seseorang.³⁹ Sayangnya di negara Indonesia yang masih menempuh demokratisasi di tataran lokal, sisi emosional sebagai unsur sosiologis dan psikologis menjadi hal yang dominan dibanding sisi-sisi rasional, seperti program kandidat.

Oleh karenanya tidak dapat dimungkiri, kekalahan Djarot Saiful Hidayat lebih disebabkan ia terhimpit faktor emosional kedaerahan ini. Sebab apabila diadakan secara program, Djarot yang memiliki prestasi di lapangan birokrasi sepanjang memimpin Blitar dan DKI Jakarta digadang-gadang lebih unggul daripada pesaingnya. Nordholt menulis pernyataan tentang kekuatan etnisitas sebagai berikut:

[pantai-timur-sumut-dan-tabagsel.html](#) Diakses 6 Agustus 2020

39 Jumadi. Fenomena Etnis Dalam Proses Rekrutmen Elit Politik Lokal: Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Kalbar 2000-2005. Tesis UGM Yogyakarta, 2003.

“Etnisitas dapat dipahami sebagai ideologi perjuangan politik. Namun etnisitas ternyata lebih dari sekadar ideologi. Etnisitas memberi perasaan yang sangat mendalam. Sekelumit sejarah mungkin bisa membantu menjelaskan... sama seperti nasionalisme, wacana yang berlandaskan etnisitas membuat orang membayangkan ikatan yang penuh kesetiaan sehingga menyerupai ikatan kekeluargaan yang dipenuhi emosi. Dengan begitu, orang diyakinkan untuk mempertaruhkan jiwanya dan membersihkan tanah mereka dari musuh-musuh yang jahat.”⁴⁰

Meski dalam Pilgub Sumatera Utara Paslon Eramas terlihat menampilkan citra identitas etnis yang massif, tetapi tidak berarti paslon Djarot dan Sihar Sitorus (Djoss) yang menjadi pesaingnya nihil dari aktivitas politik identitas berbasis etnis. Hal tersebut tentu saja berangkat dari sistem kerja pemilihan elektoral, baik *executive election* atau *legislative election*, yang menyediakan arena pertarungan terbuka dengan menggunakan strategi apapun, seperti yang ditunjukkan pada Pemilu 1955 lewat penggunaan ‘aliran’ sebagai strategi para aktor, dalam mempertahankan klaim politik oleh kandidat tertentu dan menampik isu yang ditujukan oleh lawan politiknya. Maka dengan demikian, saat Paslon Eramas menggunakan identitas ‘putra daerah’ sebagai modal serangan kepada Djoss, tentu apa yang dilakukan oleh Djoss adalah menggunakan pola yang sama sebagai ‘putra luar daerah’ yang peduli terhadap Sumatera Utara. Djoss secara sistematis meladeni serangan Eramas lewat pergerakan di wilayah yang kebanyakan didiami oleh penduduk Sumatera Utara bersuku Jawa. Di samping itu, sosok Sihar Sitorus sebagai wakil Djarot juga memainkan peran yang sangat signifikan dengan mengklaim sebagai representasi nyata dari suku Batak. Tentu saja saat digabungkan, keduanya memiliki

40 Erond L. Damanik, *Politik Lokal...*hal. 55

prosentase pemilih yang sangat tinggi, yakni sebesar 74%.⁴¹

Selanjutnya lewat komunitas yang dibentuknya bernama Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Sumatera Utara (GMPP), paslon Djoss lebih banyak melakukan penampikan atas permainan politik identitas yang dibuat oleh timses Eramas daripada membuat narasi etnisitas baru, kecuali saat GMPP membuat spanduk sindiran²⁴ yang ditujukan kepada Ustadz Abdul Somad (UAS) berbunyi "Tolak kehadiran masyarakat luar Sumut Ustadz Abdul Somad & Ustadz Bachtiar Nasir mencampuri Pilgub 2018 di Sumut". Lebih dari itu, Djoss cenderung memberi statement edukatif yang menonjolkan sisi program pemerintahan untuk menganulir semua tuduhan etnisitas terhadapnya. Bahkan secara terang-terangan, Djarrat melempar pernyataan, bahwa dirinya hadir di Sumut semata untuk memberi perubahan struktur kehidupan ke arah yang lebih egaliter dan demokratis dengan bermodalkan kapabilitas yang dimilikinya lewat program bertajuk SUMUT (Semua Urusan MUDah dan Transparan).⁴²

Namun tidak dapat dimungkiri, kompleksitas Pilgub Sumut tidak hanya bergerak pada tataran etnis belaka, melainkan juga agama menjadi faktor yang justru sangat dominan. Seperti paparan dari Damanik yang menegaskan, bahwa "*Di Indonesia yang plurall and multiculture society, politik aliran cenderung terjadi pada politisasi agama (religion politicization) yang menunjuk pada kebangkitan agama (religious resurgence) sebagai kekuatan politik daripada etnik.*"⁴³ Hal tersebut, barangkali menjadi batu ganjalan terbesar yang membuat matematika politik Djoss tidak berhasil menggeser dominasi permainan identitas rivalnya.

41 Rizky Renald dan Nur Hidayat Sardini, Politisasi Identitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2019, Universitas Diponegoro, Semarang.

42 *Ibid.*

43 Erond L. Damanik, *Politik Lokal...* hal. 47.

Tabel 3.

Karakter etnisitas dalam perpolitikan di Sumatera Utara⁴⁴

Karakter etnisitas	Uraian
Etnisitas memiliki relasi antara arena dan tidak dikotomis	Etnisitas adalah suatu yang maha dahsyat dan manipulatif. Etnisitas melampaui batasan ruang politik, sosial dan ekonomi. Pada masing-masing arena, etnisitas dapat menyatu dengan tujuan-tujuan politis.
Etnisitas adalah nyata dan kuasa yang dihasilkannya sangat tergantung pada subjek atau kelompok.	Daya eksploitatif etnisitas, baik positif (integrasi dan harmoni) maupun negatif (disintegrasi dan disharmoni) ditentukan aktor/subjek yang mengonstruksinya. Aktor yang menggunakan etnisitas sebagai basis tindakan dan perilaku politik sesuai kepentingannya akan mempengaruhi pola-pola relasi antar etnis.
Etnisitas sangat terkait dengan dimensi sejarah pergulatan etnik	Etnisitas melahirkan dan sekaligus meneguhkan isu 'lokal melawan pendatang', atau 'putra daerah asli melawan pendatang'. Lewat dimensi sejarah ini, etnisitas dapat eksplosif bernuansa kekerasan. Etnisitas sebagai instrumen politik memunculkan bias-bias sosial yang sangat tergantung pada pengkonstruksian aktor/elite/pelaku atau subjek.

Kedua, Hagen menyebut bahwa Pilgub Sumatera Utara sangat mencerminkan politik identitas, terutama berkaitan dengan agama. Simbol-simbol, seruan, dan intimidasi yang dilakukan oleh aktor politik dengan menekankan aspek keagamaan yang disebarkan sedemikian rupa guna mengklaim mimbar dominasi satu paslon dan mengkerdilkan paslon lainnya.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 326-327

Dengan demikian, faktor politik identitas melalui pembentukan narasi keagamaan memainkan peran paling signifikan. Bahkan eskalasi konflik yang dihasilkan oleh politisasi bernuansa agama di Sumatera Utara jauh lebih tebal dibanding dengan etnisitas. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan skema perbandingan jumlah suara yang diperoleh kedua paslon. Apabila ditelisik lebih dalam, seharusnya paslon Djoss lebih diuntungkan karena memiliki dua basis kesukuan yang menjadi penduduk mayoritas di Sumut. Tetapi fakta yang terjadi justru Djoss kalah telak oleh paslon Eramus di beberapa wilayah basis yang ternyata dihuni oleh penduduk etnis lokal.

Padahal sesuai demografi Sumatera Utara, Djoss jelas menguasai 50 persen lebih penduduk yang mayoritas memang beretnis Jawa dan Batak. Sedangkan Eramus tentu lemah di dalam hal kesukuan ini, karena status keduanya hanya dianggap representasi pendatang dari Melayu dan Pakistan. Namun begitu, disinilah letak politisasi agama lebih dominan bermain di balik kemenangan Eramus. Secara realistis berdasar peta kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, Eramus melihat celah di sektor agama untuk menghadapi rivalnya. Maka kemudian dipilihlah sentimen terhadap identitas keagamaan yang disandang oleh calon gubernur Djarot saat berkontestasi dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam sekaligus agama yang dipeluk oleh calon wakil gubernur Sihar Sitorus sebagai modal politik.

Pilihan Eramus tersebut didukung oleh fakta solidaritas ikatan keagamaan yang semakin massif berlangsung selama dekade terakhir ini di beberapa daerah Sumatera Utara, terutama Medan sebagai jantung pemerintahannya. Berdasarkan trajektori dan perjalanan empirik perilaku beragama di Medan, narasi Islamisme telah menguat seiring dengan terbukanya tiga aras pertemuan sehingga memungkinkan pihak manapun berinteraksi di dalamnya, yakni melalui komunikasi media lewat sebaran Buletin dakwah milik Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin, komunikasi interpersonal antara junior-senior atau

keluarga di Rumah, dan juga komunikasi dalam bentuk halaqah yang diselenggarakan oleh kelompok Islamis.⁴⁵

Fakta-fakta keterlibatan narasi keagamaan dalam percaturan Pilgub Sumut tersebut secara jelas disuguhkan oleh *tirto.id* lewat skema komparasi latar belakang calon berikut strategi agitasi dan propaganda massa selama kampanye. Dilihat dari latar belakangnya, paslon nomor urut 1, yakni Eramus, merupakan pasangan Islam dan Islam. Sedangkan paslon nomor urut 2, yakni Djoss, merepresentasikan kolaborasi Islam dan Kristen, sehingga paslon ini disebut 'paslon pelangi'. Dalam arena politik yang masih dilingkupi budaya parokial daripada partisipasi rasional, status yang melekat pada Djoss sangat menarik untuk dijadikan komoditas propaganda politik oleh rivalnya.⁴⁶

Argumentasi demikian dibuktikan oleh adanya rentetan kasus yang diklaim merupakan strategi paslon 'non-pelangi' Eramus. Seperti saat digelarnya pertemuan agama melalui Kongres Umat Islam (KUI) yang diselenggarakan mendadak dengan dihadiri tokoh-tokoh dari partai-partai berbasis Islam pendukung Eramus, seperti Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra, Gatot Nurmantyo, dan lain-lain. Selain pertemuan agama yang mendadak tersebut, juga ada strategi mendadak yang tampak dari kegiatan pembagian zakat oleh anggota DPRD dari partai pendukung paslon Eramus di Binjai, Tapanuli Utara, Medan, Deli Serdang, dan Langkat. Mendekati waktu pencoblosan, strategi propaganda Islamisme tersebut semakin mencolok di ruang publik melalui sejumlah khutbah politik yang diselipkan dalam agenda keagamaan di masjid. Bahkan hampir semua masjid di Medan terdapat baliho yang berisi seruan untuk memilih paslon seiman.

45 Faisal Nurdin, "Memetakan Narasi Islamisme Di Medan, Sumatera Utara: Investigasi Terhadap Pola Penyebaran Dan Penerimaan Terhadap Radikalisme", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* vol. V (02), UIN Syarif Hidayatullah, hal. 37-39

46 *Tirto.id*, Faktor yang Membuat Djarot Kalah dari Edy di Pilgub Sumut 2018 <https://tirto.id/faktor-yang-membuat-djarot-kalah-dari-edy-di-pilgub-sumut-2018-cM7n> Diakses 7 Agustus 2020

Hal tersebut oleh beberapa peneliti diartikan sebagai implikasi atau *butterfly effect* yang dihasilkan oleh kejadian politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.⁴⁷ Sebagaimana yang sudah terjadi, Pilkada DKI merupakan momentum di mana politik identitas berbasis keagamaan benar-benar menyeruak dan mengenai psikologi publik. Sejak saat itu hampir semua penduduk Indonesia mulai sadar adanya fenomena yang sebetulnya sudah dibicarakan dalam ruang akademisi ilmu politik tentang politisasi agama dalam politik elektoral. Kali ini kasus politisasi agama tersebut menyeret Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tidak hanya personal, serangan terhadap Ahok tersebut juga diarahkan kepada para pendukung, simpatisan, dan koleganya, terutama Djarot yang didapuk menjadi Calon Wakil Gubernur mendampingi Ahok. Sayangnya setelah bertahan menghadapi banyak serangan dari kelompok Anies-Sandi yang merupakan representasi dari kalangan Islamis, pasangan Ahok-Djarot kalah tipis di putaran kedua. Pasca kekalahan yang dideritanya, Ahok tetap menjalani proses hukum yang berujung pada putusan penahanan atas dirinya. Sedangkan Djarot dengan membawa pengalaman politisasi keagamaan selama Pilkada DKI Jakarta tetap melanjutkan karir politiknya lewat Pilgub Sumatera Utara. Tetapi anehnya secara mengejutkan, pendamping yang Djarot pilih justru dari kelompok minoritas yang sama dengan identitas keagamaan Ahok, yakni Kristen. Pilihan tersebut oleh beberapa peneliti dianggap *blunder* sebab berpotensi membuka pihak Islamis untuk mengulang politisasi agama yang sebelumnya terjadi di Jakarta.⁴⁸

Prediksi tersebut menemukan momentumnya terlebih saat ditemukan iklan di harian Analisa pada bulan Maret 2018. Dalam bentuk *full page*, iklan tersebut menyebutkan bahwa Djarot akan diproyeksikan untuk menduduki kursi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam struktur kabinet Joko Widodo periode

47 Erond L. Damanik, *Politik Lokal...* hal. 318

48 Okezzone, "Isu Agama Diprediksi Bakal Sudutkan Djarot di Pilgub Sumut" <https://news.okezone.com/read/2018/01/06/340/1841061/isu-agama-diprediksi-bakal-sudutkan-djarot-di-pilgub-sumut> Diakses 6 Agustus 2020

kedua saat menang pada Pilpres 2019. Secara kognitif, pesan yang terkandung di dalam iklan langsung menegaskan eksistensi sosok pasangan Djarot, yakni Sihar Sitorus yang beragama Kristen. Manakala Djarot diangkat menjadi Mendagri tentu saja Sihar melenggang menjadi gubernur penggantinya.⁴⁹ Bagi paslon Eramus, ini merupakan komoditas yang bisa dijadikan bahan kampanye, terutama lewat media perpesanan, untuk memperlemah citra dan elektabilitas paslon Djoss.

Dari paparan di atas tampak sekali narasi politik identitas yang mengambil bentuk klaim 'Islamisme' mendominasi Pilgub Sumut 2018. Oleh kalangan tertentu ini menjadi meta wacana yang bisa digulirkan setiap kali terdapat salah satu kandidat paslon yang tidak *include* dalam agama mayoritas setempat. Apalagi saat politik elektoral hanya diramaikan oleh dua blok yang terlibat duel *face to face*, eskalasi penggunaan narasi keagamaan ini semakin tinggi. Asumsi demikian sudah terlihat selama trayektori perhelatan pesta demokrasi sejak tahun 2014 dalam Pemilihan Presiden.

Pada Pilgub Sumut 2018, narasi identitas telah mengambil hampir separuh rasionalitas pemilih. Isu-isu programatik yang ditonjolkan oleh masing-masing paslon seakan tenggelam oleh isu-isu identitas yang berbasis agama ini. Kacung Marijan (2011) menyoroti fenomena tersebut dengan sangat tajam dan skeptis. Ia menegaskan bahwa politik aliran yang menggunakan narasi identitas keagamaan ternyata hanya menjadi kekuatan politik daripada kekuatan moral, justru di tengah iklim reformasi yang menuntut keterbukaan pikiran.⁵⁰ Manakala aspek politik dalam memandang agama lebih unggul daripada aspek moral, maka yang terjadi adalah demarkasi agama pada satu kepentingan aktor politik yang memainkannya, sehingga mereduksi gagasan 'nasionalis' lewat program-program pemerintahan yang melampaui identitas primordial.

49 Erond L. Damanik, *Politik Lokal...* hal. 319.

50 *Ibid.*, hal. 318

Hal tersebut diperparah lagi oleh keterlibatan aktor elite nasional yang bermain di wilayah lokal. Kehadiran Gatot Nurmantyo selama Pilgub Sumut 2018 yang bermaksud memberi dukungan tersirat kepada Paslon Eramus, misalnya, menjadi penguat asumsi yang mengatakan, bahwa narasi politik identitas yang 'Islamis' sudah diformulasikan tidak hanya oleh elite lokal. Tentu saja ini berkaitan dengan konsep desentralisasi yang memiliki makna lain sebagai kebijakan politik untuk mempermudah pendistribusian kekuasaan dari nasional menuju lokal. Sebagaimana anggapan yang dikemukakan oleh Bourdieu, pendistribusian ini ternyata tidak hanya berada pada sisi administrasi formal saja, melainkan juga melibatkan semua aspek politik (*political decentralization*) berupa subjek atau aktor yang mengendalikan struktur administrasi tersebut.⁵¹ Apa yang menarik dari kejadian ini adalah para pembela politik identitas nyatanya telah membuat semacam 'jaring laba-laba' yang menyalurkan energi serta strategi dari keberhasilan agitasi dan propaganda Jakarta di tahun 2017 menuju daerah-daerah lainnya.

Secara lebih mendalam, saat disinggung Pilgub DKI Jakarta 2017 sebagai *butterfly effect* terhadap kondisi politisasi agama di Sumatera Utara, maka yang dimaksud adalah daya kekuatan yang ditimbulkan oleh Pilgub DKI Jakarta telah menjadi semacam sesuatu yang dianggap objektif dalam arena politik, atau yang dalam bahasa Bourdieu disebut *habitus*. Habitus tersebut secara bertahap menjelma ke dalam bentuk praktik sosial yang otomatis melahirkan kepatuhan terhadap *game of rule* yang dirasa paling mendominasi peristiwa politik Pilgub DKI Jakarta. Manakala sudah sampai pada titik ini, maka para aktor yang akan berkompetisi di wilayah-wilayah lain dalam pilkada pasca dilangsungkannya Pilgub Jakarta akan menganalisis poin demi poin yang terdapat dalam Pilgub DKI Jakarta sebagai strategi, motivasi, dan logika politiknya. Sehingga saat hitungan rasional tersebut dianggap sesuai dengan realita keagamaan yang ada di

⁵¹ *Ibid.*, hal. 321

daerahnya, maka aktor politik lokal akan cenderung memainkan pola yang sama.

F. Pengalaman Pilpres 2019

Butterfly effect politik identitas yang terjadi di wilayah lokal mencapai titik kulminasi pada perhelatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Kontestasi tersebut secara mengejutkan mengulang kembali (*dejavu*) Pilpres 2014 antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kali ini di Pilpres 2019 Joko Widodo menggandeng sosok Ma'ruf Amin, sosok ulama yang disegani, sedangkan Prabowo Subianto melamar Sandiaga Uno, sosok pengusaha yang memiliki jejaring dengan para ekonom, sebagai wakilnya. Apa yang berbeda selain pasangan wakil yang berubah demikian adalah strategi politik yang dimainkan oleh kedua tim sukses (*timses*) masing-masing Paslon. Tampak sekali betapa pengalaman politik identitas yang membuat polarisasi jelas antara kelompok Islamis dan nasionalis-religius pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi modal bagi masing-masing calon menentukan sikap politiknya. Tetapi tampaknya dilihat dari permainan isu identitas yang dijalankan baik oleh TKN (Tim Kampanye Nasional) milik Koalisi Indonesia Maju maupun Koalisi Indonesia Adil Makmur tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan apa yang dilakukan oleh *timses* Jokowi dan Prabowo saat Pilpres 2014 yang lalu.

Selama Pilpres 2014, narasi identitas muncul terutama mengenai identitas masing-masing kandidat. Misalnya menjelang pencoblosan, muncul majalah bernama *Obor Rakyat* yang berisikan artikel-artikel tentang Jokowi sebagai kaki tangan Cina, capres Boneka milik Megawati, dan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI). Lebih dari itu, soal ketaatan agama juga dimunculkan di dalamnya sebagai bahan mendiskreditkan serta menjatuhkan elektabilitas Jokowi. Tetapi jelas semua itu tidak berdampak signifikan terutama disebabkan isu identitas belum mampu membelah entitas masyarakat ke dalam dua blok politik, yakni Islamis dan Nasionalis. Di samping itu isu agama

tidak mendapat dukungan realistis, karena masing-masing kandidat memiliki tim dari kelompok Islam.

Kegagalan pihak yang memainkan isu identitas dalam perhelatan pesta demokrasi dengan tujuan meraih suara pemilih yang mayoritas muslim pada Pilpres 2014 tersebut ternyata masih berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan eskalasi politik yang dihasilkan berdampak besar. Hal tersebut setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni telah terbentuknya solidaritas di antara kelompok Islamis dan juga arena demokrasi selalu menjadi aktualisasi kepentingan kelompok Islamis untuk menguji strategi sekaligus memantapkan posisi dalam ruang kekuasaan. Vedi Hadiz menambahkan, bahwa keberhasilan terbentuknya aliansi demikian dapat dilihat dan bergantung pada sejauh mana isu agama yang digulirkan oleh kelompok Islamis mampu membuat demarkasi serta menampilkan musuh politiknya sebagai penguasa yang serakah (*rapacious elites*).⁵²

Adanya persamaan sentimen terhadap agama yang sudah membentuk sistem kerja demikian berlanjut pada perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017. Ini menjadi pemilu yang paling menentukan. Bahkan meski dilaksanakan di tingkat provinsi, fakta Jakarta sebagai Ibu Kota Negara membuat konfigurasi politik di sana dapat dijadikan representasi politik nasional. Modal strategis yang dimiliki oleh kelompok-kelompok kepentingan selama perhelatan Pilpres 2014 dimunculkan kembali lewat permainan identitas yang lebih kompleks dan mencekam. Narasi keagamaan sebagai bagian terpenting yang berjalan sejak 2014 menjadi isu paling dominan, sehingga mampu membuat polarisasi yang jelas, mulai dari elite sampai *grassroots*. Tidak menjadi kesulitan bagi para pengamat untuk menangkap fakta-fakta politisasi agama tersebut. Analisis seperti Francis Chan dalam *The Straits Times* bahkan memberi predikat politisasi agama Pilkada DKI 2017 ini sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengguncang dunia.

⁵² Vedi R. Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and The Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. Hal: 12.

Apa yang menarik ditelisik lebih dalam dari polarisasi identitas keagamaan yang terjadi pada Pilkada 2017 adalah isu yang diangkat mampu menginfiltrasi kesadaran warga secara luas. Hal tersebut didorong juga oleh karakter objek yang ternyata sangat fundamental bagi pemeluk agama Islam. Blunder fatal yang dilakukan Ahok sebagai kandidat pemilik elektabilitas tertinggi pada saat mengisi acara di Kepulauan Seribu berupa penafsirannya atas Al-Maidah Ayat 51 yang dikontekskan dengan modus operandi politik elektoral untuk menjatuhkan lawan, justru menjadi momentum bagi kelompok Islamis yang sudah lama mempersiapkan mobilisasi kelompoknya di ruang publik, sekaligus juga mengidentifikasi pemilih yang dapat ditarik ke dalam aliansi.

Tidak butuh lama bagi kelompok Islamis yang sedari awal sudah memberikan dukungan kepada pesaing Ahok, Anies Baswedan, untuk menggelindingkan isu bertajuk 'pelecehan agama'. Front Pembela Islam (FPI) menginisiasi hal ini dengan merapatkan para organisasi Islamis ke dalam wadah bernama Gerakan Nasional Penjaga Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meski demikian masih ada satu organisasi Islam yang tidak bergabung ke dalam aliansi Islamis tersebut yakni Nahdlatul Ulama (NU). Lewat pernyataan resminya, NU berstatement bahwa lebih penting menjaga ikatan kebangsaan. Dengan demikian, apabila mengikuti konsep Vedi R. Hadiz bahwa aliansi Islamis memiliki karakter solid, asimetris dan heterogen, maka ketidakterlibatan NU menandakan ia berada di luar kutub Islamis tersebut.⁵³

Oleh karena NU tidak menunjukkan ketertarikan dengan mobilisasi massa yang dilakukan oleh kelompok Islamis sewaktu Pilkada DKI, maka NU menjadi organisasi sosial keagamaan yang paling pas untuk dijadikan *partner* bagi kandidat yang merasa terancam dengan aktivitas politik Islamis. Tentu saja dari sini muncul keterbelahan tidak hanya Islamis *vis a vis* nasionalis, melainkan juga – seperti apa yang dikatakan oleh Edward Aspinall (2019) – Islamis *vis a vis* pluralis. Aspinall lewat

53 *Ibid.*, hal. 20

tulisannya beberapa hari setelah diumumkannya kemenangan Paslon Jokowi-Ma'ruf yang berjudul *Indonesia's election and the return of ideological competition* melihat adanya pertarungan ideologis yang ketat antara NU yang terepresentasi lewat sosok Ma'ruf Amin di kubu Jokowi, vis a vis kelompok Islamis, seperti Islam kanan, Islam garis keras, dan para pendukung khilafah yang berdiri sebaris dengan Prabowo.⁵⁴

Dengan demikian politik identitas dalam Pilpres 2019 justru memberi dua pemahaman strategis sekaligus. Di satu sisi, hal tersebut telah membuat adanya sebarang tindakan preventif yang dilakukan oleh masing-masing kandidat apabila mendapati serangan lawan yang menggunakan narasi keagamaan. Di sisi lain, sebagaimana umumnya sistem 'momok' Islamis bekerja, politik identitas tetap teraktualisasi lewat bentuk-bentuk verbal sepanjang Pilpres. Meski demikian justru yang perlu diperhatikan adalah bentuk politisasi agama mengalami tumpang tindih dengan narasi lainnya, seperti asing, Cina, dan PKI. Hal tersebut dipengaruhi oleh aspek keberadaan Kiai Ma'ruf Amin sebagai tokoh sentral NU sekaligus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di seberang kelompok Islamis. Tentu saja penyerangan di sisi identitas keagamaan terhadap Jokowi-Ma'ruf sangat tidak menguntungkan, karena Ma'ruf juga memiliki pemahaman agama yang mendalam, di tambah kalangan Islam pesantren juga ikut terlibat langsung dalam setiap kampanye Ma'ruf (*bandingkan dengan Pilpres 2014 saat tokoh kiai tidak aktif secara langsung*).

Gueorguiev, Ostwald dan Schuler menjelaskan fakta ini dengan menekankan pada aspek kebesaran nama Ma'ruf Amin sehingga kelompok yang berada di belakang Prabowo tidak memiliki peluang *tackling* terhadap Jokowi, sebagai berikut:

"On Islam, there is little ambiguity in Prabowo's bid to cast himself as the purer Muslim. Indeed, Prabowo played a role in Ahok's ouster by backing a chief rival. Jokowi has sought to counter this presumed vulnerability by naming

⁵⁴ Edward Aspinall, 2019 <https://www.newmandala.org/indonesias-election-and-the-return-of-ideological-competition/> Diakses pada 09 Agustus 2020

Ma'ruf Amin, an elderly conservative cleric and former leader of the world's largest independent Islamic organisation – Nahdlatul Ulama (NU) – as his running mate in 2019. (Tentang Islam, ada sedikit ambiguitas dalam upaya Prabowo untuk menjadikan dirinya sebagai Muslim yang lebih murni. Memang, Prabowo memainkan peran dalam penggulingan Ahok dengan mendukung saingan utamanya. Jokowi telah berupaya untuk melawan dugaan kerentanan ini dengan menunjuk Ma'ruf Amin, seorang ulama konservatif tua dan mantan pemimpin organisasi Islam independen terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama (NU), sebagai pasangannya pada tahun 2019).⁵⁵

Beberapa kasus politik identitas yang disuguhkan oleh peneliti politik membuktikan kebuntuan politisasi agama dalam mendominasi perjalanan Pilpres. Alih-alih kelompok Islamis menampakkan strategi agitatif berupa narasi agama, mereka memilih isu seperti kedaulatan negara, hutang kepada negara Cina, penguasaan *property* sumber daya negara di tangan etnis Tionghoa, masuknya tenaga kerja asing berkewarganegaraan Cina, dan narasi kemunculan Komunisme lewat kebangkitan PKI sebagai akibat kedekatan pemerintah Jokowi selama periode pertama dengan Cina. Dibanding politisasi agama, isu-isu tersebut menjadi faktor dominan atas konstruk yang membelah para pendukung masing-masing Paslon, yakni antara *cebong* dan *kampret*. Pada akhirnya apa yang terjadi bukan lagi polarisasi agama belaka, melainkan sudah mengarah pada isu-isu populis yang dijalankan oleh para kelompok Islamis di kutub Paslon Prabowo-Sandi. Dengan begitu para peneliti politik lebih *prefer* menggunakan frasa *populisme Islam*, sebab isu-isu yang diangkat oleh Islamis sudah beranjak kepada pengangkatan aspek sosial yang populer.⁵⁶

55 Dimitar Gueorguiev, dkk. *Rematch: Islamic Politics, Mobilisation, and the Indonesian Presidential Election*, Routledge Taylor & Francis Group, 2019. hal. 02

56 M. Hilali Basyra, *Populisme Islam [Krisis Modal Sosial dan Tantangan terhadap Demokrasi: Refleksi tentang Pemilu 2019]*, Jurnal Maarif, Vol. 14 (01), Jakarta: 2019. hal. 50-52.

Karakter konkrit dari populisme Islam tersebut mengikuti meta konsep di balik strategi populis yang menggunakan krisis sosial sebagai modal memobilisasi dukungan. Jadi bisa dikatakan isu yang akan dipilih oleh kalangan populis bergantung pada situasi dan kondisi yang paling menguntungkan. Tentu saja aspek kesejahteraan hidup masyarakat menjadi komoditas isu yang menjanjikan. Sehingga menggunakan isu ekonomis lebih menjanjikan daripada memaksakan politisasi agama dalam Pilpres 2019. Hal tersebut sudah diprediksikan oleh beberapa peneliti strategi politik. Arya Fernandes (2018) menyebut bahwa bergesernya isu-isu primordial kepada isu-isu ekonomi dan pembangunan yang digunakan oleh masing-masing Paslon lewat kampanye-kampanye menjadi faktor paling menentukan. Meski demikian, menariknya aspek identitas juga masih ditempelkan dengan maksud mengikat solidaritas melalui aspek non-rasional, yakni psikologis.⁵⁷

Kendati politik identitas di sektor agama tidak terlalu menonjol di tingkat elite, hal yang berbeda dialami oleh para pemilih di tingkat lokal atau *grassroots*. Dilansir dari bbc news, politik identitas justru menguat di tataran masyarakat. Bahkan beberapa dari peristiwa konflik tersebut berkulminasi lewat pemutusan jaringan persekawanan. Hal tersebut terjadi di beberapa daerah kecil yang secara demografis masyarakatnya terdiri dari banyak kelompok yang memiliki keragaman pandangan keagamaan yang cenderung konservatif dan secara aliansi banyak yang tertarik pada figur tertentu. Misalkan cerita yang dituturkan oleh salah satu warga Surabaya beretnis Madura bernama Zabidi (43).⁵⁸ Menurutnya terjadi keretakan keluarga besar yang diakibatkan oleh perbedaan pilihan Capres dan Cawapres. Zabidi yang tinggal di Surabaya memilih Jokowi-Ma'ruf, sedangkan mayoritas keluarganya di Madura

57 Arya Fernandes, Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas. CSIS Election Series No.1. Hal. 09.

58 BBC News Indonesia, Politik identitas: Pilpres 2019 ungkap potensi keretakan sosial di masyarakat" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48062051> Diakses 09 Agustus 2020

mendukung Prabowo-Sandi. Dari situ peneliti melihat bahwa politik identitas, walaupun tidak menjalankan modus operandi di tingkat elite, tetap memiliki implikasi yang serius di daerah seperti Madura. Hasilnya sesuai perhitungan Komisi Pemilihan Umum, Paslon Prabowo-Sandi menang telak di Pulau Garam tersebut. Hal tersebut besar sebabnya dipengaruhi oleh kondisi sosio-keagamaan Madura yang lebih condong pada pandangan konservatif yang lebih bertendensi psikologis terhadap sosok Habib Rizieq Shihab.

Selain di tataran keagamaan, dalam skala minimalis, politik identitas juga marak digulirkan di wilayah Sumatera. Etnisitas yang muncul lebih didasarkan pada komposisi empat kandidat tersebut, di mana hanya Sandiaga Uno yang tidak berasal dari Jawa melainkan Sumatera. Sehingga praksis politik identitas di tengah masyarakat dengan demikian mengambil bentuk yang lebih kompleks, yakni antara agama dan etnisitas; Muslim Jawa vis a vis Muslim Luar Jawa. Jika demikian, etnisitas berperan sebagai representasi dari ideologi keagamaan. Bagaimanapun dalam Pilpres 2019 ini terlukis dua lanskap perpecahan berbasis identitas, yakni afiliasi agama, dan etnisitas.⁵⁹

G. Perilaku Politik Pemilih Pada Pilwako Kota Medan 2020

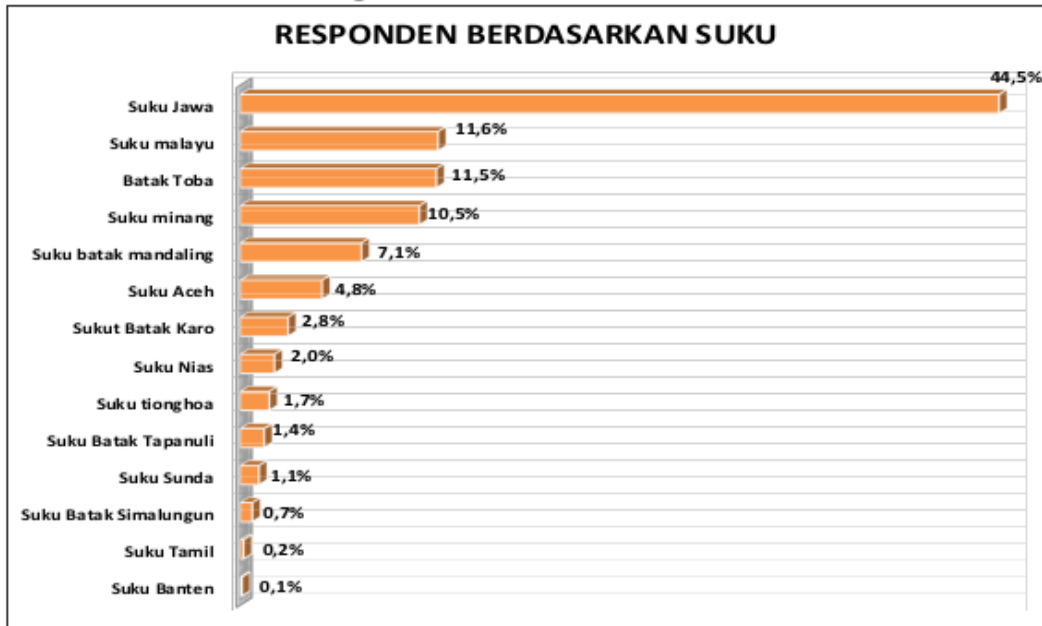
Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut pilkada) serentak merupakan salah satu hajatan besar untuk untuk memilih kepala daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Setelah dilakukan pada tahun 2018, pilkada serentak juga akan dilaksanakan pada tahun 2020. Terdapat 270 daerah pada tahun 2020 yang akan menggelar pilkada. Dengan rincian 9 akan dilaksanakan di tingkatan Provinsi, 224 di tingkatan Kabupaten dan 37 pilkada di tingkatan Kota. Salah satu wilayah perkotaan yang melaksanakan pilkada tahun 2020 adalah Kota Medan.

⁵⁹ Thomas Pepinsky, *Islam and Indonesia's 2019 Presidential Election*, Asia Policy Vol. 14 (4), hal. 59

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, dengan penduduk lebih dari 2 juta. Kondisi tersebut menjadikan Kota Medan salah satu rujukan banyak penelitian, termasuk penelitian yang kami lakukan. Jamak diketahui bahwa Kota Medan memiliki budaya yang sangat heterogen. Hal itu tercermin dari banyaknya suku yang tinggal dan menetap di sana. Sebut saja mulai dari suku Jawa, Melayu, Batak, Tionghoa hingga Tamil. Pun begitu juga dengan bahasa yang digunakan juga sangat bermacam-macam. Sejarah Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Deli, sebuah kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga Pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota pada 1 April 1909 dan menjadikannya pusat pemerintahan Keresidenan Sumatera Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran.

¹² Menurut Bappenas, Medan adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Medan adalah kota multi etnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, Mandailing, dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruku di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Jerman. Heterogenitas budaya di Kota Medan terkodifikasi dalam ruang sosial solid dan utuh, sehingga gesekan di antara budaya relatif rendah.

Gambar 4.
Ragam Etnis di Kota Medan



Sumber: Survei ARSC, 2020

Gambaran tersebut itulah menarik peneliti untuk melihat Kota Medan dalam perspektif perilaku memilih masyarakatnya. Selain itu banyak data survei⁶⁰ menyebutkan bahwa Kota Medan memiliki tipe perilaku memilih model *Colombian*. Model *Colombian* ini meniscayakan perilaku memilih yang akan terkooptasi pada satuan ajaran agama, budaya dan adat maupun norma yang sama.⁶¹ Studi kemudian lebih dikenal dengan model atau pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis memperlihatkan bahwa ada pengaruh antara nilai-nilai sosiologis yang menempel pada diri individu yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam politik. Nilai-nilai sosiologis tersebut berupa agama, kelas sosial, etnis, daerah, tradisi keluarga dan lain-lain. Tipologi ini tentu akan berbeda dengan kebanyakan wilayah perkotaan yang rata-rata memiliki kecenderungan perilaku memilih yang model

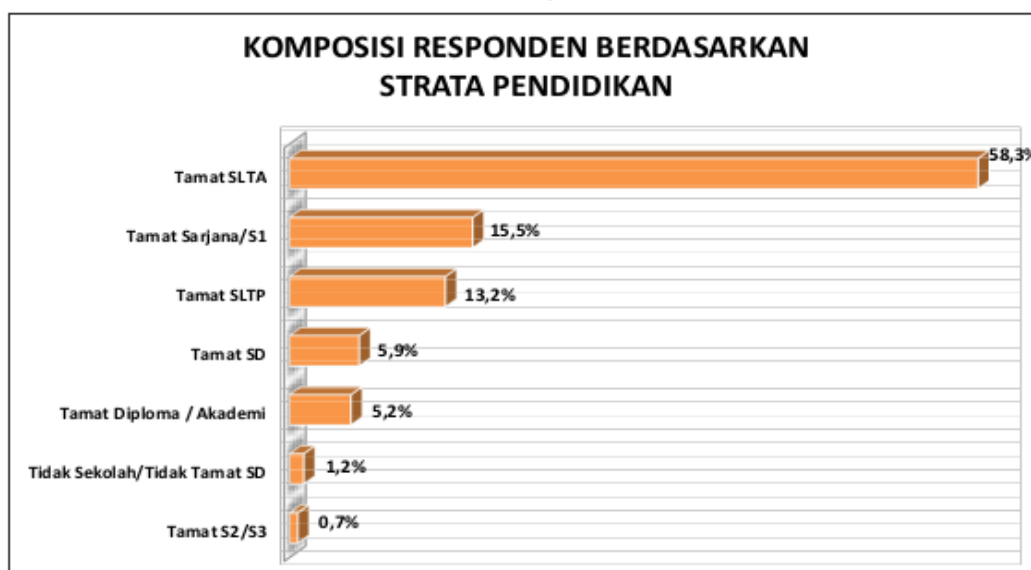
60 Lihat hasil survei Poltraking terkait Kota Medan pada bulan Februari 2020

61 Lihat dalam Bartels, L. M. "The Study of Electoral Behavior" dalam Jan E. Leighley (ed) *The Oxford Handbook of american Elections and Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press. 2012. hal 240

rasional.⁶² Terdapat dua hipotesis kenapa pemilih perkotaan memiliki kecenderungan sebagai pemilih yang rasional. *Pertama*, tingkat pendidikan masyarakat perkotaan yang relatif lebih tinggi daripada wilayah *rural*. Tentu hal tersebut terkondisikan karena aspek kesadaran masyarakatnya yang tinggi terhadap pendidikan. Sehingga masyarakat perkotaan dalam aspek ini memiliki keterbukaan pikiran (*open mindset*) terhadap banyak hal termasuk politik.

Berikut hasil survei ARSC terkait kondisi Strata Pendidikan masyarakat di Kota Medan. Terlihat bahwa mayoritas masyarakat Kota Medan berpendidikan SLTA atau sederajat sebesar 58,3% dan juga Sarjana S1 sebesar 15,5%.

Gambar 5.
Strata Pendidikan Masyarakat Kota Medan



Sumber: Survei ARSC, 2020

Masyarakat perkotaan akan melihat, menilai baru kemudian membuat keputusan untuk memilih dalam politik berdasarkan pada aspek yang menurutnya logis dan rasional. Jarang kemudian mereka menyandarkan pilihan politiknya

⁶² *Ibid.* hal. 240 Dalam model perilaku memilih setidaknya terdapat tiga pendekatan yang selama ini menjadi basis dalam membaca perilaku memilih yaitu The Columbia Study, The Michigan Model, dan Rational Choice. Ketiga pendekatan tersebut lebih dikenal dengan istilah sosiologis, psikologis dan pilihan rasional.

kepada model sosiologis yang terikat pada putusan agama, suku dan ormas. Dengan begitu hipotesis yang kedua terkait dengan preferensi memilih masyarakat perkotaan yang mayoritas menilai bahwa pilihan politik mereka ditentukan oleh faktor dirinya sendiri. Tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan sehingga membuat masyarakat perkotaan memiliki pola pikir yang terbuka dan mampu menilai secara mandiri aspek-aspek tertentu yang dianggap paling rasional dalam pertimbangan berpolitik, menjadikan mereka banyak menyandarkan pilihan politiknya pada diri mereka sendiri sebagai penentunya. Artinya, masyarakat perkotaan memiliki pengetahuan yang cukup dalam menilai dan menentukan sikap politik berdasarkan proposisi-proposisi yang terbentuk dari pengalaman membaca dan menganalisa suatu kejadian. Kondisi perkotaan yang 'melek internet' tentu turut menyumbang kemudahan masyarakat perkotaan dalam melakukan berbagai aspek tersebut di atas. Namun demikian hasil penelitian kami tidak sepenuhnya menggambarkan linieritas bahwa masyarakat kota secara otomatis dalam perilaku memilihnya mayoritas rasional. Justru sebaliknya perilaku memilih di Kota Medan mayoritas sosiologis.

Untuk menunjukkan hal tersebut dan mencerminkan bagaimana perilaku pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Medan 2020, pada bab ini akan diulas berkaitan dengan identifikasi dukungan partai politik, faktor pendukung dalam perilaku pemilih, komposisi pemilih rasional, sosiologis dan psikologis, dan selanjutnya juga akan diulas bagaimana paradoks dalam konteks perilaku memilih di kota Medan.

H. Identifikasi Dukungan Partai Politik

Identifikasi dukungan partai politik didefinisikan sebagai rasa keterikatan pribadi dan afektif pada partai politik yang didasarkan pada perasaan kedekatan dengan kelompok sosial yang terkait dengan partai.⁶³ Di sini yang dinilai sejauh mana

⁶³ Goren, P. (2005). Party identification and core political values. *American Journal of P -*

pemilih mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari partai tertentu, atau ia merasa dekat secara psikologis dengan sebuah partai tertentu.⁶⁴

Dalam konteks pemilihan lokal, identifikasi dukungan terhadap partai memang tidak menjadi arus utama dalam menilai perilaku pemilih, sebab sejauh ini yang muncul perilaku pemilih cenderung didasarkan pada faktor sosiologis, misalnya religiusitas, etnisitas, maupun karena faktor latar belakang kandidat.⁶⁵ Namun demikian, identifikasi dukungan partai politik ini dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran bagaimana perkembangan partai politik kaitannya dengan dukungan pemilih, terutama apakah pemilih menentukan kandidat didasarkan pada dukungan partai.

Dalam konteks kota Medan, apabila melihat pada perkembangan 10 terakhir perolehan suara partai bisa dibilang cukup mengalami pasang-surut, meski ada sebagian partai yang memperoleh kursi cukup stabil. Misalnya, PDIP sejak pemilu legislatif 2014 dan 2019 konsisten mendapatkan kursi tinggi yakni 9 kursi dan 10 kursi. Demikian dengan Partai Gerindra yang pada pemilu legislatif 2019 hanya mendapatkan 6 kursi, kemudian naik menjadi 10 kursi pada tahun 2019. Sedangkan untuk partai berbasis Islam, hanya PKS dan PAN yang mengalami kenaikan. PKS dari 5 kursi pada 2014 kemudian naik menjadi 7 kursi pada 2019, demikian pula dengan PAN yang mendapat 4 kursi pada 2014 naik menjadi 6 kursi pada 2019. Berbeda dengan PPP yang mengalami penurunan kursi, pada 2014 mendapat 5 kursi dan 2019 hanya 1 kursi. Sedangkan untuk partai baru, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperoleh 2 kursi pada pemilu legislatif 2019.

litical Science, 49(4), 881-896.

64 Haryanto, H. (2014). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(3), 291-308., hlm 293

65 *Ibid*, hlm. 291

Tabel 4.

Perbandingan Perolehan Kursi di DPRD Kota Medan 2014-2019

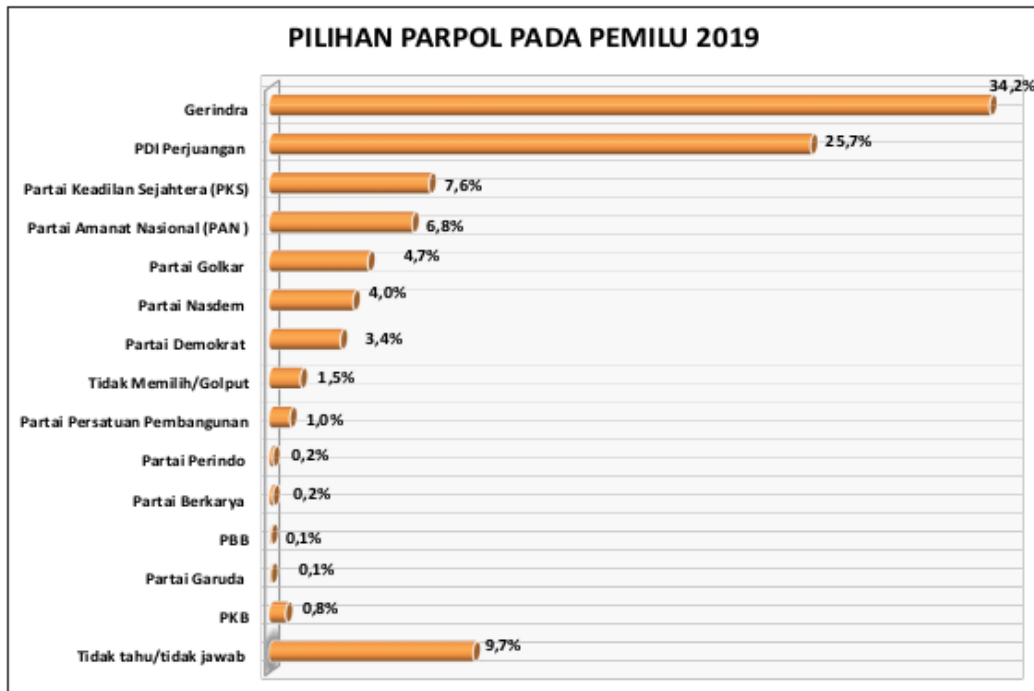
Partai Politik	Pileg 2014	Pileg 2019
Gerindra	6	10
PDI-P	9	10
Golkar	7	4
NasDem	2	4
PKS	5	7
PPP	5	1
PAN	4	6
Hanura	4	2
Demokrat	5	4
PBB	1	0
PKPI	2	0
PSI	0	2 (baru)

Sumber: Diolah dari data KPU Medan

Apabila melihat dukungan partai politik di kota Medan dengan mendasarkan pada perolehan kursi, maka terlihat dua partai yakni PDIP dan Partai Gerindra yang memperoleh suara tinggi selama 10 terakhir. Sedangkan partai lainnya, seperti Golkar dan Demokrat mengalami penurunan, meski tingkat penurunannya tidak besar. Uniknya, partai berbasis Islam seperti PKB yang unggul di daerah Jawa Timur, misalnya, justru di Kota Medan tidak mendapat kursi sama sekali. Justru partai berbasis Islam yang mendapat dukungan signifikan adalah PKS dan PAN.

Gambaran perolehan kursi DPRD di Kota Medan ini memiliki kesamaan dengan hasil survei ARSC pada Juni 2020, di mana tiga partai besar yang mengaku dipilih oleh masyarakat Kota Medan pada pemilu legislatif 2019 ialah Partai Gerindra, PDIP, dan PKS.

Gambar 6.
Pilihan Parpol Pada Pemilu 2019



Sumber: Survei ARSC, 2020

Pada tabel 5 dan gambar 7 di atas terlihat dukungan mayoritas masyarakat di kota Medan terkonfirmasi pada dua partai besar, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dua partai ini pada konteks ideologi sebenarnya memiliki kesamaan, yakni partai yang berhaluan nasionalis. Namun seiring berjalannya waktu, terutama berkaitan dengan momentum pilpres 2014 dan menjelang Pilpres 2019 kemudian bergerak ke blok yang berlawanan. Partai Gerindra di bawah komando Prabowo Subianto sebagai oposisi Jokowi di periode awal mem²⁵gunakan blok aliansi dengan kelompok Islam konservatif kanan, seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persatuan Alumni (PA) 212. Sedangkan PDIP dengan simbol Jokowi dan juga Megawati berada pada sisi sebaliknya yang cenderung mengkampanyekan persatuan nasional. Oleh karena itu, dukungan pemilih terbagi ke dalam dua partai tersebut, meski pada level yang substantif, misalnya soal program partai dan kebijakan partai antara PDIP, Partai Gerindra dan partai-partai lain sulit dibedakan karena partai bergerak ke

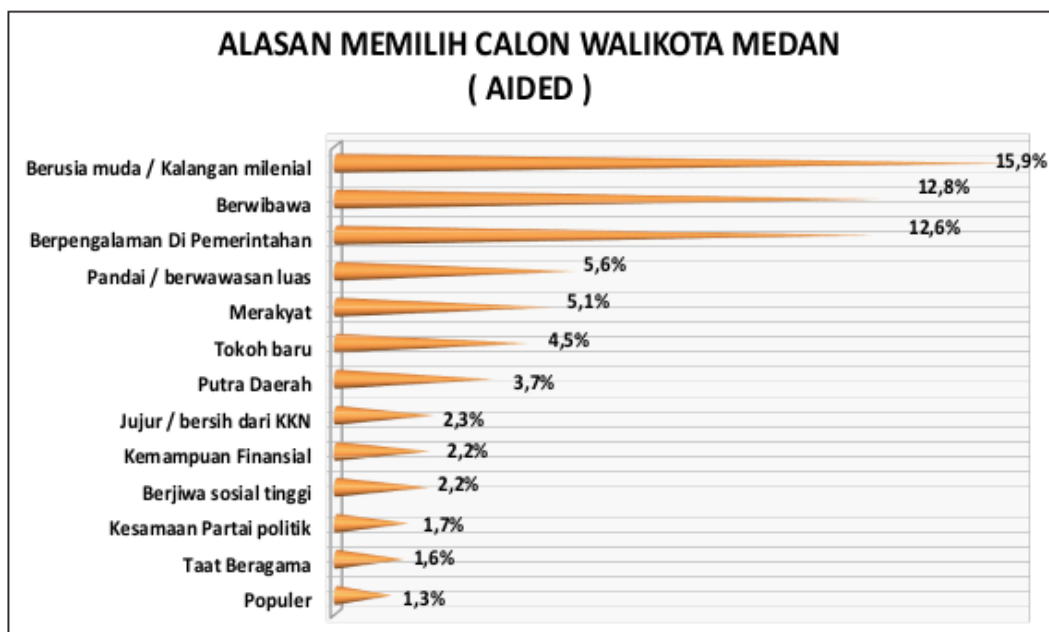
arah pragmatis dan bertumpu pada politik kepentingan sesaat, bukan orientasi jangka panjang.⁶⁶

Dinamika dukungan partai politik ini juga tergambar dalam dukungan pilpres 2019, misalnya di kota Medan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno keluar sebagai pemenang dengan perolehan 645.209 suara, sedangkan Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat 542.221 suara. Terdapat selisih kemenangan Prabowo sebesar 102.988 suara. Meskipun pada tingkat provinsi Sumatera Utara Jokowi unggul 348.729 suara dari Prabowo.⁶⁷

I. Pertimbangan Partai Politik dalam Memilih

Perilaku memilih di Pilwali Kota Medan 2020 yang didasarkan pada preferensi partai politik cukup rendah, sebab masyarakat cenderung kepada pertimbangan sosok personal kandidat atau figur calon. Hal ini tergambar dalam hasil survei ARSC sebagai berikut:

Gambar 7.
Alasan Memilih Calon Wali Kota



Sumber: Survei ARSC, 2020

66 Aminuddin, M. F., & Ramadlan, M. F. S. (2015). Match-All party: pragmatisme politik dan munculnya spesies baru partai politik di Indonesia pasca Pemilu 2009. *Jurnal Politik*, 1(1), 39-74. Hlm. 70

67 Diolah dari data KPU Nasional dan Provinsi

Gambar 8.
Tokoh Anutan dalam Pilihan Politik



Sumber: Survei ARSC, 2020

Pada gambar 8 menunjukkan bahwa alasan dalam memilih calon wali kota yang paling besar adalah karena figur, misalnya ia muda atau kalangan milenial, berwibawa, berpengalaman, dan alasan personalitas lainnya. Sedangkan alasan kesamaan partai politik sangat kecil, hanya sekitar 1,7 persen. Namun pada gambar 9 berkaitan dengan tokoh anutan dalam pilihan politik, sebagian pemilih di kota Medan masih menggantungkan pada tokoh partai politik, meski mayoritas pemilih masih otonom dengan mendasarkan pada pilihan sendiri. Hasil yang sama juga terjadi pada survei Poltracking di Pilwali Kota Medan pada Januari 2020 yang menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat menentukan pilihannya di pilwali karena latar belakang kandidat secara personal (54,2%) sedangkan hanya sebagian yang karena melihat partai pengusung kandidat (15,0%).⁶⁸

Perilaku memilih di kota Medan berkaitan dengan identifikasi partai ini setidaknya mengkonfirmasi studi yang selama ini berkembang bahwa identifikasi kedekatan dengan

⁶⁸ Lihat Survei Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020, Poltracking Indonesia, January 2020

partai politik (*party-ID*) belum sepenuhnya menjadi preferensi utama dalam menentukan pilihan politik, terutama berkaitan dengan kualitas dan kinerja partai politik yang buruk. Misalnya studi Burhanuddin Muhtadi mengkonfirmasi bahwa tren *party-ID* atau kedekatan dengan partai di Indonesia semakin menurun karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan elite partai. Implikasinya masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah terhadap partai.⁶⁹

Muhtadi menilai ada empat dampak buruk menurunnya kedekatan psikologis pemilih terhadap partai.⁷⁰ Pertama, tren partisipasi pemilih semakin menurun pada pemilu. Dia menunjukkan pada Pemilu 1999, pemilih yang menggunakan haknya sebesar 93,3%, lalu turun menjadi 84,9% pada 2004, dan terakhir tinggal 70,9% saja yang masih menggunakan haknya dalam pemilu legislatif pada 2009. Kedua, volatilitas dukungan yang naik turun, misalnya pada Pemilu 1999 dimenangkan oleh PDIP, Pemilu 2004 oleh Golkar, dan 2009 dimenangkan oleh Demokrat. Dari sini terlihat bahwa konsistensi dan keajegan pemenang pemilu tidak pada satu partai. Ketiga, dukungan konstituen yang tidak linier dengan keputusan atau instruksi partai. Misalnya pada pemilu legislatif dia memilih partai PDIP, namun pada pilpres dia mendukung calon yang dinominasikan oleh Partai Gerindra. Jadi tidak terdapat linieritas antara pilihan di pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Keempat, ini yang kemudian mengkhawatirkan yakni politik elektoral bertumpu pada figur atau kandidat, sehingga ongkos politik semakin besar karena berkaitan dengan biaya pencitraan, kampanye media dan sebagainya.

Alasan lain semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik tidak lain karena faktor institusionalisasi partai politik di Indonesia yang masih belum maksimal,

69 Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara "Party-ID" dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 17. Hlm. 42

70 *Ibid*, hlm. 49-50

justru yang terjadi malah personalisasi dan munculnya politik kekerabatan di dalam partai.⁷¹ Padahal agar kedekatan partai dengan pemilih in kuat, salah satunya ialah dengan cara penguatan institusionalisasi partai politik.

Selain rendahnya pertimbangan partai dalam perilaku memilih, hasil survei pada gambar 9 memberikan potret faktual bagaimana masyarakat Kota Medan mayoritas menentukan pilihan politiknya berdasarkan faktor pilihannya sendiri. Dapat kita lihat bahwa faktor pilihan sendiri yang tinggi di Kota Medan juga merupakan gambaran mayoritas masyarakat dalam menentukan pilihan politik mereka. Simpul masyarakat seperti tokoh partai, tokoh media dan tokoh agama dalam gambaran survei di atas tetap memiliki pengaruh, namun relatif rendah. Hal ini terjadi karena terdapat pergeseran format sosialisasi politik yang dilakukan oleh para kandidat atau elit politik.

Sebelumnya model sosialisasi politik yang dilakukan oleh kandidat menysasar simpul-simpul massa yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Harapannya dengan menguasai simpul massa akan berdampak pada perolehan suara dan dukungan dari massa yang terikat oleh simpul tersebut. Model politik ini kemudian teragregasi dalam model politik yang bersifat transaksional. Kandidat akan bertransaksi dengan simpul massa untuk mendapatkan suara dan dukungan dari massa yang dimiliki oleh simpul tersebut. Struktur model ini juga bersifat sangat berjenjang, kandidat/elite berkuasa - karena transaksi tertentu - terhadap simpul dan simpul akan melakukan pekerjaannya memastikan bersosialisasi kepada massanya dan mengarahkannya agar mendukung kandidat yang sudah memiliki ikatan politik dengan simpul. Jadi masyarakat mengetahui sosialisasi politik kandidat terwakili oleh simpulnya masing-masing.

71 Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS: Politik dan Kekerabatan di Indonesia*, 40(2), 138-159. Hlm. 146

Keadaan politik saat ini berbeda dengan yang terjadi di atas. Untuk tidak mengatakan bahwa praktik politik simpul hilang, posisi simpul saat ini sudah sangat cair. Maka bermain pada wilayah simpul massa kandidat harus benar-benar mampu melakukan *screening* simpul tersebut apakah memiliki pengaruh kuat pada massa yang dipimpinnya atau tidak. Diawali dengan konsep sosialisasi politik Jokowi dalam Pilwali Kota Solo tahun 2005 dengan model blusukan, paradigma sosialisasi politik juga mengalami pergeseran. Masyarakat tidak lagi mengandalkan simpul sebagai wadah pengetahuan terhadap kandidat, melainkan mereka mengharapkan kandidat yang langsung datang bersosialisasi kepada masyarakat. Pada aspek inilah masyarakat dapat menilai secara langsung kapasitas seorang kandidat apakah dia layak atau tidak memimpin suatu daerah. Maka struktur sosialisasi politik tidak lagi berjenjang melainkan dilakukan secara langsung oleh kandidat kepada pemilih. Terlebih dalam pilkada kandidat merupakan produk politik utama yang kehadirannya sangat diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat lebih melihat kepada figur daripada partai politik maupun ketokohan seseorang dalam suatu simpul massa.⁷² Oleh karenanya kandidat yang dipoles dengan baik akan mendapatkan respon positif di tengah masyarakat. Sebaliknya jika tidak, maka akan mendapatkan hasil yang mengecewakan. Tahap ini, kandidat memang harus turun secara langsung kepada masyarakat agar lebih dikenal.

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa pertimbangan partai politik dalam perilaku memilih bisa dibilang kecil dibandingkan dengan latar belakang personal kandidat. Sehingga dari sini bisa diperoleh gambaran bahwa perilaku memilih kaitannya dengan identifikasi partai tidak menjadi preferensi utama di Pilwali Kota Medan 2020.

72 Wawancara dengan Dimas Oky Nugroho, CEO ARSC. 11 Juli 2020 di Kota Medan

J. Faktor Pendukung dalam Perilaku Memilih

Preferensi politik merupakan tindakan yang mendasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan respon politik yang ada pada diri seseorang. Dalam studi politik, terutama berkaitan dengan perilaku memilih, mengetahui tentang preferensi masyarakat akan memberikan gambaran apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Studi Goldman menyebutkan bahwa dari preferensi pemilih ini memberikan tiga hal penting kaitannya dengan perilaku memilih. Pertama, sejauh mana pemungutan suara pada satu masalah terkait dengan pemungutan suara pada masalah lain; Kedua, potensi afiliasi partai kaitannya dengan prediksi pemungutan suara. Di sini afiliasi partai dilihat sebagai kerangka acuan dalam melihat preferensi pemilih; Ketiga, hubungan karakteristik demografis dengan perilaku memilih.⁷³

Faktor personal yang dialami pemilih juga berdampak terhadap perilaku memilih. Misalnya kelompok rentan yang mengalami diskriminasi cenderung pilihan politiknya akan mendukung kelompok atau partai politik yang mengusung ide-ide kesetaraan atau anti diskriminasi. Begitu pula dengan lokasi pemungutan suara berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Misalnya, memberikan hak suara di gereja membuat orang lebih cenderung memilih atau mendukung kandidat konservatif dan menentang pernikahan sesama jenis dibandingkan dengan pemungutan di tempat-tempat umum seperti sekolah.⁷⁴ Singkatnya, emosi dan juga latar belakang pemilih memberikan faktor pendukung bagaimana pemilih memutuskan pilihan politiknya.

Dalam konteks perilaku memilih di Kota Medan, setidaknya terdapat empat kategori yang bisa dipetakan. Pertama, faktor keagamaan. Kedua, faktor primordial seperti kesukuan atau

73 Goldman, S. (1966). Voting behavior on the United States courts of appeals, 1961-1964. *The American Political Science Review*, 60(2), 374-383. Hlm. 374

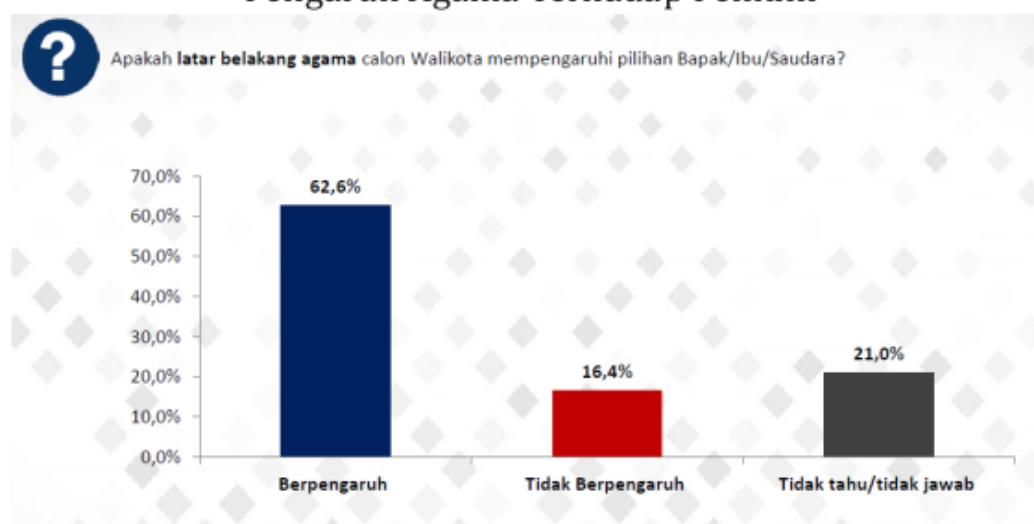
74 Bruter, M., & Harrison, S. (2017). Understanding the emotional act of voting. *Nature Human Behaviour*, 1(1), 1-3.

kedaerahan. Ketiga, faktor jenis kelamin atau gender. Keempat, faktor latar belakang pengalaman kandidat. Keempat faktor yang menjadi preferensi pemilih ini kemudian saling melengkapi dan membentuk habitus pada perilaku memilih.

1. Faktor Agama

Dalam penelitian perilaku pemilih di Indonesia kaitannya dengan pemilu nasional, maupun lokal, agama masih dianggap sebagai faktor penting dalam pembentukan pilihan politik warga negara.⁷⁵ Hal ini tidak lepas dari agama yang memberikan orientasi nilai kepada pemeluknya, termasuk dalam hal urusan politik. Sehingga keterkaitan antara agama dan politik selalu menjadi diskursus dalam kajian politik Indonesia.

Gambar 9.
Pengaruh Agama Terhadap Pemilih



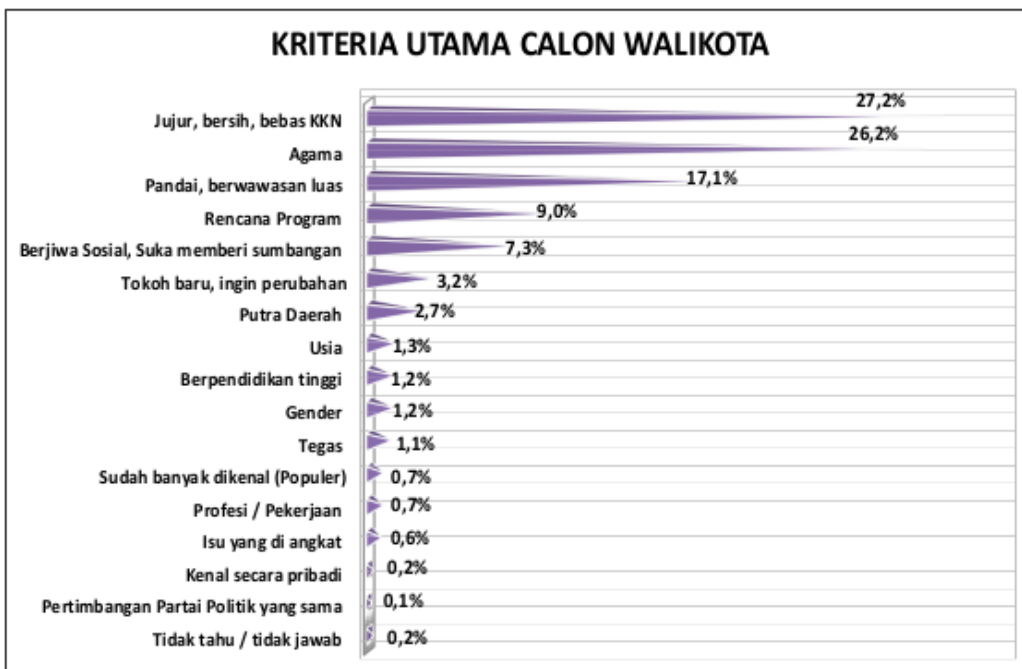
Sumber: Survei Poltracking Indonesia, 2020

Dalam konteks perilaku memilih di Kota Medan, agama juga menjadi salah satu preferensi pemilih yang dianggap penting. Pada gambar 10 di atas terlihat, ketika dikonfirmasi apakah latar belakang agama yang dianut oleh calon wali kota berpengaruh terhadap pilihan politiknya,

75 Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2019). *Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 92

mayoritas masyarakat menjawab berpengaruh. Sedangkan hanya bagian kecil yang menjawab tidak berpengaruh. Fakta ini menunjukkan bahwa pengaruh agama dalam perilaku memilih di Kota Medan sangat besar. Sedangkan ketika ditelusuri lebih jauh, agama apa yang dianut dan pasangan kandidat seperti apa yang diharapkan, mayoritas masyarakat di Kota Medan menjawab Islam dengan pasangan kandidat Muslim-Muslim, dan hanya sebagian yang mendukung Muslim-Non Muslim.⁷⁶

Gambar 10.
Kriteria Utama Calon Wali Kota



Sumber: Survei ARSC, Juni 2020

Pertimbangan agama sebagai kriteria calon Wali Kota Medan juga muncul dalam hasil survei ARSC, di mana masyarakat menyatakan agama merupakan kriteria utama dalam memilih seorang wali kota. Sedangkan wacana tentang pemimpin bersih dan bebas dari KKN yang mayoritas dijadikan kriteria memang menjadi wacana umum yang diharapkan oleh masyarakat di Kota Medan, sebab tiga dari wali kota yang pernah menjabat tersandung

⁷⁶ Lihat Survei Poltracking Indonesia Pada Pilwali Kota Medan 2020, January 2020

kasus korupsi.⁷⁷ Pertama, Abdullah yang menjabat walikota periode 2005-2010 tersandung kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 2005 serta kasus penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan 2002-2006. Kedua, Rahudman Harahap Walikota Medan periode 2010-2015 terjerat kasus korupsi berkaitan dengan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan 2005 sebesar Rp 1,5 miliar untuk kepentingan pribadi. Ketiga, Dzulmi Eldin yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga menerima sejumlah uang suap dari kepala dinas Pemerintah Kota Medan. Sehingga tidak heran pertimbangan kandidat yang bersih dari KKN menjadi isu utama yang diharapkan oleh masyarakat.

Gambaran survei di atas terlihat bahwa alasan sosiologis dan rasional masih mendominasi kriteria yang diharapkan oleh masyarakat Kota Medan melekat dalam diri seorang kandidat. Terma bersih dari kasus hukum, jujur dan tidak KKN masih menjadi kriteria utama seorang kandidat agar dapat dipilih oleh masyarakat. Sedangkan alasan agama menjadi kriteria selanjutnya yang harus dihadirkan. Data tersebut menunjukkan bahwa 26,2% masyarakat Kota Medan menjadikan faktor agama sebagai landasan dalam menentukan pilihan politik di Pilwali Kota Medan. Tidak heran jika kemudian isu-isu keagamaan relatif santer terdengar dalam portofolio kontestasi di Pilwali Kota Medan. Isu Komunisme yang dilekatkan dalam rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila menjadi salah satu itu yang menjembatani alasan sosiologis yang melekat pada perilaku memilih masyarakat Kota Medan. Isu yang menyerang salah satu partai tersebut saat ini belum

⁷⁷ CNN Indonesia, "Tiga Wali Kota Medan Berturut-turut Terjerat Korupsi" diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191016165658-12-440068/tiga-wali-kota-medan-berturut-turut-terjerat-korupsi> 13 08 2020

memiliki relevansi pengaruh di masyarakat, terutama di masyarakat Kota Medan.⁷⁸

Isu agama merupakan strategi utama yang banyak dijadikan konsumsi kandidat dalam melakukan upaya *downgrade* elektabilitas lawan. Sebagaimana kita ketahui bahwa isu HIP (Haluan Ideologi Pancasila) merupakan isu turunan dari ranah nasional yang dibawa ke daerah. Bukan hanya di Kota Medan tapi di banyak wilayah yang sedang melakukan persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020. Pembelahan dukungan politik nasional pasca Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019 juga saat ini masih terjadi di tengah masyarakat, sebagaimana yang tergambar dalam Pilgub Sumut 2018.

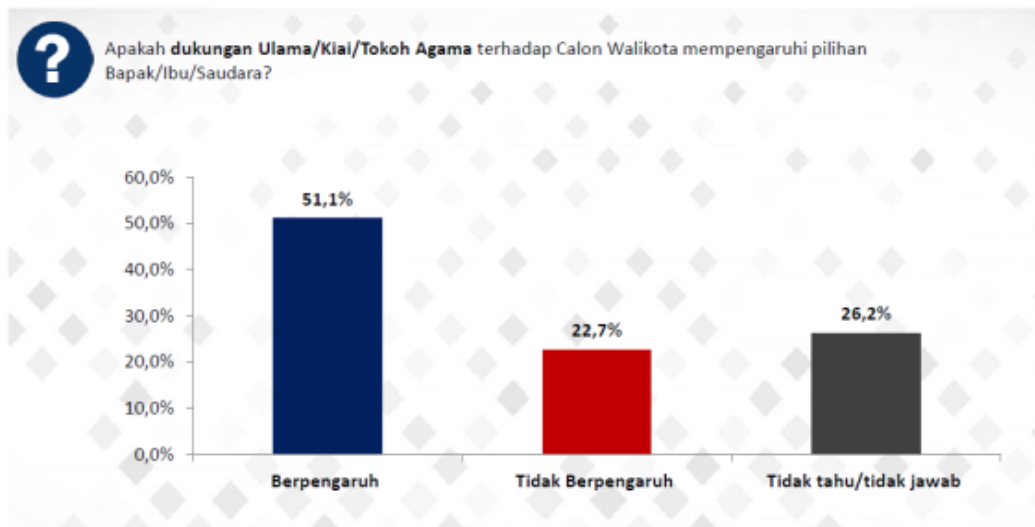
Terlihat dalam kontestasi politik di daerah bahwa pembelahan politik yang terjadi dapat ditelusuri dengan menganalisis kesamaan data dari perolehan hasil suara pada kontestasi politik. Sejak pilgub DKI 2017 pelaksanaan pilkada di daerah memiliki kecenderungan ke arah perlawanan yang bersifat *vis a vis*, kubu Ahok-Djarot yang diwakili oleh partai PDI-P dan kelompok-kelompok pemilih rasional dan kubu Anies-Sandi yang diwakili oleh partai Gerindra dan PKS serta kelompok pemilih yang bersifat sosiologis. Vedi Hadiz pun memberikan pernyataan bahwa politik identitas di Indonesia sejuaksaat itu mulai menggeliat, meskipun dalam analisisnya dia mengatakan bahwa bentuk penguatan dari gambaran gerakan populisme Islam di Indonesia masih terlihat seperti simptom-simptom yang belum mengarah ke gelombang gerakan populisme Islam sebagaimana yang banyak terjadi di Timur Tengah.

Hasil Pilgub Sumatera Utara pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang hampir sama dalam tatanan komposisi dukungan antar kandidat. sebagaimana yang terjadi dalam perhelatan Pilgub DKI 2017. Pilgub Sumut

78 Wawancara dengan Sutardi, Tim supervisi lapangan ARSC

tahun 2018 diikuti dua pasangan kandidat. Pertama, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang didukung oleh Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem dan Hanura. Kedua, pasangan Djarot Saiful H- Sihar Sitorus yang didukung oleh partai PDI-P, PPP dan PSI.

Gambar 11.
Pengaruh Dukungan Tokoh Agama



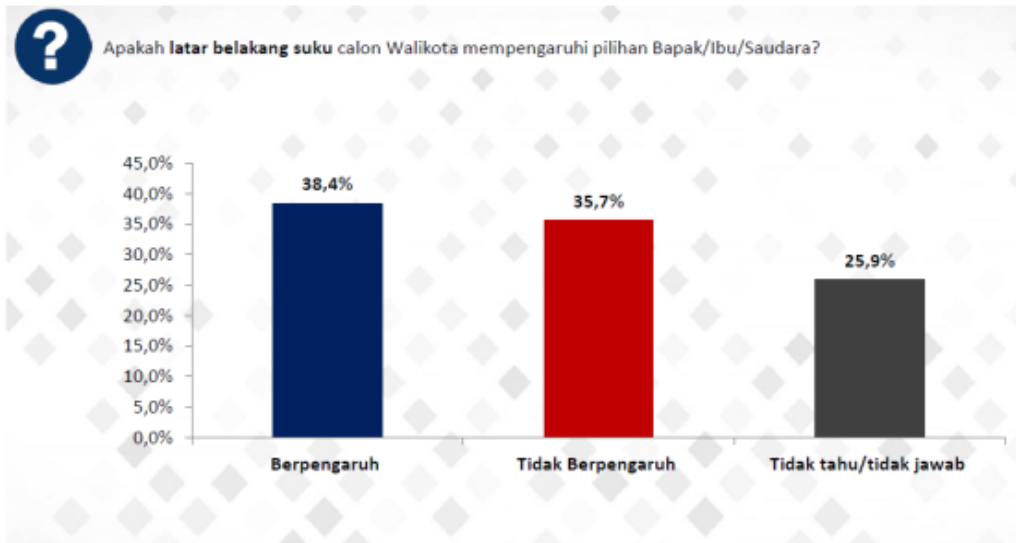
Sumber: Survei Poltracking Indonesia, 2020

Faktor agama yang dianggap penting dalam perilaku memilih ini kemudian juga berkaitan dengan posisi strategis pemuka agama di dalam politik elektoral, termasuk dalam pemilihan Wali Kota Medan. Gambar 12 di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Medan menganggap dukungan tokoh agama terhadap calon walikota berpengaruh terhadap pilihan politiknya. Tokoh agama di sini bisa ulama atau ustaz di kalangan Muslim, pendeta di kalangan Protestan atau pastor di kalangan Katolik. Implikasi dari kuatnya posisi agama ini kemudian membuat para kontestan berebut dukungan para tokoh agama, mulai dari mendatangi tempat ibadah, meminta restu, hingga menjadikan para tokoh agama terlibat dalam kampanye politik. Tujuan satu, yakni merebut simpati masyarakat agar disukai dan dipilih oleh masyarakat.

2. Faktor Etnisitas/ Kedaerahan

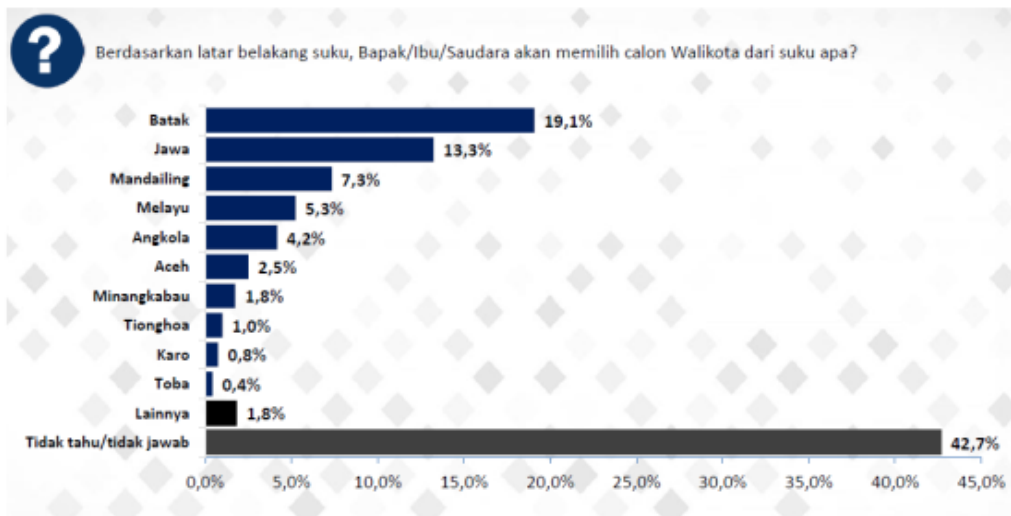
Faktor pendukung berikutnya juga berkaitan dengan identitas etnis atau kedaerahan. Pada masyarakat Kota Medan yang multikultur, tampak bawah pertimbangan suku menjadi salah satu yang menentukan dalam perilaku memilih.

Gambar 12.
Pengaruh Latar Belakang Suku



Sumber: Survei Poltracking Indonesia, 2020

Gambar 13.
Latar Belakang Suku yang Dipilih



Sumber: Survei Poltracking Indonesia, 2020

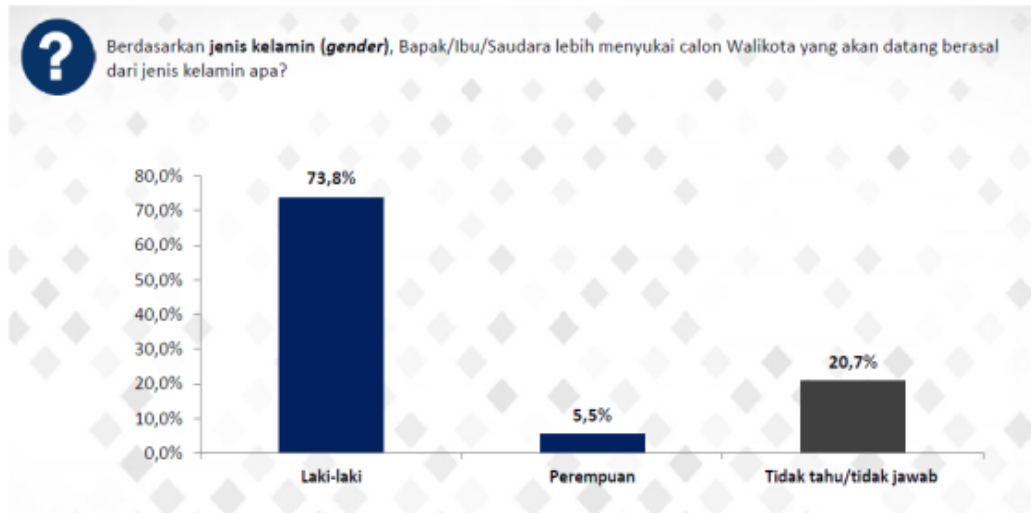
Pada gambar 13 menunjukkan bahwa sebesar 38,4 persen masyarakat Kota Medan menyebutkan bahwa latar belakang suku calon berpengaruh terhadap pilihan politiknya. Sedangkan sebesar 35,7 persen menyebutkan tidak berpengaruh. Data ini menunjukkan bahwa satu sisi masyarakat Medan dengan perkembangan kota yang maju dan menerima adaptasi perubahan dan modernitas kota menempatkan kesukuan sebagai sesuatu yang tidak terkait dengan kepemimpinan kota. Berkembangnya modernitas ini sedikit banyak berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat menilai kepemimpinan politik. Di sisi yang lain, kuatnya komunitas etnis atau suku yang ada di Kota Medan juga memberikan internalisasi nilai bagi masyarakat. Itu sebabnya sebagian masyarakat menilai latar belakang suku calon wali kota berpengaruh terhadap pilihan politiknya.

Kemudian ketika diperdalam lebih jauh suku apa yang akan dipilih, pada gambar 14 menunjukkan sebesar 19,1 persen memilih suku Batak, 13,3 persen memilih suku Jawa, dan 7,3 persen memilih suku Mandailing, serta 5,3 persen memilih suku Melayu. Data preferensi suku ini muncul tidak lepas dari identitas yang ditonjolkan mengikuti suku apa yang menjadi identitas para pemilih. Misalnya, orang Jawa secara psikologis akan cenderung memilih orang Jawa sebagai pemimpinnya. Demikian dengan orang Batak akan memilih orang Batak juga sebagai pemimpin. Meskipun dalam kasus pemilihan, pengaruh etnisitas ini hanya terbatas dan cenderung tidak konsisten.⁷⁹

79 Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2019). *Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 116

3. Faktor Jenis Kelamin

Gambar 14.
Faktor Jenis Kelamin (Gender)



Sumber: Survei Poltracking Indonesia, 2020

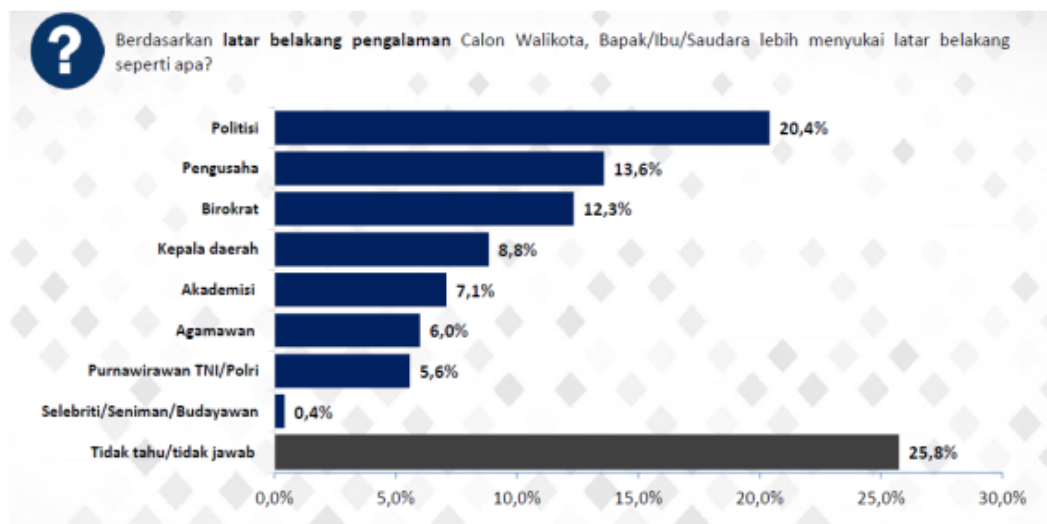
Selain faktor agama, dan etnis, faktor lain yang menggambarkan perilaku memilih masyarakat Kota Medan ialah berkaitan dengan jenis kelamin. Pada aspek jenis kelamin, berdasarkan survei Poltracking Indonesia pada Pilwali Kota Medan menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat di kota Medan sebesar 52,8 persen menyebutkan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap pilihannya dan hanya 26,8 persen yang menyebutkan tidak berpengaruh. Sedangkan jenis kelamin apa yang disukai, pada gambar 15 terlihat mayoritas pemilih di Kota Medan menyukai laki-laki sebesar 73,8 persen. Sedangkan hanya bagian kecil, yakni 5,5 persen yang menyukai perempuan.

Besarnya dukungan pemilih terhadap jenis kelamin laki-laki ini setidaknya menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, sistem keterbukaan politik dan syarat keterwakilan perempuan belum sepenuhnya membawa implikasi terhadap menipisnya patriarki di kalangan masyarakat, termasuk di tingkat politik lokal. Pemerintah Indonesia melalui regulasi pemilu dan partai politik mensyaratkan setidaknya keterwakilan 30 persen di dalam kepengurusan

partai politik maupun calon legislatif. Namun demikian regulasi ini belum sepenuhnya membawa perubahan besar, meski pada tataran regulasi sudah cukup menjembatani agar ada keterwakilan perempuan. Kedua, sistem sosial di masyarakat, baik itu berkaitan dengan budaya maupun agama masih cenderung patriarki, di mana laki-laki dianggap lebih superior dibandingkan perempuan.⁸⁰ Dari sini terlihat bahwa corak perilaku memilih kota Medan masih menggambarkan karakter psikologis, dimana atribut berkaitan dengan identitas gender masih menjadi salah satu acuan dalam menentukan pilihan politiknya.

4. Faktor Latar Belakang Kandidat

Gambar 15.
Latar Belakang Pengalaman Kandidat

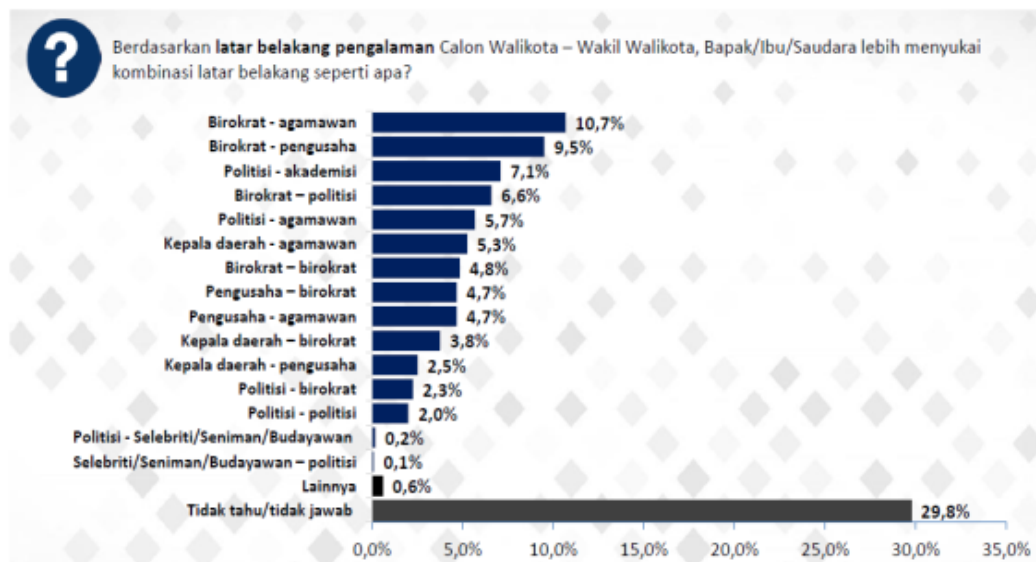


Sumber: Survei Poltracking Indonesia, 2020

80 Nurcahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 6(01), 25-34. Hlm. 25

Gambar 16.

Kombinasi Kandidat berdasar Latar Belakang



Sumber: Survei Poltracking Indonesia, 2020

Adapun pada faktor latar belakang pengalaman kandidat, sebagaimana dalam gambar 16 menunjukkan bahwa masyarakat Kota Medan lebih menyukai dari kalangan politisi yakni sebesar 20,4 persen, berikutnya pengusahaan 13,6 persen dan birokrat 12,3 persen. Sedangkan kombinasi yang diharapkan, pada gambar 17 tertera bahwa yang tertinggi adalah kombinasi birokrat-agamawan sebesar 10,7 persen, birokrat-pengusaha 9,5 persen dan politisi-akademisi 7,1 persen.

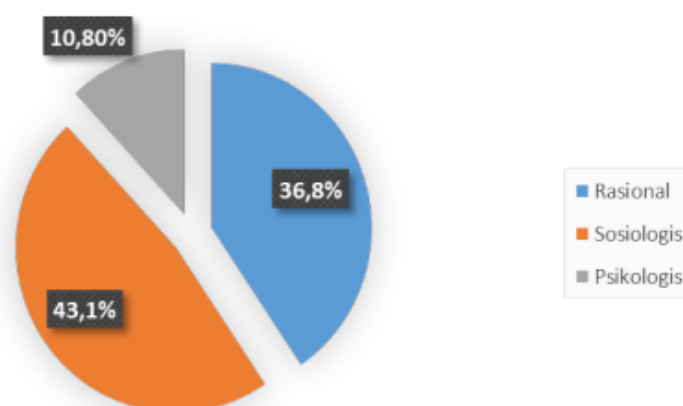
Dari faktor latar belakang pengalaman kandidat ini, terlihat bahwa perilaku memilih di Kota Medan cenderung menyukai politisi, namun demikian mereka juga menginginkan kombinasi agamawan dalam pemerintahan kota Medan. Tren tokoh agama atau agamawan yang diinginkan oleh masyarakat kota Medan ini sebenarnya muncul tidak lain salah satunya dipengaruhi oleh arus besar wacana populisme agama yang muncul dalam panggung politik nasional, misalnya pada kasus Pilgub DKI Jakarta 2017, Pilgub Sumut 2018, dan Pilpres 2019. Pada periode kedua Jokowi, dia menggandeng Ma'ruf Amin yang merupakan ulama dan tokoh penting di NU. Tujuannya

salah satunya untuk membuktikan bahwa Jokowi tidak anti terhadap kelompok Islam seperti yang dituduhkan beberapa kalangan. Secara garis besar, Jokowi merespon kuatnya wacana politik agama dengan menghadirkan tokoh agama ke dalam proses politik pilpres, sebagaimana yang juga dilakukan Prabowo dengan aliansi PKS dan beberapa kelompok Islam lainnya. Kami menilai, tiga momentum pemilihan tersebut yang memunculkan populisme agama ke dalam panggung politik sedikit banyak berpengaruh dalam tren politik yang ada di daerah, termasuk di Kota Medan. Muncul kemudian sentimen identitas agama yang menguat. Artinya di sini perilaku pemilih yang menginginkan tokoh agama masuk menjadi bagian dari kandidasi sedikit banyak dipengaruhi oleh arus politik yang sedang berlangsung sebelumnya.

K. Komposisi Pemilih Rasional, Sosiologis, dan Psikologis

Perilaku memilih masyarakat Kota Medan kaitannya dengan pemilihan wali kota memang tampak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang cenderung karena faktor rasional, sosiologis, maupun psikologis. Namun secara umum kami menemukan bahwa faktor sosiologis yang cukup dominan dalam perilaku memilih masyarakat.

Gambar 17.
Komposisi Perilaku Memilih Kota Medan
Presentase Pemilih Rasional, Sosiologis, dan Psikologis



Sumber: Survei ARSC, 2020

Faktor sosiologis, merujuk pada aspek yang dikemukakan Mujani, Liddle dan Ambardi penggerak utamanya adalah perbedaan dalam hal jenis kelamin, usia, etnis, daerah tempat tinggal, agama, dan kelas sosial. Sedakan faktor rasional lebih kepada pertimbangan “untung” dan “rugi”, di mana pemilih merasa keterlibatannya dalam pemilihan untuk memperjuangkan kepentingan mereka melalui representatif mereka atau pemimpin mereka.⁸¹ Adapun faktor psikologis cenderung pada pertimbangan keterikatan/dorongan psikologis yang membentuk orientasi politik seseorang. Ikatan psikologis tersebut disebabkan adanya perasaan kedekatan dengan partai atau kandidat.⁸²

Pada gambar 18 ditemukan perilaku memilih masyarakat Kota Medan dalam pilwali mayoritas kecenderungannya sosiologis yakni sebesar 43,1 persen. Faktor sosiologis yang besar ini setidaknya berasal dari dua kontribusi, yakni agama dan etnisitas.

Pertama, konstruksi agama masih menjadi bagian dari preferensi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya di Kota Medan. Hal ini tampak dari berbagai anasir dan wacana yang mengemuka di kalangan para pemilih. Misalnya, tentang pemimpin yang berlatar belakang Islam, atau dukungan pemuka agama yang dianggap mempengaruhi dalam dukungan politik. Agama, sebagai sumber ajaran yang memuat nilai-nilai bagi pemeluknya, sedikit banyak akan memberikan inspirasi bagi pemeluknya dalam pemberian dukungan politik, meski dalam banyak catatan pengaruh ini terbatas dan tidak konsisten dalam perilaku memilih. Misalnya kaitan dengan dukungan partai politik pasca reformasi, justru mayoritas pemilih di Indonesia masih mendukung partai-partai sekuler maupun partai nasionalis, seperti Golkar, PDIP maupun Gerindra.

81 Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2019). *Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 182

82 Haryanto, H. (2014). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(3), 291-308, hal. 291

Namun demikian, penggunaan isu agama yang muncul dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) di beberapa daerah menunjukkan bahwa isu agama masih relevan dan terus berkembang. Penelitian Ramadhan dan Masykuri menunjukkan sepanjang pemilukada 2015-2018 terdapat isu agama yang muncul, mulai dari isu larangan memilih pemimpin non-Muslim seperti di Pilgub Sulawesi Utara 2015, Pilwali Kota Solo 2015, dan Pilgub DKI Jakarta 2017, hingga kasus himbauan agar memilih pasangan Muslim-Muslim seperti Pilkada Sumatera Utara 2018. Mereka menyimpulkan bahwa penggunaan isu agama ini tidak lepas dari dua hal, yakni konteks sosial-politik di daerah dan berikutnya konteks kompetitor. Konteks sosio-politik merujuk pada historisitas daerah tersebut kaitannya dengan konflik agama di masa lalu. Sedangkan konteks kompetitor berkaitan dengan formasi kandidat yang terdapat dari kalangan kelompok agama minoritas tertentu, seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI Jakarta 2017 yang berasal dari Kristen-Tionghoa dan Sihar Sitorus di Pilgub Sumut 2018 yang berasal dari Kristen.⁸³

Menguatnya konstruksi agama yang masih menjadi bagian preferensi pemilih di Kota Medan ini kami menilai tidak lepas dari arus penggunaan isu agama yang muncul dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya, terutama pada Pilgub DKI Jakarta 2017, Pilgub Sumut 2018 dan Pilpres 2019. Apalagi isu agama yang muncul di DKI Jakarta menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat elektabilitas Ahok. Dalam *exit poll* Indikator, pemilih Jakarta yang puas terhadap kinerja Ahok tapi tidak memilihnya yakni 54,5 persen lantaran faktor agama sebagai pertimbangan utama dalam memilih.⁸⁴

Adanya pengaruh penggunaan identitas agama yang berlangsung pada pemilihan sebelumnya juga diungkapkan serupa oleh Dimas Oky:⁸⁵

83 Ramadhan, F. S., & Masykuri, R. (2018). Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 249-265. Hlm. 262

84 Muhtadi, B. (2018). "Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional". *MAARIF Journal*, 13(2), 68-86. Hlm, 75

85 Wawancara dengan Dimas Oky Nugroho, CEO ARSC. 11 Juli 2020 di Kota Medan

“Menguatnya pertimbangan agama pada perilaku memilih masyarakat Kota Medan memang ada konteks turunan politik dari pilgub DKI 2017, Pilgub Sumut 2018, dan Pilpres 2019. Hal itu tercermin dari isu-isu agama yang muncul di masyarakat,”

Kedua, selain faktor agama, besarnya kecenderungan perilaku pemilih sosiologis di Kota Medan ini juga disumbang oleh aspek etnisitas atau kesukuan. Dalam survei Poltracking Indonesia dan juga ASRC, faktor etnisitas muncul dalam preferensi pemilih, meskipun tidak sebesar faktor agama. Faktor etnisitas tetap berkembang dan menjadi salah satu preferensi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

Dalam studi Muhtadi, etnisitas bisa muncul sangat bergantung pada bagaimana dinamika politik lokal yang berkembang. Dia mencontohkan, dalam kasus Pilgub Sulawesi Utara 2015, justru efek etnisitas tidak begitu besar dibanding faktor agama dan personal kandidat. Salah satu alasannya karena seluruh calon gubernur Sulawesi Utara waktu itu berasal dari etnik Minahasa semua. Oleh karena itu, signifikansi etnis rendah. Tapi berbeda dengan kasus yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta tahun 202, di mana Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli yang sama-sama berasal dari Betawi. Sedangkan lawannya adalah Joko Widodo (Jokowi) yang berasal dari Jawa dan berpasangan dengan politisi yang berlatar belakang Kristen Tionghoa, Ahok. Perilaku memilih dalam pilgub DKI Jakarta 2012 tampak bawah pengaruh etnis cukup signifikan. Misalnya, pemilih dari etnis Jawa dan Tionghoa cenderung memilih Jokowi-Ahok dibanding Fauzi-Nachrowi. Sebaliknya, pemilih Betawi cenderung memilih Fauzi-Nachrowi dibanding Jokowi-Ahok.⁸⁶

Dalam konteks Sumatera Utara, etnisitas menjadi bagian dari politik lokal sudah berkembang sejak isu desentralisasi menguat pasca reformasi. Misalnya, dalam catatan Damanik, mobilisasi etnisitas digunakan untuk memekarkan Kabupaten Dairi yang kemudian menghasilkan Kabupaten Pakpak Barat

86 Muhtadi, B. (2018). "Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional". MAARIF Journal, 13(2), 68-86. Hlm. 84

pada tahun 2003. Damanik menyebutkan, etnis Pakpak mengalami peminggiran secara politik dalam beberapa hal. 1) atribut-atribut kultural yang ada di Kabupaten Dairi lebih banyak menonjolkan identitas atribut etnik lain ketimbang Pakpak; 2) eksklusivitas pada aspek etno-religio yakni dominasi institusi agama (Protestan) dari etnik imigran; 3) etnis Pakpak terpinggirkan dalam ruang politik yang ada di Kabupaten Dairi, misalnya untuk menjadi kepala daerah, pejabat daerah maupun menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN); 4) etnik Pakpak di Dairi mengalami keterbelakangan ekonomi sebagai akibat dari peminggiran politik yang berlangsung.⁸⁷ Melalui kondisi peminggiran politik ini, kemudian para elite politik dan masyarakat yang berasal dari Suku Pakpak menjadikan etnisitas sebagai konstruksi sosial guna menghasilkan daya ledak dalam membangun gerakan politik pemekaran daerah dan terbukti tahun 2003 terbentuklah Kabupaten Pakpak Barat.⁸⁸

Sedangkan dalam konteks pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara pada 2018, lapisan isu agama dan etnis bekerja dalam satu ritme dalam rangka memperebutkan suara pemilih. Pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) selain menggunakan isu agama, juga menggunakan isu etnisitas. Misalnya Edy Rahmayadi yang mengklaim diri sebagai etnik Melayu Langkat sementara Musa Rajekshah mengklaim sebagai Melayu Batubara. Demikian pula Musa Rajekshah mengaku bahwa dirinya termasuk bagian dari etnik Jawa melalui Istrinya. Sementara itu, Edy Rahmayadi mengklaim diri sebagai etnik Mandailing melalui istrinya. Demikian dengan pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus (Djoss) yang juga memainkan ritme etnis untuk memperebutkan pemilih yang berasal dari etnik Jawa dan Toba.⁸⁹

Bagaimana posisi pemilih yang rasional dan psikologis? Kecenderungan pemilih rasional berada pada urutan kedua di Kota Medan, di mana berdasarkan survei ARSC berada di angka

87 Damanik, E. L. (2018). Politik Lokal: Dinamika Etnisitas pada era Desentralisasi di Sumatera Utara. Medan: *Simetri Institute*, hlm. 128

88 *Ibid*, hlm. 144

89 *Ibid*, hlm. 293

36,8 persen sedangkan perilaku memilih psikologi berada pada urutan terakhir dan angkanya cukup kecil, yakni 10,80 persen.

Tindakan memilih rasional (*rational choice*) bertumpu pada kepentingan ekonomi di mana seorang melakukan sesuatu didasarkan pada asas-asas ekonomi. Oleh karena itu, dalam tindakan rasional yang dipertanyakan adalah soal untung rugi dari tindakan tersebut.⁹⁰ Dalam studi elektoral, tindakan rasional juga dihubungkan dengan aspek kinerja pemerintah (petahana) sebagai dasar evaluasi dalam memberi *reward* atau *punishment*.⁹¹

Gambar 18.

Program yang dianggap tidak berhasil



Sumber: Survei ARSC, 2020

Pemilih rasional di Kota Medan memang ditopang oleh semakin kritisnya masyarakat melakukan evaluasi program pemerintah. Pada gambar... pemilih secara kritis melakukan penilaian aspek mana dari kinerja pemerintah yang dianggap tidak berhasil. Misalnya soal penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga bahan pokok, maupun penciptaan lingkungan

90 Bartels, L. M. (2010). The study of electoral behavior. *The Oxford handbook of American elections and political behavior*, 239-261. Hlm. 314

91 Muhtadi, B. (2018). "Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional". *MAARIF Journal*, 13(2), 68-86. Hlm. 71

pemerintahan daerah yang bertumpu pada transparansi dan akuntabilitas. Dari sini terlihat sebagian pemilih yang rasional, mendasarkan pilihannya pada visi-misi dan program kandidat dalam pembangunan daerah. Melalui ini pemilih hendak melihat apakah program yang ditawarkan bisa memberikan keuntungan terhadap dirinya. Pertanyaan yang muncul di benak pemilih; bagaimana mengatasi persoalan pandemi Corona, bagaimana membuka peluang kerja, bagaimana mengatasi persoalan korupsi dan lain-lain. Dari sini terlihat karakter pemilih rasional sadar atas pilihan politiknya terkait langsung dengan kepentingan masyarakat jangka panjang.

Sedangkan pemilih psikologis bisa dibilang jumlahnya cukup kecil di Kota Medan. Sebagaimana dijelaskan di awal, 29 milih psikologis bertumpu pada tiga hal utama: (1) Persepsi terhadap kandidat, (2); persepsi terhadap tema tema yang diangkat dan (3); identifikasi kedekatan dengan partai politik.⁹² Pasa aspek kedekatan dengan kandidat, hanya sebagian pemilih yang mengaku dekat dengan calon kandidat yang muncul, dan itu masih samar-samar. Kondisi ini kami menilai cukup wajar mengingat belum ada penetapan resmi pasangan calon yang akan berkompetisi. Sehingga informasi berkaitan dengan calon yang akan mengikuti pilwali masih sebatas dari media massa, spanduk, maupun informasi dari ruang publik, seperti warung kopi, maupun komunitas masyarakat.

Sedangkan konteks kedekatan dengan partai, sebagaimana diulas sebelumnya, hal ini tidak lepas dari menurunnya tingkat *party-ID* secara nasional. Artinya, ini terjadi tidak hanya di Kota Medan melainkan di berbagai daerah masyarakat merasa tidak dekat dengan partai karena citra partai sendiri, misalnya lemahnya pelembagaan partai, perilaku koruptif yang dilakukan oleh anggota partai, hingga buruknya kinerja kader partai yang ada di eksekutif maupun legislatif.

92 Roth, D. (2008). Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode. J - karta: *Für Die Freiheit*. Hlm. 24

Kesimpulan dari bab ini kami menemukan bahwa komposisi perilaku pemilih di pilwali Kota Medan 2020 masih didominasi oleh perilaku pemilih sosiologis dengan aspek preferensi agama, etnisitas, dan gender. Sedangkan perilaku memilih rasional juga muncul yang ditandai dengan preferensi pada visi-misi dan program kandidat. Corak pada pemilih rasional ini ditandai dengan cukup kritisnya mereka pada evaluasi program pemerintah, mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, politik, maupun tata kelola pemerintahan daerah. Adapun perilaku memilih yang psikologis porsinya sangat kecil, yang ditandai dengan sedikitnya pemilih yang merasa menjadi bagian dari partai politik maupun kedekatan dengan kandidat.

L. Kompleksitas Perilaku Memilih

Memahami perilaku memilih memang sepenuhnya tidak dapat dijelaskan pada satu aspek, atau tidak sepenuhnya bisa disimpulkan dalam satu garis linier. Perilaku memilih memiliki kompleksitas tersendiri. Misalnya, ada sebagian pendapat yang berasumsi bahwa pemilih di daerah perkotaan—dengan sumberdaya memadai berupa akses informasi dan internet yang terbuka, tingkat pendidikan yang cukup merata dan atribut modernitas kota lainnya— cenderung kepada tipologi pemilih rasional, namun demikian fakta di lapangan tidak sesederhana itu.

Studi Burhanuddin Muhtadi dalam kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan survei tingkat kepuasan atas kinerja petahana (Ahok) sangat besar, namun pemilih enggan untuk memilih kembali sebagai gubernur lantaran faktor agama dan etnis. Gap antara yang puas dan kedipilihan dalam survei ini muncul jauh sebelum insiden Al Maidah dan aksi 212. Para pemilih mengakui bahwa Ahok bekerja dengan baik dalam tata kelola pemerintahan, tapi mereka enggan memilih lantaran identitas Ahok yang berlapis, Kristen dan juga Tionghoa. Jika mengikuti asumsi yang berkembang pada pemilih perkotaan yang cenderung rasional, dengan survei tingkat kepuasan atas kinerja Ahok yang mencapai 73,4 persen, maka elektabilitas

Ahok juga akan mencapai 70 persen lebih. Tapi faktanya pada hasil pemilihan, Ahok-Djarot hanya memperoleh 42,99 persen di putaran pertama, dan putaran kedua 42,04 persen. Berdasarkan ini kemudian Muhtadi menyebut pemilih rasional dalam kasus Pilgub Jakarta 2017 hanyalah mitos.⁹³ Sebagai mitos, ia hanya bekerja pada level keyakinan, tapi faktanya tidak demikian.

Apa yang terjadi pada perilaku pemilih Kota Medan juga menggambarkan kompleksitas. Misalnya mayoritas pemilih menganggap ia tidak bisa dipengaruhi oleh tokoh tertentu dalam menentukan pilihannya, itu sebabnya ketika disodorkan siapa yang menentukan terhadap pilihannya adalah diri sendiri. Tampak disini pemilih sangat otonom dan tidak terikat dengan jaring klientelisme politik. Namun demikian, ketika ditanya apakah dukungan tokoh agama terhadap kandidat berpengaruh terhadap pilihan politiknya, mayoritas pemilih menjawab berpengaruh. Dari sini terlihat bahwa pemilih hendak menunjukkan sikap otonomnya sebagai warga, namun disisi lain ketika berkaitan dengan atribut agama ia hendak menunjukkan sikap loyal terhadap agama sehingga dukungan ulama dianggap berpengaruh.

Kompleksitas lain juga muncul pada program atau isu yang diharapkan oleh pemilih terhadap kandidat. Terdapat tiga program yang cukup tinggi nilainya yang diharapkan oleh pemilih, yakni penciptaan lapangan kerja, pemerintahan bersih dari korupsi, dan pengendalian harga bahan pokok. Namun ketika bergeser pada aspek kriteria utama calon wali kota, salah satu yang cukup tinggi diajukan oleh pemilih justru faktor agama. Artinya, jika memang lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, semestinya preferensi yang dominan diajukan pemilih pada isu atau program yang ditawarkan kandidat, bukan faktor agama. Oleh karena itu, hal ini kemudian memberikan penjelasan bahwa memahami perilaku pemilih akan menemukan kompleksitas tersendiri.

93 Muhtadi, B. (2018). "Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional". *MAARIF Jou - nal*, 13(2), 68-86. Hlm. 71

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari berbagai sub bab yang ada di atas, setidaknya kami menyimpulkan beberapa hal penting dalam penelitian ini. *Pertama*, perilaku memilih masyarakat dalam Pilwali Kota Medan didominasi oleh perilaku pemilih sosiologis, yang terdiri dari faktor agama, etnis, maupun gender. Perilaku sosiologis ini menampilkan bagaimana pemilih cenderung dipengaruhi oleh berbagai konstruksi sosial dan lingkungan sekitar. Misalnya, kuatnya preferensi agama. *Kedua*, perilaku pemilih rasional cukup besar meski tidak sebesar faktor sosiologis. Hadirnya pemilih rasional ini tidak lain karena pemilih menginginkan perubahan riil atas pembangunan daerah dan kesejahteraan warga. Salah satu isu atau program yang mengemuka dari pemilih rasional yang cukup tinggi ialah soal pembukaan lapangan pekerjaan, integritas dan penciptaan *good governance*, dan juga soal pengendalian harga bahan pokok. Sedangkan pemilih psikologis juga muncul, tapi tidak cukup signifikan. Pemilih psikologis yang salah satunya ditandai dengan kedekatan dengan partai tidak banyak muncul pada pemilih di Kota Medan.

Ketiga, tingginya pemilih sosiologis dipengaruhi faktor utama yakni kuatnya preferensi agama pada perilaku memilih di Kota Medan. Mayoritas pemilih menganggap agama dan juga dukungan tokoh agama terhadap kandidat menjadi bagian pertimbangan dalam menentukan pilihan politiknya. Kuatnya preferensi agama ini kami menilai tidak lepas dari konsekuensi turunan politik identitas yang berlangsung pada Pilgub DKI 2017, Pilgub Sumut 2018, dan Pilpres 2019. Isu agama yang mengemuka berupa pentingnya memilih pemimpin muslim, larangan memilih dari kalangan yang tidak seagama, hingga klaim-klaim tentang mewakili kepentingan Islam sedikit banyak memberi pengaruh atas perkembangan politik lokal, termasuk di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., TR, M. R., & Mustofa, M. U.¹⁹ "Pemilu dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis di Indonesia: sebuah tinjauan teoritis politik identitas" *Jurnal Bawaslu* Vol. 3 (2). 269-284
- Aminuddin, M. F., & Ramadlan, M. F. S. (2015). Match-All party: pragmatisme politik dan munculnya spesies baru partai politik di Indonesia pasca Pemilu 2009. *Jurnal Politik*, 1(1), 39-74.
- Bartels, L. M. (2010). The study of electoral behavior. *The Oxford handbook of American elections and political behavior*, 239-261.⁹
- Basya, M. H. (2019). Populisme Islam, Krisis Modal Sosial dan Tantangan Terhadap Demokrasi: Refleksi Pemilu 2019. *MAARIF Journal*, 14(1), 43-59.
- Bruter, M., & Harrison, S. (2017). Understanding the emotional act of voting. *Nature Human Behaviour*, 1(1), 1-3.
- Castells, M. (2003). Manuel Castells, *The Power of Identity: The Information Age, Economy, Society, and Cultural*, cet. ke-2, Blackwell Publishing, Australia.
- Fernandes, A. (2018). Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas. *CSIS Election Series No.1*.

- Fox, C., & Menchik, J. (2011). The Politics of Identity in Indonesia: Results from Campaign Advertisements. In *APSA 2011 Annual Meeting Paper*.
- Goldman, S. (1966). Voting behavior on the United States courts of appeals, 1961-1964. *The American Political Science Review*, 60(2), 374-383. Hlm. 374
- Goren, P. (2005). Party identification and core political values. *American Journal of Political Science*, 49(4), 881-896.
- Gueorguiev, D., Ostwald, K., & Schuler, P. (2018). Rematch: Islamic politics, mobilisation, and the Indonesian presidential election. *Political Science*, 70(3), 240-252.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1).
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Harahap, F.R. (2014). "Politik Identitas Berbasis Agama". *Prosiding Sosiologi Konflik dan Politik Identitas*. Yogyakarta.
- Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS: Politik dan Kekerabatan di Indonesia*, 40(2), 138-159. Hlm. 146
- Harrop, M. (1987). *Elections and voters: a comparative introduction*. Macmillan International Higher Education.
- Haryanto, H. (2014). Kebangkitan Partai ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(3), 291-308., hlm 293
- Hayward, C. R., & Watson, R. (2010). *Identity and political theory*. Wash. UJL & Pol'y, 33, 9.
- Hemay, I., & Munandar, A. (2016). Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih. *POLITIK*, 12(1), 1737.
- Heywood, A. (2017). *Political ideologies: An introduction*. Macmillan International Higher Education.

- Johnson, J. B., Reynolds, H. T., & Mycoff, J. D. (2015). *Political science research methods*. Cq Press.
- Jumadi. (2003). *Fenomena Etnis Dalam Proses Rekrutmen Elit Politik Lokal: Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Kalbar 2000-2005*. Tesis UGM: Yogyakarta, 2003.
- 21 Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1944). *The people's choice: how the voter makes up his mind in a presidential campaign* (New York, Duell, Sloan & Pearce).
- Lipset, S. M., & Rokkan, S. (Eds.). (1967). *Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives* (Vol. 7). Free press.
- Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara "Party-ID" dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 17. Hlm. 42
- Muhtadi, B. (2018). "Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional". *MAARIF Journal*, 13(2), 68-86.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2019). Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi.
- Mulia, S.M. (2012). "Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia" dalam Ahmad Syafii Maarif. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta: Democracy Project
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 6(01), 25-34.
- Nurdin Idris, F. (2016). "Memetakan Narasi Islamisme Di Medan, Sumatera Utara: Investigasi Terhadap Pola Penyebaran Dan Penerimaan Terhadap Radikalisme". *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 5(2).
- Rahmawati, D. (2017). Demokrasi dalam Genggaman para Pemburu Rente (Studi Kasus Asahan Sumatera Utara). *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 86-102.

Ramadhan, F. S., & Masykuri, R. (2018). Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 249-265. Hlm. 262

Roth, D. (2008). Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode. Jakarta: *Für Die Freiheit*.

Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 145-156.

Soehartono, I. (2008). *Metode Penelitian Sosial: Suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya*. PT Remaja Rosdakarya.

26

Ufen, A. (2006). Partai Politik di Indonesia Pasca Soeharto: Antara Politik Aliran dan Filipinanisasi. *Program Penelitian GIGA: Legitimasi dan Kemampuan Sistem Politik*, (37), 2-45.

Zahrotun Naimah, Z. (2018). Pola Operasionalisasi Politik Identitas di Indonesia. *ADALAH*, 2(11).

Keputusan KPU Sumatera Utara tentang Penetapan Revisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018.

1

Badan Pusat Statistik, "Kota Medan Dalam Angka 2020"

Profil Kota Medan PUPR.

BBC News Indonesia, Politik identitas: Pilpres 2019 ungkap potensi keretakan sosial di masyarakat" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48062051> Diakses 09 Agustus 2020

BBC.Com, Politik identitas ramai di Pilgub Sumatera Utara, isu korupsi jadi terabaikan? <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44601789> Diakses 5 Agustus 2020

BBC.Com, Politik identitas ramai di Pilgub Sumatera Utara, isu korupsi jadi terabaikan? <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44601789> Diakses 5 Agustus 2020

CNN Indonesia, "Tiga Wali Kota Medan Berturut-turut Terjerat Korupsi" diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/>

nasional/20191016165658-12-440068/tiga-wali-kota-medan-berturut-turut-terjerat-korupsi 13 08 2020

Edward Aspinall, 2019 <https://www.newmandala.org/indonesias-election-and-the-return-of-ideological-competition/> Diakses pada 09 Agustus 2020

Merdeka.com, "Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah kuasai Pantai Timur Sumut dan Tabagsel" <https://www.merdeka.com/politik/edy-rahmayadi-musa-rajekshah-kuasai-pantai-timur-sumut-dan-tabagsel.html> Diakses 6 Agustus 2020

Okezone, "Isu Agama Diprediksi Bakal Sudutkan Djarot di Pilgub Sumut" <https://news.okezone.com/read/2018/01/06/340/1841061/isu-agama-diprediksi-bakal-sudutkan-djarot-di-pilgub-sumut> Diakses 6 Agustus 2020

Tirto.id, Faktor yang Membuat Djarot Kalah dari Edy di Pilgub Sumut 2018 <https://tirto.id/faktor-yang-membuat-djarot-kalah-dari-edy-di-pilgub-sumut-2018-cM7n> Diakses 7 Agustus 2020

RIWAYAT HIDUP PENULIS 1

Identitas Diri

Nama : **Ahmad Hasan Ubaid, S.IP, M.IP**
Tempat Lahir : Gresik
Tanggal Lahir : 21-04-1982
Bidangi Ilmu : Ilmu Politik
Alamat : Malang, Jawa Timur
No.HP : 082139978822
Alamat Email : hasanubaid82@ub.ac.id

Riwayat Pendidikan Perguruan Tinggi

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Program Studi	Bidang Ilmu
2009	Magister S2	Universitas Airlangga Surabaya	Ilmu Politik	Ilmu Politik
2008	Sarjana S1	Universitas Airlangga Surabaya	Ilmu Politik	Ilmu Politik

Pelatihan Profesional

Tahun	Pelatihan	Institusi
2012	Program Kader Bangsa Fellowship Programe	ARSC Jakarta
2015	Program Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)	LP3 Universitas Brawijaya

Pengalaman Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2016	Koperasi Versus Koperasi Semu dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat	Anggota Peneliti	Hibah Internal/ DIPA PNBP
2017	Vote Buying dan Pemilihan Kepala Daerah: Patronase Politik dan Mekanisme Mobilisasi dalam Pemilihan Umum di Daerah Sub Kultur Madura	Anggota Peneliti	Hibah Internal/ DIPA PNBP
2018	Menelusuri Jejak Klientelisme di Pemilihan Kepala Derah Kabupaten Bangkalan 2018	Anggota Peneliti	Hibah Internal/ DIPA PNBP
2019	Political Branding Figur artis dalam Pemilu Legislatif 2019: Studi Kasus Dapil V dan Dapil VIII Jatim	Ketua Peneliti	BOPTN

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2016	Pelatihan Survei Politik bagi Santri	Hibah Internal DIPA PNBP	Rp. 9.000.000
2	2017	Sekolah Politik Wacana Kita di Kota Probolinggo	Hibah Internal DIPA PNBP	Rp. 9.000.000
3	2018	Sosialisasi Mitigasi Bencana Bagi Remaja di Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Malang	Hibah Internal DIPA PNBP	Rp. 9.000.000
4	2020	Vote Buying dalam Pemilu (Kerjasama dengan KPUD Kabupaten Malang)	Hibah Internal DIPA PNBP	Rp. 9.000.000

Karya Tulis Ilmiah

Tahun	Judul	Penerbit/ Jurnal
2018	Political Polarization Based on Religious Identity: Empirical Evidence from the 2017 Jakarta gubernatorial Election	Jurnal Studi Pemerintahan - UMY
2020	Selebritis Menjadi Politisi: Studi tentang Bagaimana Selebritis Menang atau Kalah dalam Pemilu Legislatif	Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro. Vol. 5 No 1 (2020)

Pengalaman Penyampaian Makalah Pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu & Tempat
1	Pembicara dalam acara KBFP Fellowship Program ke 8	Menata Jaringan	ARSC Jakarta 2018

Pengalaman Organisasi

Tahun	Organisasi	Jabatan
2005	Badan Legislatif Daerah	Ketua
2010	Lembaga Survei Proximity	Manajer Riset
2015	Lembaga Survei Terukur	Direktur
2015	Asosiasi Dosen Ilmu Politik Indonesia (ADIPI)	Anggota
2016	Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL)	Anggota

RIWAYAT HIDUP PENULIS 2

Data Pribadi

Nama Lengkap : **Dr. Mohammad Hidayaturrehman,
M.I.Kom**
Tempat/ tgl lahir : Sumenep, 15 Januari 1977
Alamat : Kolor, Sumenep, Jawa Timur
Telepon & WA : 0823 3292 0307
Email : hidayaturrehman@wiraraja.ac.id
Sinta ID : 6653757
Garuda ID : 676260
Scopus ID : 57216491050
Orcid ID : 0000-0001-8075-2891
Web of Science ID : AAB-5347-2021

Pendidikan

1. S3 Ilmu Sosial (Politik dan Pembangunan) Universitas Merdeka Malang, lulus 2020.
2. Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, lulus tahun 2012.

3. Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Aqidah, Jakarta, lulus tahun 2002.

Publikasi Jurnal

1. "Initiate of digital village for excellence service in archipelago area." Terbit di *Journal of Community Service and Empowerment*, Vol. 1 No. 3, 2020. (Diterbitkan oleh LPPI University of Muhammadiyah Malang).
2. "Government Response and Community Participation Overcoming Outbreak and Managing Its Impact Covid-19." Terbit di *Jurnal Ijtimaiyya*, Volume 13, No. 2, Desember 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
3. "The roles of technology in al-Quran exegesis in Indonesia." Terbit di *Technology and Society*, Volume 63, November 2020, (Science Direct, terindeks Internasional, Scopus Q1).
4. "Political investors: Political elite oligarchy and mastery of regional resources in Indonesia." Terbit di *Asian Journal of Comparative Politics*, Volume Mei 2020 (terindeks Internasional, Scopus Q2).
5. "Relation of Religion, Economy and Politics: Islamization of Malay Community through Trade and Kingdom." Terbit di *Jurnal Al-Tahrir*, Volume 20, No. 2, Juni 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
6. "Why Development Failed? Facts and Analysis of Development Failure in Sumenep." Terbit di *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
7. "Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep." Terbit di *Jurnal Sospol*, Volume 6, Nomor 1, April 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
8. "COVID-19: Public support to handle economic challenges." Terbit di *Jurnal Inovasi Ekonomi*, Volume 5, No. 2, Maret 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 4).

9. "The Role of Technology and Social Media in Spreading the Qur'an and Hadiths by Mubalig." Terbit di Jurnal DINIKA, Volume 4, No. 1, Tahun 2019 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
10. "Kiai and Political Relations Reconciling Politics and Religion in Indonesia." Terbit di Jurnal Tahrir IAIN Ponorogo, Volume 18, No. 2, November 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
11. "Analisis Curse Theory Pada Sumber Daya Alam Migas Bagi Warga Madura." Terbit di Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. Volume 14, No. 1, tahun 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
12. "Integration of Islam and Local Culture: *Tandhe'* in Madura." Terbit di Jurnal Miqot, UIN Sumatera Utara, Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
13. "Corporate Social Responsibility Strategi Komunikasi Perusahaan Migas." Terbit di Jurnal Nomosleca Volume 3, No. 2, Oktober 2017 (terakreditasi Nasional).

Publikasi Prosiding

1. "The Strategies of Religious Leaders to Become Regional Heads in Indonesia," Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia.
2. "Participation in building human resources: Independent strategies for facing demographic expansion in remote island." Terbit di CRC Press Taylor & Francis Group, November 2020. (terindeks Internasional Scopus).
3. "The Role of Local People in Improving Education of the Archipelago and Remote Communities of Indonesia." Terbit di Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Atlantis Press, Volume 267, Desember 2018 (terindeks Internasional, Thompson Reuters).

4. "Spice Route and Islamization on the West Coast of Sumatra in 17th-18th Century." Terbit di *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 302, Januari 2019, Atlantis Press (terindeks Internasional Thompson Reuters).
5. "Empowerment Salt Farmers to Alleviate Poverty." *International Conferences SDGs 2030 Challenges and Solutions*, Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, Agustus 2017, (terakreditasi Nasional).

Publikasi Buku

1. "Investor Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Studi Pembangunan (LKSP) Jakarta, 2020.
2. "Teori Sosial Empirik yang Sering Digunakan Untuk Penelitian Ilmiah; Skripsi, Tesis dan Disertasi." Diterbitkan oleh Edulitera, Malang, 2019 (penulis & editor).
3. "Teori Sosial dan Pertentangannya." Diterbitkan oleh Universitas Wiraraja Press, 2018 (penulis & editor).
4. "Curhat Dunia Pendidikan Kita." Diterbitkan oleh Cerdas Cermat, Malang, 2018 (editor).
5. "Universitas Wiraraja, Sejarah, Perkembangan dan Masa Depan." Diterbitkan oleh Universitas Wiraraja Press. 2018 (editor).
6. "Batik Madura, Sejarah, Jati Diri dan Motif." Diterbitkan oleh Universitas Wiraraja Press, 2017 (editor).
7. "Media dan Pelayanan Publik." Diterbitkan oleh LSPP Jakarta, 2014.

Publikasi di Media

1. "Jerat Investor Pilkada." Terbit di www.channelmuslim.com, 7 Maret 2021.
2. "Responses by Islamic Mass Organizations and Ummah in Indonesia to Reduce the Number of Covid-19 Victims." Terbit di Asia Research Institute, September 2020.

3. "COVID-19 Tests Government Solidity and Middle Class Solidarity." Terbit di ISA Social Transformation and Sociology of Development, Edisi 09, August 2020.
4. "Eid Al-Fitr and Religious Holidays: Challenges of Covid-19 in the Muslim World." terbit di The Sociological Review, edisi Solidarity and Care, 20 Mei 2020.
5. "Melawan Covid-19 Dengan Cinta." Terbit di Harian Bhirawa, 5 April 2020.
6. "Tak Ada (Salahnya) Madura Propinsi." Terbit di Majalah SULUH MADURA, edisi II Oktober 2016.
7. "UMKM Berjaringan Eksis di Era MEA." Terbit di Majalah ASEAN, edisi 12 Juni 2016.
8. "Rekonsiliasi Pasca Pilkada." Terbit di Majalah Parlemen, edisi Januari 2016.

Speakers

1. Pembicara pada "Refleksi Indonesia Tahun 2020, Apakah Baik-Baik Saja?" Diselenggarakan oleh Center for Indonesian Reform (CIR), Sabtu, 26 Desember 2020.
2. Pembicara pada "Seminar Nasional Public Speaking." Diselenggarakan oleh UKM Broadcasting Universitas Wiraraja, Sabtu, 26 Desember 2020.
3. Pembicara pada "Trans Integration on Lecture Series entitled, Ekonomi Islam Dalam Oligarki Politik, Mampukah Bertahan? Diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah UIN STS Jambi, Rabu, 18 November 2020.
4. Pembicara pada "Pelatihan Menjadi Jurnalis." Diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang, 29-30 Oktober 2020.
5. Pembicara pada "Bedah Buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." Diselenggarakan oleh RANAH Institut, Padang, Sumatera Barat, 16 Oktober 2020.

6. Pembicara “Ngobrol Inspiratif, Diskursus Politik, Demokrasi Terancam Dikorupsi.” Diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja, 12 September 2020.
7. Pembicara “Bedah Buku, Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD), 5 September 2020.
8. Pembicara “Diskusi Buku, Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh Center for Indonesia Reform (CIR), 29 Agustus 2020.
9. Pembicara “Mimbar Virtual, Politik Dinasti Antara Etis dan atau Hak Politik?” Diselenggarakan oleh Barisan.co, 28 Juli 2020.
10. Pembicara “Bedah Buku, Negosiasi Ulang Indonesia.” Diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan FISIP Universitas Wiraraja, 16 Mei 2020.

Presenters

1. Presenter pada “1st International Conference on Innovation in Science, Health and Technology (ICISHT), Clientelism Politics People’s Representative.” Diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo, 10-11 Desember 2020.
2. Presenter pada “Conference and Workshop, The Pandemic in Indonesia and the World: Reflections and the Way Forward.” Diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN STS Jambi Indonesia, pada 18-19 Desember 2020.
3. Presenter pada “The 3rd International Symposium on Religious Life (ISRL), Religious Life, Ethics and Human Dignity in the Disruptive Era.” Diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pada 2-5 Desember 2020.

4. Presenter pada "The 2020 Annual Conference Indonesian Association for Public Administration. Strengthening Governance Capacity and Public Administration Amidst Pandemic and New Normal Era." Diselenggarakan oleh IAPA, 11 November 2020.
5. Presenter pada International Conference on Islam and Muslim Societies (ICONIS) 2019, Magister Program State of Islamic Studies (IAIN) Salatiga, Central Java, 6-7 August, 2019, by the title "Political Investors: Political Elit Oligarchy and Mastery of Regional Resources."
6. Presenter pada International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries 2018, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 22-23 Oktober 2018.
7. Presenter pada 5th Asia-Pacific Education Conference (AECON 2018), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 13-14 Oktober 2018.
8. Presenter pada "The 1st International Conference on Islamic Studies (ICIS)." Diselenggarakan oleh Jurnal Al-Tahrir di IAIN Ponorogo, 10-12 Oktober 2018.
9. Presenter pada "Indonesia Development Forum 2018, Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur)." Diselenggarakan oleh Bappenas RI, di Jakarta 10-11 Juli 2018.
10. Presenter "Seminar Nasional, Perkembangan Terkini, Teori, Riset dan Praktik Administrasi Publik." Diselenggarakan oleh FISIP Universitas Negeri Jember, 14-15 Februari 2018.
11. Presenter pada "Internasional Islamic Research Forum (IIRF)." Diselenggarakan oleh IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada 27-28 Nopember 2017.
12. Presenter pada "Seminar Internasional Studi Islam, Islam a Friendly Cultural Religion." Diselenggarakan oleh IAIN Pamekasan, Jawa Timur, pada 21-22 Oktober 2017.

13. Presenter pada “International Conference on Sustainable Development Goals (2030): Challenges and Solutions.” Diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, pada 11-12 Agustus 2017.

Reviewer

1. Prosperity: Journal of Society and Empowerment. Published by Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia, 2021.
2. Environment, Development and Sustainability (ENVI) Journal, Scopus Q3, 2019-2020.
3. Jurnal Public Corner, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, 2018-sekarang.
4. Journal of Governance Innovation, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, April 2019-sekarang.
5. Journal of Community Service and Empowerment, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020-sekarang.
6. Tabuah, Rumah Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, 2020-sekarang.

Pekerjaan

1. Dosen FISIP Universitas Wiraraja Sumenep, Maret 2015-sekarang. (Mata kuliah yang diampu; Ekonomi Politik Pembangunan; Teori dan Isu Pembangunan; Administrasi Pembangunan; Politik Lokal).
2. Kontributor Metro TV wilayah Madura, Mei 2011-sekarang.
3. Produser televisi lokal Madura Channel, Maret 2008-Maret 2011.

Organisasi

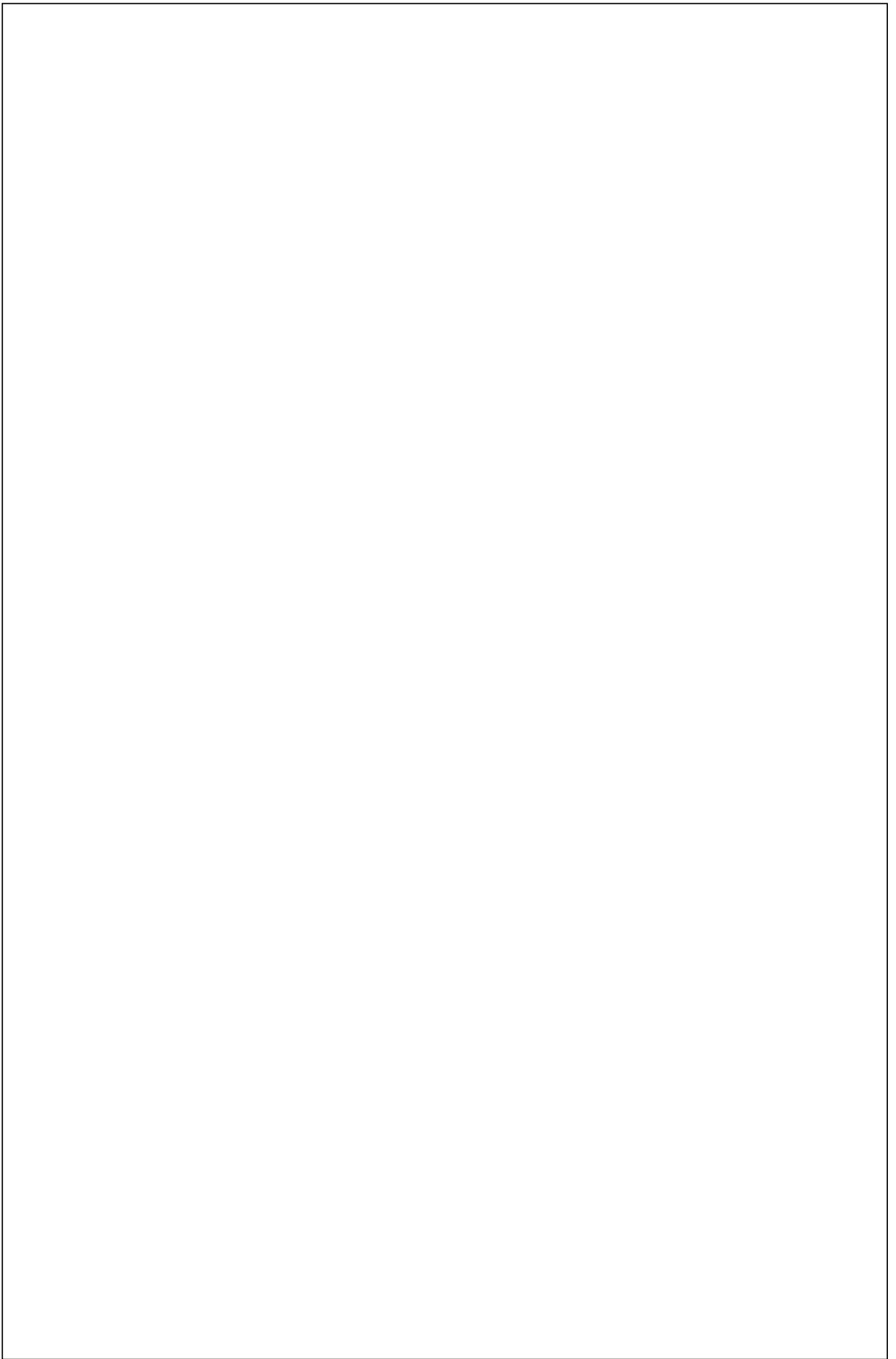
1. Direktur Center for Indonesian Reform (CIR), Desember 2020-sekarang
2. Penasihat Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) 2014-sekarang
3. Ketua Paguyuban Jurnalis Merah Putih (JMP) Kabupaten Sumenep 2011-2013
4. Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep 2013-2014.

Tugas

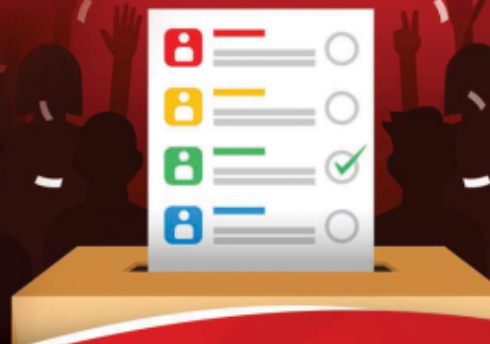
1. Pembina Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Wiraraja 2015-2020.
2. Tim seleksi (Perwakilan Kementerian Kominfo di daerah) Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode 2017-2021. Februari-Juli 2017.
3. Juri Anugerah Jurnalistik Migas (AJM) KEI-SKK Migas, 2016.

Award

1. Best paper pada Indonesia Development Forum 2018 dengan topik "Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur), Bappenas, di Jakarta 10-11 Juli 2018.
2. Best Paper pada Internasional Islamic Research Forum (IIRF) IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 27-28 Nopember 2017.
3. Pemenang ke tiga, Lomba Menulis Majalah Swa tentang CSR, tahun 2007



PERILAKU VOTERS DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL



Demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, termasuk pemilihan kepala daerah langsung membawa dampak yang besar terhadap masyarakat multikultural Indonesia. Pada tahun-tahun awal pasca reformasi, seiring dengan arus demokratisasi di Indonesia, para ilmuwan politik dan pengamat mencatat bahwa terdapat peningkatan polarisasi berbasis kesukuan dan agama di Indonesia. Beruntungnya hal tersebut tidak berujung pada konflik komunal.

Polarisasi yang terjadi pada pemilih di Indonesia, selanjutnya membentuk perilaku politik dan pilihan politik warga. Buku merekam dan menjelaskan dengan detail, jejak perilaku pemilih yang ada. Sehingga buku ini penting untuk dibaca oleh politisi, peneliti, sarjana, mahasiswa dan pemangku kebijakan yang bergelut di bidang politik.



Edulitera

Jl. Apel No. 28 A Semanding, Sumbersekar,
Dau, Kab. Malang (65151)
Telp./Fax: (0341) 5033268
Email: eduliteramalang@gmail.com

ISBN 978-623-6146-35-4



PERILAKU VOTERS DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pt.scribd.com Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
4	123dok.com Internet Source	<1%
5	rompi-sholat.blogspot.com Internet Source	<1%
6	www.lsn.or.id Internet Source	<1%
7	swarakepri.com Internet Source	<1%
8	idoc.pub Internet Source	<1%
9	www.slideshare.net Internet Source	<1%
10	edoc.pub Internet Source	<1%
11	id.123dok.com Internet Source	<1%
12	expedisi-kirim-mobil.blogspot.com Internet Source	<1%
13	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%

14	budayakanberislam.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
16	journal.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	<1 %
18	Submitted to Universitas Sumatera Utara Student Paper	<1 %
19	publikasi.undana.ac.id Internet Source	<1 %
20	beta.kompas.tv Internet Source	<1 %
21	www.fliphtml5.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Pasundan University Student Paper	<1 %
23	www.tagar.id Internet Source	<1 %
24	10beritaterpilih.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	www.suara.com Internet Source	<1 %
26	basithinramadan.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
28	www.mitrariset.com Internet Source	<1 %

29 Submitted to Lassiter High School <1 %
Student Paper

30 es.scribd.com <1 %
Internet Source

31 issuu.com <1 %
Internet Source

32 www.idntimes.com <1 %
Internet Source

33 Submitted to Universitas Pelita Harapan <1 %
Student Paper

34 digilib.unila.ac.id <1 %
Internet Source

35 repository.unhas.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On